



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah secara makro berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang berasal dari pungutan pajak, pungutan retribusi dan dana perimbangan maupun dari lain-lain pendapatan yang sah;
- b. Menyediakan informasi mengenai ketersediaan penerimaan periode berjalan, cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, baik yang mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- g. Menyediakan informasi mengenai nilai suatu asset tetap yang disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- h. Menyajikan informasi mengenai kegiatan operasional pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa, surplus/defisit-LO dan informasi mengenai nilai penyusutan untuk masing-masing periode.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara (pasal 23 ayat 1 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- t. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- u. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- v. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 Tentang perubahan Ketiga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- w. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- x. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
- y. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
 - 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah dan Transfer
 - 2.2.3 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintah



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- 2.2.4 Kebijakan Pembiayaan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
 - 2.3.2 Capaian Indikator Kinerja
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi /Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
 - 4.4.1 Pendapatan LRA
 - 4.4.2 Belanja
 - 4.4.3 Pendapatan LO
 - 4.4.4 Beban
 - 4.4.5 Aset
 - 4.4.6 Kewajiban
 - 4.4.7 Ekuitas
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1 Pendapatan
 - 5.1.1 Pendapatan Asli Daerah
 - 5.1.2 Pendapatan Transfer
 - 5.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - 5.2 Belanja
 - 5.2.1 Belanja Operasi
 - 5.2.2 Belanja Modal
 - 5.2.3 Belanja Tidak Terduga
 - 5.2.4 Belanja Transfer
 - 5.3 Pembiayaan Daerah
 - 5.3.1 Penerimaan Pembiayaan
 - 5.3.2 Pengeluaran Pembiayaan
 - 5.3.3 Perhitungan Anggaran
- Bab VI Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih
 - 6.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 6.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 6.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - 6.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 6.5 Lain-Lain
 - 6.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- BAB VII Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Neraca
 - 7.1 Aset
 - 7.1.1 Aset Lancar
 - 7.1.2 Investasi Jangka Panjang
 - 7.1.3 Aset Tetap
 - 7.1.4 Dana Cadangan
 - 7.1.5 Aset Lainnya
 - 7.2 Kewajiban
 - 7.2.1 Kewajiban Jangka Pendek
 - 7.2.2 Kewajiban Jangka Panjang
 - 7.3 Ekuitas
- Bab VIII Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Laporan Operasional
 - 8.1 Pendapatan
 - 8.1.1 Pendapatan Asli Daerah
 - 8.1.2 Pendapatan Transfer
 - 8.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah
 - 8.2 Beban
 - 8.2.1 Beban Pegawai
 - 8.2.2 Beban Persediaan
 - 8.2.3 Beban Jasa
 - 8.2.4 Beban Pemeliharaan
 - 8.2.5 Beban Perjalanan Dinas
 - 8.2.6 Beban Hibah
 - 8.2.7 Beban Bantuan Sosial
 - 8.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - 8.2.9 Beban Penyisihan Piutang
 - 8.2.10 Beban Transfer
 - 8.2.11 Belanja Tidak terduga
 - 8.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
 - 8.4 Beban Luar Biasa
- Bab IX Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
 - 9.1 Penjelasan Laporan Arus Kas
 - 9.1.1 Definisi Aktivitas Arus Kas
 - 9.1.2 Posisi Kas
- Bab X Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Laporan Perubahan Ekuitas
 - 10.1 Ekuitas Awal
 - 10.2 Surplus/Defisit-LO
 - 10.3 RK PPKD
 - 10.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
 - 10.5 Ekuitas Akhir
- Bab XI Penutup



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

BAB II

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.1 Ekonomi Makro

Asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada Tahun 2020 adanya nya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (COVID-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Cirebon, termasuk Provinsi Jawa Barat, memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. Kebijakan ini diperuntukkan bagi penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah.

Berikut disampaikan data sektor-sektor yang termasuk dalam basis ekonomi di Kabupaten Cirebon adalah Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya. Sementara itu, berdasarkan indikator kinerja pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024, pencapaian target indikator makro pembangunan Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1
Indikator Makro Pembangunan Daerah 2019-2020

No	Indikator Makro Ekonomi	2019		2020**	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi (RPJMD)**
1.	PDRB ADHB (Rp. Juta)	49.446.364	49.186.357	23.480.000	21.748.592
2.	PDRB ADHK (Rp. Juta)	12.847.477	33.723.897	15.820.000	14.327.136
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,55	4,68	5,15 – 5,51	(-1,08)
4.	Tingkat Inflasi (%)	3,5-4,5	2,00	2,7 – 3,5	1,14
5.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,30	1,25		0,94
6.	Penyerapan Investasi (Rp. juta)	1.492.239	1.704.927	2.208.000	5.583.000
7.	Pendapatan per kapita (Rp)	21.568.345	15.315.423		21.827.070



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Indikator Makro Ekonomi	2019		2020**	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi (RPJMD)**
8.	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	91,3	90,32	50	31,43
9.	Jumlah Penduduk (jiwa)	-	2.189.785	-	2.270.621
10.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,85 - 74,41	68,69	69,23	68,75
	a. Indeks Pengetahuan				
	- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,03	6,71	6,78	6,74
	- Harapan Lama Sekolah (HLS)	-	12,24	12,52	12,57
	b. Indeks Kesehatan				
- Umur Harapan Hidup (UHH)	66,51	71,74	71,82	71,82	
c. Indeks Pengeluaran					
	- Pengeluaran per Kapita (Rp ribu)	-	14,73		11,054
11	Penduduk Miskin (%)	7,02	9,94	9,7	11,24
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,7	10,56	9,11	11,52
13	Indeks Gini Ratio	-	0,345	0,340	0,39*

Keterangan : **) Proyeksi Bappelitbangda, 2021

1. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cirebon

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dapat diukur dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Dari perubahan PDRB tersebut, terjadi penurunan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar **55,78%** dari angka **49.186.357** juta rupiah tahun 2019 menjadi **21.748.592** juta rupiah pada tahun 2020. Selain itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang juga merupakan barometer pertumbuhan ekonomi secara riil dari Tahun 2019 mencapai **33.723.897** juta rupiah atau menurun sebesar **57,52%** pada Tahun 2020 sebesar **14.327.136** juta rupiah. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mengalami penurunan sebesar **5,76%** begitu juga dengan Tingkat Inflasi menurun **0,86%** dan laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) menurun **0,31%**. Penyerapan Investasi terjadi kenaikan sebesar **227,46%** dari angka **1.704.927** juta rupiah tahun 2019 menjadi **5.583.000** juta rupiah pada tahun 2020. Tingkat Kesempatan Kerja mengalami penurunan **58,89%** dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami penurunan **0,06%** sedangkan Penduduk Miskin mengalami peningkatan **1,30%** sama halnya dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang mengalami kenaikan **0,96%**.

2.2 Kebijakan Keuangan

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Sistem penganggaran dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- b. Dana Perimbangan:
- 1) Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - 2) Dana Alokasi Umum;
 - 3) Dana Alokasi Khusus.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
- 1) Pendapatan Hibah;
 - 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya;
 - 3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
 - 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya.
2. Belanja Daerah, terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung:
- 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Hibah;
 - 3) Belanja Bantuan Sosial;
 - 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;
 - 5) Belanja Bantuan Keuangan;
 - 6) Belanja Tidak Terduga.
- b. Belanja Langsung:
- 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa;
 - 3) Belanja Modal.
3. Pembiayaan Daerah, terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:
- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - 2) Pencairan Dana Cadangan;
 - 3) Penerimaan Piutang Daerah.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:
- 1) Pembentukan dana cadangan;
 - 2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
 - 3) Pembayaran Pokok Utang.

Berbagai kebijakan pemerintah diambil untuk mengatasi pandemi COVID-19, yang terbesar adalah terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Selanjutnya, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan lain yang ditetapkan untuk memitigasi pengaruh COVID-19 terhadap APBN adalah Peraturan Presiden Nomor



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Sebagai tindak lanjut undang-undang tersebut, diterbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Untuk melaksanakan amanat yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, sehingga Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Mei 2020 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan APBD.

Kebijakan keuangan pemerintah daerah dalam rangka:

1. Penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
2. Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocussing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD termasuk insentif untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Penyesuaian alokasi APBD diprioritaskan untuk:

1. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19.
2. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.
3. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*, antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19.

Penyesuaian alokasi APBD meliputi:

1. Pendapatan daerah
2. Belanja daerah
3. Pembiayaan daerah

Penyesuaian alokasi pendapatan daerah, meliputi:

1. Pendapatan asli daerah memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro;
2. Pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah melalui rasionalisasi dan/atau perubahan alokasi belanja daerah, juga meliputi:

1. Penggunaan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dana transfer umum untuk penanganan pandemi COVID-19; dan
2. Penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah yang bersumber dari transfer dan penggunaannya mempedomani ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pemerintah Daerah harus melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocussing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Penggunaan BTT dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi COVID-19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocussing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan ke belanja tidak terduga.

Pemerintah Daerah melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocussing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran antara lain terhadap:

1. Kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
3. Belanja pegawai meliputi penyesuaian besaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenisnya lainnya, mengurangi honorarium kegiatan, dan/atau pemberian uang lembur;
4. Belanja barang/jasa antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya;
5. Belanja modal yang kurang prioritas;
6. Pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
7. Pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD.

Tata cara penggunaan BTT dalam rangka penanganan COVID-19:

1. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
2. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait antisipasi dan penanganan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari dihitung sejak diterimanya RKB;

3. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme LS atau TU sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan kepala daerah;
5. Pencairan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang mengajukan RKB;
6. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran perangkat daerah yang mengajukan RKB;
7. Kepala perangkat daerah yang mengajukan RKB, bertanggungjawab secara formal dan material terhadap belanja antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya;
8. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang mengajukan RKB, kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD;
9. Berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada CaLK; dan
10. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanganan COVID-19 oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.

Pemberian hibah berupa uang dalam rangka penanganan pandemi Covid-19:

1. Hibah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan melalui jenis belanja hibah yang didasarkan pada permohonan hibah dari penerima hibah yang diusulkan melalui perangkat daerah terkait kepada PPKD.
2. Pemberian hibah dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah. Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah.
3. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal terdapat pemberian hibah yang sudah disalurkan dengan pembebanan langsung BTT, maka dalam pelaporan keuangan dilakukan reklasifikasi dari jenis BTT ke jenis belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bansos berupa uang dalam rangka penanganan pandemic Covid-19:

1. Bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 untuk penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* diberikan melalui jenis BTT dan/atau jenis belanja bantuan sosial.
2. Pemberian bantuan sosial diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial melalui perangkat daerah terkait berdasarkan RKB yang disampaikan kepada PPKD.
3. Pemberian bantuan sosial kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah harus memperhatikan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan, analisa yang matang dan mendalam serta *evidence-based* dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima bantuan sosial.

Pemberian hibah/bantuan sosial dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pemberian hibah/bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 tidak mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemda dapat menerima hibah termasuk sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis, berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan atas penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang/barang **dapat digunakan langsung oleh perangkat daerah** yang secara fungsional menangani pandemi COVID-19 dengan berpedoman pada Pasal 327 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta IPSAP 02 Interpretasi 03, dan Buletin Teknis Nomor 13 Akuntansi Hibah.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk target Pendapatan Daerah Tahun 2020. Perubahan anggaran pendapatan daerah awal senilai **Rp3.579.590.687.796,00** dan revisi anggaran pendapatan sesudah penanganan pandemi COVID-19 senilai **Rp3.858.761.615.658,00** yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah awal ditargetkan **Rp644.500.670.876,00** dan perubahan anggaran Pendapatan Asli Daerah sesudah penanganan pandemic Covid-19 senilai **Rp565.008.144.276,00** terdiri dari :

- a) Pendapatan Pajak Daerah senilai **Rp200.000.000.000,00;**
- b) Retribusi Daerah senilai **Rp30.688.002.650,00;**



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai **Rp9.633.523.000,00;**
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah senilai **Rp324.686.618.626,00.**

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditargetkan senilai **Rp2.926.004.621.017,00** terdiri dari:

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan senilai **Rp2.088.479.031.592,00** terdiri dari:
 - 1. Dana Bagi Hasil Pajak senilai **Rp83.766.233.867,00;**
 - 2. Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam senilai **Rp58.652.237.967,00;**
 - 3. Dana Alokasi Umum senilai **Rp1.430.715.056.000,00;**
 - 4. Dana Alokasi Khusus senilai **Rp515.345.503.758,00.**
- b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya senilai **Rp504.519.758.000,00;** yang diperoleh dari Dana Desa dari APBN senilai **Rp 452.375.165.000,00;** dan Dana Insentif Daerah (DID) senilai **Rp52.144.593.000,00.**
- c) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi ditargetkan senilai **Rp333.005.831.425,00** terdiri dari:
 - 1. Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor senilai **Rp93.710.050.470,00;**
 - 2. Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor senilai **Rp57.547.787.250,00;**
 - 3. Pendapatan bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai **Rp84.196.324.819,00;**
 - 4. Pendapatan bagi hasil Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan senilai **Rp207.534.450,00;**
 - 5. Pendapatan bagi hasil pajak rokok senilai **Rp97.344.134.436,00.**

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan senilai **Rp367.748.850.365,00** terdiri dari:

- a) Pendapatan hibah senilai **Rp234.003.300.000,00;**
- b) Bantuan Keuangan dari Provinsi senilai **Rp133.745.550.365,00.**

Dalam upaya memenuhi target-target pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi pajak dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pajak dan retribusi daerah, mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh pemerintah daerah melalui perbaikan administrasi dan manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, dan mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

daerah, pembaharuan data base dan pemetaan data tentang potensi pendataan daerah sebagai data dasar penghitungan PAD, meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan SKPD penghasil, mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, dan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap menjaga agar tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang memberatkan masyarakat.

Realisasi Pendapatan Daerah selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD tahun 2020 senilai **Rp616.573.116.956,01** mengalami penurunan senilai **Rp23.268.224.402,18** atau sebesar **3,64%** dari realisasi tahun 2019 senilai **Rp639.841.341.358,19**. Realisasi PAD sebagai berikut:

- a) Pendapatan Pajak Daerah senilai **Rp223.651.925.429,00** atau mengalami kenaikan senilai **Rp10.079.686.813,00** atau sebesar **4,76%** dari realisasi tahun 2019 yang mencapai senilai **Rp213.572.238.616,00**;
- b) Pendapatan Retribusi Daerah senilai **Rp31.122.706.929,00** atau mengalami penurunan senilai **Rp11.718.396.076,00** atau sebesar **27,35%** dari realisasi tahun 2019 yang mencapai senilai **Rp42.841.103.005,00**;
- c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai **Rp9.312.545.336,00** mengalami penurunan senilai **Rp3.678.070.507,00** atau sebesar **28,31%** dari realisasi tahun 2019 yang mencapai senilai **Rp12.990.615.843,00**;
- d) Lain-lain PAD yang Sah senilai **Rp352.485.939.262,01** mengalami penurunan senilai **Rp17.951.444.632,18** atau sebesar **4,85%** dari realisasi tahun 2019 yang mencapai senilai **Rp370.437.383.894,19**.

Covid-19 merupakan pandemi global yang dampaknya menyebar secara cepat ke seluruh daerah di berbagai sektor seperti perdagangan, kesehatan transportasi, pariwisata dan lainnya, termasuk juga sektor perekonomian dan berpengaruh juga terhadap penerimaan daerah.

Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap penurunan pendapatan asli daerah, baik Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah karena menurunnya tingkat produksi dan konsumsi masyarakat, serta pembatasan sosial berskala besar.

Kebijakan yang diambil atas kondisi tersebut, diterbitkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 973/159-Bappenda/2020 tentang Pemberian Insentif/Stimulus berupa Pengurangan Pajak Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Pajak Daerah dalam menangani Dampak dari Corona Virus Disease 2019 (Covid) di Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2020 senilai **Rp2.809.568.527.462,00** mengalami penurunan senilai **Rp159.928.946.293** atau sebesar **5,39%** dari realisasi tahun 2019 yang mencapai **Rp2.969.497.473.755,00**. Penurunan tersebut diperoleh dari Dana Alokasi Umum sebesar **10,95%**, Dana Alokasi Khusus sebesar **9,29%** dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar **3,89%**, namun terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar **37,72%**, Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar **58,01%** dan Dana Penyesuaian sebesar **9,41%**

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2020 senilai **Rp344.562.422.183,00** mengalami penurunan senilai **Rp60.568.693.420,00** atau sebesar **14,95%** dari tahun 2019 senilai **Rp405.131.115.603,00**. Penurunan tersebut berasal dari Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar **39,51%** namun terdapat kenaikan pada Bantuan hibah sebesar **5,33%**.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah dan Transfer

Kebijakan Belanja Daerah dan Transfer diarahkan untuk terpenuhinya Belanja Daerah dan Transfer tahun 2020. Belanja Daerah dan Transfer pada tahun 2020 sebelum perubahan dialokasikan senilai **Rp3.626.276.619.828,00** dan setelah perubahan guna penanganan pandemi Covid-19 menjadi senilai **Rp4.146.596.054.014,06** terdiri dari:

1. Belanja

Belanja dialokasikan sebelum perubahan senilai **Rp2.953.220.443.828,00** dan setelah perubahan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 senilai **Rp3.474.992.362.014,06** dengan rincian sebagai berikut:

a) Belanja Operasi

Tabel 2.2
Belanja Daerah

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Beratmbah/ (berkurang)
1	Belanja Pegawai	1.938.308.396.408,00	1.958.308.785.644,00	(55.728.025.924,00)
2	Belanja Barang dan Jasa	723.408.975.726,00	928.917.913.431,00	75.728.415.160,00
3	Belanja Hibah	12.647.240.000,00	47.196.740.000,00	34.349.500.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial	1.850.938.000,00	1.850.938.000,00	-
	Jumlah	2.676.215.550.134,00	2.936.274.377.075,00	260.058.826.941,00

b) sebelum perubahan senilai **Rp.267.004.893.694** dan setelah perubahan senilai **Rp357.509.125.122,00**. Nilai setelah perubahan terdiri atas Belanja Peralatan dan Mesin senilai **Rp152.704.155.008,00**; Belanja Gedung dan Bangunan senilai **Rp123.078.369.496,00**; Belanja Jalan,



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Irigasi dan Jaringan senilai **Rp81.243.896.212,00**; Belanja Aset Tetap Lainnya senilai **Rp482.704.406,00**.

- c) Belanja Tak Terduga sebelum perubahan sebesar **Rp.10.000.000,00** dan setelah perubahan senilai **Rp181.208.859.817,06**.

2. Transfer

Transfer sebelum perubahan dialokasikan senilai **Rp.644.449.045.000** dan setelah perubahan senilai **Rp671.603.692.000,00** untuk kebutuhan:

- a) Transfer dari Bagi Hasil ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa senilai **Rp28.607.131.000,00** terdiri dari Bagi Hasil Pajak senilai **Rp24.232.263.000,00** dan Bagi Hasil Retribusi senilai **Rp4.374.868.000,00**.
- b) Belanja Bantuan Keuangan sebelum perubahan senilai **Rp.644.449.045.000** dan setelah perubahan senilai **Rp642.996.561.000,00**. Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerinthan Desa senilai **Rp641.444.331.000,00** dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai politik senilai **Rp1.552.230.000,00**.

Realisasi Belanja dan Transfer selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Belanja

Realisasi Belanja tahun 2020 senilai **Rp3.024.639.762.349,00** mengalami penurunan senilai **Rp669.574.737.908,00** atau **10,35%** dari tahun 2019 senilai **Rp3.373.974.352.440,86**. Penurunan Belanja tersebut berasal dari realisasi Belanja Operasi senilai **Rp2.673.701.396.925,00** atau **4,04%**, Belanja Modal senilai **Rp296.952.045.604,00** atau **49,48%** namun terjadi kenaikan belanja tak terduga senilai **Rp 53.986.319.820,00** atau **100,00%**.

2. Transfer

Realisasi Transfer tahun 2020 senilai **Rp669.574.737.908,00** mengalami kenaikan senilai **Rp17.793.154.487,00** atau **2,73%** dari tahun 2019 senilai **Rp651.781.583.421,00** kenaikan realisasi Transfer tersebut diperoleh dari Belanja Bantuan Keuangan senilai **Rp11.359.182.206,00** atau **1,80%** dan Transfer/Bagi Hasil ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa senilai **Rp 26.867.504.952,00** atau **31,49%**.

Berikut adalah program dan kegiatan penanganan Covid di Kabupaten Cirebon:

1. Program Penanganan Kesehatan

Tabel 2.3
Program Penanganan Kesehatan

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah	44.761.247.796	35.677.248.329	79,71
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan RSUD WALED	29.357.900.000	28.213.280.945	96,10
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan RSUD ARJAWINANGUN	14.693.850.000	11.342.838.947	77,19



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aktivitas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1.500.000.000	1.486.500.000	99,10
Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Pengamanan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat)	2.937.240.000	2.158.733.500	73,50
Penanganan Kesehatan (BTT)	37.534.515.000	27.429.646.564	73,08
JUMLAH	130.784.752.796	106.308.248.285	81,28

2. Program Penanganan Dampak Ekonomi

Tabel 2.4
Program Penanganan Dampak Ekonomi

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	2.189.361.812	2.096.010.381	95,74
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	19.777.800	19.452.708	98,36
Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	22.750.000	22.750.000	100,00
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	2.257.391.600	1.925.492.000	85,30
Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Menengah	82.187.400	81.294.400	98,91
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	718.653.800	612.236.200	85,19
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	149.747.700	138.747.700	92,65
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	1.188.923.000	1.169.780.600	98,39
Pengembangan lumbung pangan desa	81.990.000	81.610.000	99,54
Penyuluhan sumber pangan alternatif	471.496.000	470.949.500	99,88
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	269.690.000	252.305.000	93,55
Pelatihan Budidaya, Pengolahan Hasil dan Pemasaran	447.245.400	444.072.900	99,29
Pengembangan Ternak Ruminansia	8.486.600	3.836.600	45,21
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk	215.210.200	104.671.114	48,64
Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	26.794.000	22.711.659	84,76
Penanganan Dampak Ekonomi (BTT)	25.023.010.000	-	-
JUMLAH	33.172.715.312	7.445.920.762	22,45

3. Program Penyediaan Social Safety Net/Jaring Pengaman Sosial

Tabel 2.5
Program Penyediaan Social Safety Net/Jaringan Pengaman Sosial

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Hibah Bantuan Sosial untuk Individu dan atau Keluarga	1.850.938.000		
Belanja Tidak Terduga	62.557.523.159	29.542.820.000	47,23
JUMLAH	64.408.461.159	29.542.820.000	45,87

2.2.3 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) diarahkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Belanja Urusan pemerintahan daerah baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan diarahkan dalam upaya Pencapaian prioritas dan sasaran



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- pembangunan daerah terhadap upaya mendorong pencapaian target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Tahun 2014. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mengacu pada Standar Satuan Harga;
- b. Belanja Urusan pemerintahan daerah baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan diarahkan dan diselaraskan dengan indikasi program dan kegiatan tahunan daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang dalam RTRW;
 - c. Belanja Urusan pemerintahan daerah baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan diarahkan dan disinergikan dengan sasaran program dan kegiatan pembangunan tahun 2014 sesuai sasaran standar pelayanan minimum dan tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs);
 - d. Belanja Urusan pemerintahan daerah baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan wajib mengakomodasi program dan kegiatan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan melalui pendekatan pola penganggaran PIK (Pagu Indikatif Kewilayahan);
 - e. Belanja Urusan pemerintahan daerah baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD, diarahkan sebagaimana poin a,b,c dalam penentuan pagu anggarannya dihitung melalui pendekatan pola PIS (Pagu Indikatif Sektoral).

Kebijakan belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah diarahkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Belanja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (PAP) diarahkan untuk mendukung tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Standar Biaya Belanja Daerah dan dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 12 bulan;
- b. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya, pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- c. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), pemerintah daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

bagi seluruh penduduk, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- d. Belanja wajib/mengikat yang harus dianggarkan oleh SKPD pada RKA-SKPD agar mencantumkan sumber pendanaan, misalnya:
 - a) Program kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat TA. 2020.
 - b) Program kegiatan yang bersumber dari DAK fisik dan non fisik TA 2020, DBHCHT TA 2020, DBH Pajak Rokok TA 2020, Dana Insentif daerah TA 2020, Dana Desa TA 2020 dan Hibah BOS TA 2020.
 - c) SILPA program/kegiatan yang bersumber Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun sebelumnya, DAK fisik dan non fisik tahun sebelumnya, DBHCHT tahun sebelumnya, DBH Pajak Rokok tahun sebelumnya, Dana Insentif daerah tahun sebelumnya, Dana Desa tahun sebelumnya dan Hibah BOS tahun sebelumnya.
- e. Dalam hal pemerintah daerah memiliki sisa DAK Fisik pada bidang/subbidang yang output kegiatannya belum tercapai, dan Sisa Bantuan keuangan provinsi jawa barat maka, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk sisa DAK Fisik dan bantuan keuangan provinsi 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat output kegiatannya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
 - b) Untuk sisa DAK Fisik dan bantuan keuangan provinsi lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik dan bantuan keuangan provinsi jawa barat pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
 - c) Dalam hal pemerintah daerah memiliki sisa DAK Fisik dan bantuan keuangan provinsi pada bidang/subbidang yang output kegiatannya telah tercapai, digunakan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana transfer dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan terlebih



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dilaksanakannya audit oleh BPK-RI dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- f. Program kegiatan yang dibiayai dari Dana DBH-CHT paling sedikit 50% penggunaannya untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Program kegiatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

2.2.4 Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan Pembiayaan diarahkan untuk menghadapi surplus atau defisit anggaran tahun 2020. Pembiayaan tahun 2020 dialokasikan senilai **Rp288.834.438.356,06** sebagai berikut

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan ditargetkan senilai **Rp288.834.438.356,06** sebagai berikut:

- a) Penggunaan Silpa senilai **Rp288.834.438.356,06**;
- b) Pencairan Dana Cadangan senilai **Rp0,00**;
- c) Penerimaan Pinjaman Daerah senilai **Rp0,00**.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan senilai **Rp1.000.000.000,00** sebagai berikut:

- a) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah senilai **Rp1.000.000.000,00**;
- b) Pembayaran Pokok Utang senilai **Rp0,00**.

Realisasi Pembiayaan selama tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2020 senilai **Rp321.620.443.501,73** mengalami penurunan senilai **Rp32.786.005.145,67** atau sebesar **10,19%** dari realisasi tahun 2019



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

senilai **Rp321.620.443.501,73**. Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2020 sebagai berikut:

- a) Penggunaan SiLPA senilai **Rp300.120.443.501,73** mengalami penurunan senilai **Rp11.286.005.145,67** atau **3,76%** dari realisasi tahun 2019 yang mencapai senilai **Rp300.120.443.501,73**;
- b) Pencairan Dana Cadangan senilai **Rp0,00** atau bersifat konstan
- c) Penerimaan Pinjaman senilai **Rp0,00** atau mengalami penurunan senilai **Rp21.500.000.000,00** atau **100,00%** dari realisasi tahun 2019 yang mencapai senilai **Rp21.500.000.000,00**.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2020 senilai **Rp0,00** mengalami penurunan senilai **Rp21.500.000.000,00** atau sebesar **100,00%** dari realisasi tahun 2019 senilai **Rp21.500.000.000,00**. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2020 sebagai berikut:

- a) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah senilai **Rp0,00** atau bersifat konstan
- b) Pembayaran Pokok Utang senilai **Rp0,00** mengalami penurunan senilai **Rp21.500.000.000,00** atau **100,00%** dari realisasi tahun 2019 yang mencapai senilai **Rp21.500.000.000,00**.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Kinerja Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Penetapan Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

2.3.2 Capaian Indikator Kinerja

Kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah, yang akhirnya bermuara terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka kinerja pembangunan daerah dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah, ketercapaian setiap indikator makro tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh *stakeholder* pembangunan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

BAB II

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

2.4 Ekonomi Makro

Asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada Tahun 2020 adanya nya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Corona Virus Disease (COVID-19), dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Cirebon, termasuk Provinsi Jawa Barat, memperlihatkan peningkatan dan persebaran yang semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor, termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2020, sehingga dibutuhkan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran. Kebijakan ini diperuntukkan bagi penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi melalui penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah.

Berikut disampaikan data sektor-sektor yang termasuk dalam basis ekonomi di Kabupaten Cirebon adalah Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya. Sementara itu, berdasarkan indikator kinerja pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2019-2024, pencapaian target indikator makro pembangunan Tahun 2019-2020 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1
Indikator Makro Pembangunan Daerah 2019-2020

No	Indikator Makro Ekonomi	2019		2020**	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi (RPJMD)**
1.	PDRB ADHB (Rp. Juta)	49.446.364	49.186.357	23.480.000	21.748.592
2.	PDRB ADHK (Rp. Juta)	12.847.477	33.723.897	15.820.000	14.327.136
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,55	4,68	5,15 – 5,51	(-1,08)
4.	Tingkat Inflasi (%)	3,5-4,5	2,00	2,7 – 3,5	1,14
5.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,30	1,25		0,94
6.	Penyerapan Investasi (Rp. juta)	1.492.239	1.704.927	2.208.000	5.583.000
7.	Pendapatan per kapita (Rp)	21.568.345	15.315.423		21.827.070



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

No	Indikator Makro Ekonomi	2019		2020**	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi (RPJMD)**
8.	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	91,3	90,32	50	31,43
9.	Jumlah Penduduk (jiwa)	-	2.189.785	-	2.270.621
10.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,85 - 74,41	68,69	69,23	68,75
	a. Indeks Pengetahuan				
	- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,03	6,71	6,78	6,74
	- Harapan Lama Sekolah (HLS)	-	12,24	12,52	12,57
	b. Indeks Kesehatan				
- Umur Harapan Hidup (UHH)	66,51	71,74	71,82	71,82	
10.	c. Indeks Pengeluaran				
	- Pengeluaran per Kapita (Rp ribu)	-	14,73		11,054
11	Penduduk Miskin (%)	7,02	9,94	9,7	11,24
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,7	10,56	9,11	11,52
13	Indeks Gini Ratio	-	0,345	0,340	0,39*

Keterangan : **) Proyeksi Bappelitbangda, 2021

2. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cirebon

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dapat diukur dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Dari perubahan PDRB tersebut, terjadi penurunan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar **55,78%** dari angka **49.186.357** juta rupiah tahun 2019 menjadi **21.748.592** juta rupiah pada tahun 2020. Selain itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang juga merupakan barometer pertumbuhan ekonomi secara riil dari Tahun 2019 mencapai **33.723.897** juta rupiah atau menurun sebesar **57,52%** pada Tahun 2020 sebesar **14.327.136** juta rupiah. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mengalami penurunan sebesar **5,76%** begitu juga dengan Tingkat Inflasi menurun **0,86%** dan laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) menurun **0,31%**. Penyerapan Investasi terjadi kenaikan sebesar **227,46%** dari angka **1.704.927** juta rupiah tahun 2019 menjadi **5.583.000** juta rupiah pada tahun 2020. Tingkat Kesempatan Kerja mengalami penurunan **58,89%** dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami penurunan **0,06%** sedangkan Penduduk Miskin mengalami peningkatan **1,30%** sama halnya dengan Tingkat Pengangguran Terbuka yang mengalami kenaikan **0,96%**.

2.5 Kebijakan Keuangan

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Sistem penganggaran dikelompokkan sebagai berikut:

4. Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - d. Pendapatan Asli Daerah:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- e. Dana Perimbangan:
- 1) Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - 2) Dana Alokasi Umum;
 - 3) Dana Alokasi Khusus.
- f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
- 1) Pendapatan Hibah;
 - 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya;
 - 3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
 - 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya.
5. Belanja Daerah, terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung:
- 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Hibah;
 - 3) Belanja Bantuan Sosial;
 - 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;
 - 5) Belanja Bantuan Keuangan;
 - 6) Belanja Tidak Terduga.
- b. Belanja Langsung:
- 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa;
 - 3) Belanja Modal.
6. Pembiayaan Daerah, terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:
- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - 2) Pencairan Dana Cadangan;
 - 3) Penerimaan Piutang Daerah.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:
- 1) Pembentukan dana cadangan;
 - 2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
 - 3) Pembayaran Pokok Utang.

Berbagai kebijakan pemerintah diambil untuk mengatasi pandemi COVID-19, yang terbesar adalah terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Selanjutnya, Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan lain yang ditetapkan untuk memitigasi pengaruh COVID-19 terhadap APBN adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Sebagai tindak lanjut undang-undang



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

tersebut, diterbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Untuk melaksanakan amanat yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, sehingga Menteri Dalam Negeri pada tanggal 27 Mei 2020 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan APBD.

Kebijakan keuangan pemerintah daerah dalam rangka:

1. Penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
2. Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.

Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocussing*), perubahan alokasi, dan penggunaan APBD termasuk insentif untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Penyesuaian alokasi APBD diprioritaskan untuk:

1. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19.
2. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.
3. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*, antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19.

Penyesuaian alokasi APBD meliputi:

1. Pendapatan daerah
2. Belanja daerah
3. Pembiayaan daerah

Penyesuaian alokasi pendapatan daerah, meliputi:

1. Pendapatan asli daerah memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro;
2. Pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara; dan/atau
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah melalui rasionalisasi dan/atau perubahan alokasi belanja daerah, juga meliputi:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

1. Penggunaan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dana transfer umum untuk penanganan pandemi COVID-19; dan
2. Penyesuaian alokasi anggaran belanja daerah yang bersumber dari transfer dan penggunaannya mempedomani ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pemerintah Daerah harus melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocussing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Penggunaan BTT dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi COVID-19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocussing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan ke belanja tidak terduga.

Pemerintah Daerah melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocussing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran antara lain terhadap:

1. Kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
3. Belanja pegawai meliputi penyesuaian besaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenisnya lainnya, mengurangi honorarium kegiatan, dan/atau pemberian uang lembur;
4. Belanja barang/jasa antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya;
5. Belanja modal yang kurang prioritas;
6. Pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
7. Pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD.

Tata cara penggunaan BTT dalam rangka penanganan COVID-19:

1. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD); PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

2. Kepala perangkat daerah yang secara fungsional terkait, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme LS atau TU sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan kepala daerah;
4. Pencairan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang mengajukan RKB;
5. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran perangkat daerah yang mengajukan RKB;
6. Kepala perangkat daerah yang mengajukan RKB, bertanggungjawab secara formal dan material terhadap belanja antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya;
7. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh kepala perangkat daerah yang mengajukan RKB, kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD;
8. Berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada CaLK; dan
9. Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanganan COVID-19 oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.

Pemberian hibah berupa uang dalam rangka penanganan pandemi Covid-19:

1. Hibah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 diberikan melalui jenis belanja hibah yang didasarkan pada permohonan hibah dari penerima hibah yang diusulkan melalui perangkat daerah terkait kepada PPKD.
2. Pemberian hibah dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah. Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah.
3. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal terdapat pemberian hibah yang sudah disalurkan dengan pembebanan langsung BTT, maka dalam pelaporan keuangan dilakukan reklasifikasi dari jenis BTT ke jenis belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian bansos berupa uang dalam rangka penanganan pandemic Covid-19:

1. Bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 untuk penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* diberikan melalui jenis BTT dan/atau jenis belanja bantuan sosial.
2. Pemberian bantuan sosial diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial melalui perangkat daerah terkait berdasarkan RKB yang disampaikan kepada PPKD.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

3. Pemberian bantuan sosial kepada individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

Pemerintah Daerah berdasarkan kebutuhan, analisa yang matang dan mendalam serta *evidence-based* dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan penerima bantuan sosial.

Pemberian hibah/bantuan sosial dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pemberian hibah/bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 tidak mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pemda dapat menerima hibah termasuk sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis, berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendapatan atas penerimaan dana yang bersumber dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis dalam bentuk uang/barang **dapat digunakan langsung oleh perangkat daerah** yang secara fungsional menangani pandemi COVID-19 dengan berpedoman pada Pasal 327 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (2) huruf c, Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Paragraf 21 PSAP Nomor 02 Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta IPSAP 02 Interpretasi 03, dan Buletin Teknis Nomor 13 Akuntansi Hibah.

2.2.5 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk target Pendapatan Daerah Tahun 2020. Perubahan anggaran pendapatan daerah awal senilai **Rp3.579.590.687.796,00** dan revisi anggaran pendapatan sesudah penanganan pandemi COVID-19 senilai **Rp3.858.761.615.658,00** yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah awal ditargetkan **Rp644.500.670.876,00** dan perubahan anggaran Pendapatan Asli Daerah sesudah penanganan pandemic Covid-19 senilai **Rp565.008.144.276,00** terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- a) Pendapatan Pajak Daerah senilai **Rp200.000.000.000,00**;
- b) Retribusi Daerah senilai **Rp30.688.002.650,00**;
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai **Rp9.633.523.000,00**;
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah senilai **Rp324.686.618.626,00**.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditargetkan senilai **Rp2.926.004.621.017,00** terdiri dari:

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan senilai **Rp2.088.479.031.592,00** terdiri dari:
 - 1. Dana Bagi Hasil Pajak senilai **Rp83.766.233.867,00**;
 - 2. Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam senilai **Rp58.652.237.967,00**;
 - 3. Dana Alokasi Umum senilai **Rp1.430.715.056.000,00**;
 - 4. Dana Alokasi Khusus senilai **Rp515.345.503.758,00**.
- b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya senilai **Rp504.519.758.000,00**; yang diperoleh dari Dana Desa dari APBN senilai **Rp 452.375.165.000,00**; dan Dana Insentif Daerah (DID) senilai **Rp52.144.593.000,00**.
- c) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi ditargetkan senilai **Rp333.005.831.425,00** terdiri dari:
 - 6. Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor senilai **Rp93.710.050.470,00**;
 - 7. Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor senilai **Rp57.547.787.250,00**;
 - 8. Pendapatan bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai **Rp84.196.324.819,00**;
 - 9. Pendapatan bagi hasil Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan senilai **Rp207.534.450,00**;
 - 10. Pendapatan bagi hasil pajak rokok senilai **Rp97.344.134.436,00**.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan senilai **Rp367.748.850.365,00** terdiri dari:

- a) Pendapatan hibah senilai **Rp234.003.300.000,00**;
- b) Bantuan Keuangan dari Provinsi senilai **Rp133.745.550.365,00**.

Dalam upaya memenuhi target-target pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi pajak dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pajak dan retribusi daerah, mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh pemerintah daerah melalui perbaikan administrasi dan manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, dan mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan daerah, pembaharuan data base dan pemetaan data tentang potensi pendataan daerah sebagai data dasar penghitungan PAD, meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan SKPD penghasil, mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, dan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap menjaga agar tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang memberatkan masyarakat.

Realisasi Pendapatan Daerah selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

4. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD tahun 2020 senilai **Rp616.573.116.956,01** mengalami penurunan senilai **Rp23.268.224.402,18** atau sebesar **3,64%** dari realisasi tahun 2019 senilai **Rp639.841.341.358,19**. Realisasi PAD sebagai berikut:

- a) Pendapatan Pajak Daerah senilai **Rp223.651.925.429,00** atau mengalami kenaikan senilai **Rp10.079.686.813,00** atau sebesar **4,76%** dari realisasi tahun 2019 yang mencapai senilai **Rp213.572.238.616,00**;
- b) Pendapatan Retribusi Daerah senilai **Rp31.122.706.929,00** atau mengalami penurunan senilai **Rp11.718.396.076,00** atau sebesar **27,35%** dari realisasi tahun 2019 yang mencapai senilai **Rp42.841.103.005,00**;
- c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai **Rp9.312.545.336,00** mengalami penurunan senilai **Rp3.678.070.507,00** atau sebesar **28,31%** dari realisasi tahun 2019 yang mencapai senilai **Rp12.990.615.843,00**;
- d) Lain-lain PAD yang Sah senilai **Rp352.485.939.262,01** mengalami penurunan senilai **Rp17.951.444.632,18** atau sebesar **4,85%** dari realisasi tahun 2019 yang mencapai senilai **Rp370.437.383.894,19**.

Covid-19 merupakan pandemi global yang dampaknya menyebar secara cepat ke seluruh daerah di berbagai sektor seperti perdagangan, kesehatan transportasi, pariwisata dan lainnya, termasuk juga sektor perekonomian dan berpengaruh juga terhadap penerimaan daerah.

Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap penurunan pendapatan asli daerah, baik Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah karena menurunnya tingkat produksi dan konsumsi masyarakat, serta pembatasan sosial berskala besar.

Kebijakan yang diambil atas kondisi tersebut, diterbitkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 973/159-Bappenda/2020 tentang Pemberian Insentif/Stimulus berupa Pengurangan Pajak Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Pajak Daerah dalam menangani Dampak dari Corona Virus Disease 2019 (Covid) di Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

5. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2020 senilai **Rp2.809.568.527.462,00** mengalami penurunan senilai **Rp159.928.946.293** atau sebesar **5,39%** dari realisasi tahun 2019 yang mencapai **Rp2.969.497.473.755,00**. Penurunan tersebut diperoleh dari Dana Alokasi Umum sebesar **10,95%**, Dana Alokasi Khusus sebesar **9,29%** dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar **3,89%**, namun terdapat kenaikan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar **37,72%**, Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar **58,01%** dan Dana Penyesuaian sebesar **9,41%**

6. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2020 senilai **Rp344.562.422.183,00** mengalami penurunan senilai **Rp60.568.693.420,00** atau sebesar **14,95%** dari tahun 2019 senilai **Rp405.131.115.603,00**. Penurunan tersebut berasal dari Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar **39,51%** namun terdapat kenaikan pada Bantuan hibah sebesar **5,33%**.

2.2.6 Kebijakan Belanja Daerah dan Transfer

Kebijakan Belanja Daerah dan Transfer diarahkan untuk terpenuhinya Belanja Daerah dan Transfer tahun 2020. Belanja Daerah dan Transfer pada tahun 2020 sebelum perubahan dialokasikan senilai **Rp3.626.276.619.828,00** dan setelah perubahan guna penanganan pandemi Covid-19 menjadi senilai **Rp4.146.596.054.014,06** terdiri dari:

1. Belanja

Belanja dialokasikan sebelum perubahan senilai **Rp2.953.220.443.828,00** dan setelah perubahan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 senilai **Rp3.474.992.362.014,06** dengan rincian sebagai berikut:

a) Belanja Operasi

Tabel 2.2
Belanja Daerah

No	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Beratmbah/ (berkurang)
1	Belanja Pegawai	1.938.308.396.408,00	1.958.308.785.644,00	(55.728.025.924,00)
2	Belanja Barang dan Jasa	723.408.975.726,00	928.917.913.431,00	75.728.415.160,00
3	Belanja Hibah	12.647.240.000,00	47.196.740.000,00	34.349.500.000,00
4	Belanja Bantuan Sosial	1.850.938.000,00	1.850.938.000,00	-
	Jumlah	2.676.215.550.134,00	2.936.274.377.075,00	260.058.826.941,00

b) sebelum perubahan senilai **Rp2.267.004.893.694** dan setelah perubahan senilai **Rp357.509.125.122,00**. Nilai setelah perubahan terdiri atas Belanja Peralatan dan Mesin senilai **Rp152.704.155.008,00**; Belanja Gedung dan Bangunan senilai **Rp123.078.369.496,00**; Belanja Jalan,



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Irigasi dan Jaringan senilai **Rp81.243.896.212,00**; Belanja Aset Tetap Lainnya senilai **Rp482.704.406,00**.

- c) Belanja Tak Terduga sebelum perubahan sebesar **Rp.10.000.000,00** dan setelah perubahan senilai **Rp181.208.859.817,06**.

2. Transfer

Transfer sebelum perubahan dialokasikan senilai **Rp.644.449.045.000** dan setelah perubahan senilai **Rp671.603.692.000,00** untuk kebutuhan:

- a) Transfer dari Bagi Hasil ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa senilai **Rp28.607.131.000,00** terdiri dari Bagi Hasil Pajak senilai **Rp24.232.263.000,00** dan Bagi Hasil Retribusi senilai **Rp4.374.868.000,00**.
- b) Belanja Bantuan Keuangan sebelum perubahan senilai **Rp.644.449.045.000** dan setelah perubahan senilai **Rp642.996.561.000,00**. Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerinthan Desa senilai **Rp641.444.331.000,00** dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai politik senilai **Rp1.552.230.000,00**.

Realisasi Belanja dan Transfer selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. Belanja

Realisasi Belanja tahun 2020 senilai **Rp3.024.639.762.349,00** mengalami penurunan senilai **Rp669.574.737.908,00** atau **10,35%** dari tahun 2019 senilai **Rp3.373.974.352.440,86**. Penurunan Belanja tersebut berasal dari realisasi Belanja Operasi senilai **Rp2.673.701.396.925,00** atau **4,04%**, Belanja Modal senilai **Rp296.952.045.604,00** atau **49,48%** namun terjadi kenaikan belanja tak terduga senilai **Rp 53.986.319.820,00** atau **100,00%**.

2. Transfer

Realisasi Transfer tahun 2020 senilai **Rp669.574.737.908,00** mengalami kenaikan senilai **Rp17.793.154.487,00** atau **2,73%** dari tahun 2019 senilai **Rp651.781.583.421,00** kenaikan realisasi Transfer tersebut diperoleh dari Belanja Bantuan Keuangan senilai **Rp11.359.182.206,00** atau **1,80%** dan Transfer/Bagi Hasil ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa senilai **Rp 26.867.504.952,00** atau **31,49%**.

Berikut adalah program dan kegiatan penanganan Covid di Kabupaten Cirebon:

1. Program Penanganan Kesehatan

Tabel 2.3
Program Penanganan Kesehatan

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah	44.761.247.796	35.677.248.329	79,71
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan RSUD WALED	29.357.900.000	28.213.280.945	96,10
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan RSUD ARJAWINANGUN	14.693.850.000	11.342.838.947	77,19



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aktivitas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1.500.000.000	1.486.500.000	99,10
Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Pengamanan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat)	2.937.240.000	2.158.733.500	73,50
Penanganan Kesehatan (BTT)	37.534.515.000	27.429.646.564	73,08
JUMLAH	130.784.752.796	106.308.248.285	81,28

2. Program Penanganan Dampak Ekonomi

Tabel 2.4
Program Penanganan Dampak Ekonomi

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	2.189.361.812	2.096.010.381	95,74
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	19.777.800	19.452.708	98,36
Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	22.750.000	22.750.000	100,00
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	2.257.391.600	1.925.492.000	85,30
Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil Menengah	82.187.400	81.294.400	98,91
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	718.653.800	612.236.200	85,19
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	149.747.700	138.747.700	92,65
Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	1.188.923.000	1.169.780.600	98,39
Pengembangan lumbung pangan desa	81.990.000	81.610.000	99,54
KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Penyuluhan sumber pangan alternatif	471.496.000	470.949.500	99,88
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	269.690.000	252.305.000	93,55
Pelatihan Budidaya, Pengolahan Hasil dan Pemasaran	447.245.400	444.072.900	99,29
Pengembangan Ternak Ruminansia	8.486.600	3.836.600	45,21
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/ Produk	215.210.200	104.671.114	48,64
Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	26.794.000	22.711.659	84,76
Penanganan Dampak Ekonomi (BTT)	25.023.010.000	-	-
JUMLAH	33.172.715.312	7.445.920.762	22,45

3. Program Penyediaan Social Safety Net/Jaring Pengaman Sosial

Tabel 2.5
Program Penyediaan Social Safety Net/Jaringan Pengaman Sosial

KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Hibah Bantuan Sosial untuk Individu dan atau Keluarga	1.850.938.000		
Belanja Tidak Terduga	62.557.523.159	29.542.820.000	47,23
JUMLAH	64.408.461.159	29.542.820.000	45,87

2.2.7 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) diarahkan sebagaimana tersebut di bawah ini:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- a. Belanja Urusan pemerintahan daerah baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan diarahkan dalam upaya Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah terhadap upaya mendorong pencapaian target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Tahun 2014. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mengacu pada Standar Satuan Harga;
- b. Belanja Urusan pemerintahan daerah baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan diarahkan dan diselaraskan dengan indikasi program dan kegiatan tahunan daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang dalam RTRW;
- c. Belanja Urusan pemerintahan daerah baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan diarahkan dan disinergikan dengan sasaran program dan kegiatan pembangunan tahun 2014 sesuai sasaran standar pelayanan minimum dan tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs);
- d. Belanja Urusan pemerintahan daerah baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan wajib mengakomodasi program dan kegiatan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan melalui pendekatan pola penganggaran PIK (Pagu Indikatif Kewilayahan);
- e. Belanja Urusan pemerintahan daerah baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD, diarahkan sebagaimana poin a,b,c dalam penentuan pagu anggarannya dihitung melalui pendekatan pola PIS (Pagu Indikatif Sektoral).

Kebijakan belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah diarahkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Belanja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (PAP) diarahkan untuk mendukung tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Standar Biaya Belanja Daerah dan dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 12 bulan;
- b. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya, pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- c. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), pemerintah daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- d. Belanja wajib/mengikat yang harus dianggarkan oleh SKPD pada RKA-SKPD agar mencantumkan sumber pendanaan, misalnya:
 - a) Program kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat TA. 2020.
 - b) Program kegiatan yang bersumber dari DAK fisik dan non fisik TA 2020, DBHCHT TA 2020, DBH Pajak Rokok TA 2020, Dana Insentif daerah TA 2020, Dana Desa TA 2020 dan Hibah BOS TA 2020.
 - c) SiLPA program/kegiatan yang bersumber Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun sebelumnya, DAK fisik dan non fisik tahun sebelumnya, DBHCHT tahun sebelumnya, DBH Pajak Rokok tahun sebelumnya, Dana Insentif daerah tahun sebelumnya, Dana Desa tahun sebelumnya dan Hibah BOS tahun sebelumnya.
- e. Dalam hal pemerintah daerah memiliki sisa DAK Fisik pada bidang/subbidang yang output kegiatannya belum tercapai, dan Sisa Bantuan keuangan provinsi jawa barat maka, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk sisa DAK Fisik dan bantuan keuangan provinsi 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat output kegiatannya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
 - b) Untuk sisa DAK Fisik dan bantuan keuangan provinsi lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik dan bantuan keuangan provinsi jawa barat pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
 - c) Dalam hal pemerintah daerah memiliki sisa DAK Fisik dan bantuan keuangan provinsi pada bidang/subbidang yang output kegiatannya



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

telah tercapai, digunakan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana transfer dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 setelah dilaksanakannya audit oleh BPK-RI dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

- f. Program kegiatan yang dibiayai dari Dana DBH-CHT paling sedikit 50% penggunaannya untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Program kegiatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

2.2.8 Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan Pembiayaan diarahkan untuk menghadapi surplus atau defisit anggaran tahun 2020. Pembiayaan tahun 2020 dialokasikan senilai **Rp288.834.438.356,06** sebagai berikut

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan ditargetkan senilai **Rp288.834.438.356,06** sebagai berikut:

- d) Penggunan Silpa senilai **Rp288.834.438.356,06;**
- e) Pencairan Dana Cadangan senilai **Rp0,00;**
- f) Penerimaan Pinjaman Daerah senilai **Rp0,00.**

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan senilai **Rp1.000.000.000,00** sebagai berikut:

- c) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah senilai **Rp1.000.000.000,00;**
- d) Pembayaran Pokok Utang senilai **Rp0,00.**

Realisasi Pembiayaan selama tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2020 senilai **Rp321.620.443.501,73** mengalami penurunan senilai **Rp32.786.005.145,67** atau sebesar **10,19%** dari realisasi tahun 2019 senilai **Rp321.620.443.501,73**. Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2020 sebagai berikut:

- a) Penggunaan SiLPA senilai **Rp300.120.443.501,73** mengalami penurunan senilai **Rp11.286.005.145,67** atau **3,76%** dari realisasi tahun 2019 yang mencapai senilai **Rp300.120.443.501,73**;
- b) Pencairan Dana Cadangan senilai **Rp0,00** atau bersifat konstan
- c) Penerimaan Pinjaman senilai **Rp0,00** atau mengalami penurunan senilai **Rp21.500.000.000,00** atau **100,00%** dari realisasi tahun 2019 yang mencapai senilai **Rp21.500.000.000,00**.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2020 senilai **Rp0,00** mengalami penurunan senilai **Rp21.500.000.000,00** atau sebesar **100,00%** dari realisasi tahun 2019 senilai **Rp21.500.000.000,00**. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2020 sebagai berikut:

- a) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah senilai **Rp0,00** atau bersifat konstan
- b) Pembayaran Pokok Utang senilai **Rp0,00** mengalami penurunan senilai **Rp21.500.000.000,00** atau **100,00%** dari realisasi tahun 2019 yang mencapai senilai **Rp21.500.000.000,00**.

2.6 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.6.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kinerja Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Penetapan Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

2.6.2. Capaian Indikator Kinerja

Kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah, yang akhirnya bermuara terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka kinerja pembangunan daerah dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah, ketercapaian setiap indikator makro tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh *stakeholder* pembangunan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah satuan kerja perangkat daerah yang menurut ketentuan peraturan wajib mencatat dan menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon terdiri dari 73 SKPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta SKPKD.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon adalah basis kas. Untuk penyusunan dan penyajian Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas adalah basis akrual.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas untuk realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Entitas pelaporan yang menyajikan laporan kinerja keuangan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan laporan operasional maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Namun demikian, penyajian laporan realisasi anggaran tetap



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

berdasarkan basis kas. Jika diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan, entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Cirebon mengacu pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan keempat Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

4.4.1 Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah (KASDA) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KASDA maupun Kas yang masih berada pada bendahara setelah periode tahun pelaporan berakhir.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

4.4.2 Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah (KASDA) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KASDA atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

4.4.3 Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan dan selanjutnya akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.4 Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

4.4.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,50%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10,00%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50,00%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100,00%

- Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- Biaya standard apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standard persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya *overhead* tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca.

b. Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Aset Tetap disajikan senilai perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

1) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

2) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

5) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 2. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kapitalisasi aset tetap merupakan pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin berupa Alat-alat Berat yang nilainya lebih dari **Rp2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah), Alat-alat angkutan yang nilainya lebih dari **Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah), Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat-alat Pertanian/Peternakan, Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi, Alat-alat Kedokteran, Alat-alat Laboratorium, Alat Keamanan yang nilainya lebih dari **Rp500.000,00** (lima ratus ribu rupiah);
- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan; jalan, instalasi dan jaringan yang nilainya lebih dari **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah);
- 3) Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya berupa Buku dan Perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga nilainya **Rp1,00** (satu rupiah) sedangkan Hewan/ Ternak dan Tumbuhan yang nilainya lebih dari **Rp1,00** (satu rupiah);
- 4) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	10 s.d. 50 tahun



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

4.4.6 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada saat ini dalam lingkup Pemerintah Daerah hanya berupa kewajiban kepada BUD berupa keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan dan berupa pendapatan yang ditangguhkan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

4.4.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1 Pendapatan

Pendapatan tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp3.858.761.615.658,00** dan terealisasi senilai **Rp3.770.704.066.601,01** atau **97,72%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp243.765.864.115,18** atau **6,07%** dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2019 yang tercapai senilai **Rp4.014.469.930.716,19**. Kebijakan keuangan terkait dengan pendapatan dalam rangka mengantisipasi Pandemi Covid-19 diantaranya dengan menerbitkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 973/159-Bappenda/2020 tentang Pemberian Insentif/Stimulus berupa Pengurangan Pajak Daerah dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi Denda Pajak Daerah dalam menangani Dampak dari Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Cirebon. Realisasi Pendapatan tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Realisasi Pendapatan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pendapatan Asli Daerah	565.008.144.276,00	616.573.116.956,01	109,13	639.841.341.358,19
2	Pendapatan Transfer	2.926.004.621.017,00	2.809.568.527.462,00	96,02	2.969.497.473.755,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	367.748.850.365,00	344.562.422.183,00	93,70	405.131.115.603,00
	JUMLAH	3.858.761.615.658,00	3.770.704.066.601,01	97,72	4.014.469.930.716,19

Rincian realisasi Pendapatan senilai **Rp3.770.704.066.601,01** per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.2
Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Per SKPD

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dinas Kesehatan	112.565.167.300,00	103.083.649.979,00	91,58	125.337.847.697,00
2	RSUD Arjawinangun	101.611.939.000,00	116.061.706.515,01	114,22	111.904.000.821,19
3	RSUD Waled	111.512.774.826,00	121.958.654.262,00	109,37	123.419.132.898,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	360.913.300,00	402.855.922,00	111,62	966.837.360,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran	83.163.000,00	83.815.000,00	100,78	105.985.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	300.000.000,00	668.838.000,00	222,95	375.081.600,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	1.672.590.400,00	2.324.392.500,00	138,97	2.197.326.150,00
8	Dinas Perhubungan	2.300.000.000,00	2.417.052.100,00	105,09	2.644.214.500,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.800.088.450,00	2.401.254.375,00	133,40	1.749.111.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.220.000.000,00	3.763.883.146,00	116,89	4.071.860.039,00
11	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	25.000.000,00	5.800.000,00	23,20	37.550.000,00
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	178.640.000,00	168.324.846,00	94,23	149.178.500,00
13	Dinas Pertanian	417.855.000,00	467.259.100,00	111,82	493.622.900,00
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.705.364.000,00	1.832.199.000,00	107,44	2.369.275.800,00
15	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	3.321.008.120.382,00	3.191.454.089.087,00	96,01	3.425.076.667.085,00
16	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	200.000.000.000,00	223.610.292.769,00	111,81	213.572.238.616,00
	JUMLAH	3.858.761.615.658,00	3.770.704.066.601,01	97,72	4.014.469.930.716,19

5.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp565.008.144.276,00** dan terealisasi senilai **Rp616.573.116.956,01** atau **109,13%** dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp23.268.224.402,18** atau **3,64%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp639.841.341.358,19**. Target Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 diturunkan senilai **Rp79.492.526.600,00** atau **12,33%** dari APBD murni karena adanya kebijakan relaksasi pajak daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

Tabel 5.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Hasil Pajak Daerah	200.000.000.000,00	223.610.292.769,00	111,81	213.572.238.616,00
2	Hasil Retribusi Daerah	30.688.002.650,00	31.122.706.929,00	101,42	42.841.103.005,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.633.523.000,00	9.312.545.336,00	96,67	12.990.615.843,00
4	Lain-lain PAD yang sah	324.686.618.626,00	352.527.571.922,01	108,57	370.437.383.894,19
	JUMLAH	565.008.144.276,00	616.573.116.956,01	109,13	639.841.341.358,19

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

7.1.1.1 Hasil Pajak Daerah

Hasil Pajak Daerah tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp200.000.000.000,00** dan terealisasi senilai **Rp223.610.292.769,00** atau **111,81%**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp10.038.054.153,00** atau **4,70%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp213.572.238.616,00**. Realisasi Hasil Pajak Daerah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.4
Realisasi Hasil Pajak Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pajak Hotel	4.236.505.823,00	5.178.805.227,00	122,24	7.337.719.958,00
2	Pajak Restoran	12.398.705.270,00	14.750.301.576,00	118,97	18.475.733.000,00
3	Pajak Hiburan	593.379.033,00	769.049.251,00	129,61	1.643.946.844,00
4	Pajak Reklame	4.600.000.000,00	4.961.149.418,00	107,85	4.532.777.295,00
5	Pajak Penerangan Jalan	69.299.710.672,00	71.963.426.458,00	103,84	74.039.490.635,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.200.000.000,00	13.920.408.315,00	114,10	11.385.438.581,00
7	Pajak Parkir	538.327.428,00	538.536.901,00	100,04	638.493.718,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	1.081.630.000,00	1.211.111.818,00	111,97	1.162.870.200,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00	61.016.000,00	101,69	61.221.000,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan	43.691.741.774,00	48.247.842.583,00	110,43	47.247.561.827,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	51.300.000.000,00	62.008.645.222,00	120,87	47.046.985.558,00
	JUMLAH	200.000.000.000,00	223.610.292.769,00	111,81	213.572.238.616,00

Realisasi Hasil Pajak Daerah terbesar selama tahun 2020 diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan senilai **Rp71.963.426.458,00** atau **103,84%** dari target yang ditetapkan senilai **Rp69.299.710.672,00**. Alokasi anggaran dan realisasi Hasil Pajak Daerah tersebut seluruhnya direalisasikan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Realisasi Hasil Pajak Daerah meliputi realisasi atas pajak-pajak yang dipungut di wilayah Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai dengan peraturan yang berlaku. Realisasi Hasil Pajak Daerah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel Kabupaten Cirebon tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp4.236.505.823,00** dan terealisasi senilai **Rp5.178.805.227,00** atau **122,24%**. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp2.158.914.731,00** atau **29,42%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp7.337.719.958,00**. Realisasi Pajak Hotel sebagai berikut:

Tabel 5.5
Realisasi Pajak Hotel

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Hotel Bintang Empat	2.825.477.069,00	3.578.596.553,00	126,65	4.744.172.831,00
2	Hotel Bintang Tiga	548.330.636,00	662.213.109,00	120,77	1.124.644.751,00
3	Hotel Bintang Dua	193.568.377,00	209.864.105,00	108,42	333.990.636,00
4	Hotel Bintang Satu	6.000.000,00	7.550.000,00	125,83	-
5	Hotel Melati Tiga	371.635.338,00	389.230.612,00	104,73	675.914.352,00
6	Hotel Melati Dua	16.201.620,00	13.732.330,00	84,76	38.188.227,00
7	Hotel Melati Satu	90.014.250,00	94.570.500,00	105,06	160.854.000,00
8	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggerahan /Hostel/Rumah Kos	185.278.533,00	223.048.018,00	120,39	259.955.161,00
	JUMLAH	4.236.505.823,00	5.178.805.227,00	122,24	7.337.719.958,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp12.398.705.270,00** dan terealisasi senilai **Rp14.750.301.576,00** atau **118,97%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp3.725.431.424,00** atau **20,16%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp18.475.733.000,00**. Realisasi Pajak Restoran sebagai berikut:

Tabel 5.6
Realisasi Pajak Restoran

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Restoran	6.899.372.648,00	8.159.437.840,00	118,26	9.001.788.218,00
2	Rumah Makan	2.459.760.511,00	2.742.162.931,00	111,48	3.769.979.822,00
3	Café	258.073.678,00	436.136.944,00	169,00	613.360.868,00
4	Kantin	89.184.205,00	91.136.806,00	102,19	111.181.974,00
5	Katering	2.287.365.516,00	2.610.545.543,00	114,13	4.127.428.670,00
6	Jasa Boga	404.948.712,00	710.881.512,00	175,55	851.993.448,00
	JUMLAH	12.398.705.270,00	14.750.301.576,00	118,97	18.475.733.000,00

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp593.379.033,00** dan terealisasi **Rp769.049.251,00** atau **129,61%**. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp874.897.593,00** atau **53,22%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp1.643.946.844,00**. Realisasi Pajak Hiburan sebagai berikut:

Tabel 5.7
Realisasi Pajak Hiburan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Tontonan Film/Bioskop	251.331.819,00	251.331.819,00	100,00	550.378.456,00
2	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/ Busana	-	-	-	15.927.000,00
3	Pameran	2.180.412,00	2.180.412,00	100,00	12.577.022,00
4	Karaoke	85.998.962,00	205.558.090,00	239,02	455.925.432,00
5	Sirkus/Akrobat/Sulap	750.000,00	1.600.000,00	213,33	4.250.000,00
6	Permainan Bilyard	1.225.000,00	1.225.000,00	100,00	1.925.000,00
7	Permainan Ketangkasan	204.367.449,00	255.379.769,00	124,96	555.232.833,00
8	Pusat Kebugaran	47.525.391,00	51.774.161,00	108,94	47.731.101,00
	JUMLAH	593.379.033,00	769.049.251,00	129,61	1.643.946.844,00

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp4.600.000.000,00** dan terealisasi senilai **Rp4.961.149.418,00** atau **107,85%**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp428.372.123,00** atau **9,45%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp4.532.777.295,00**. Realisasi Pajak Reklame sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.8
Realisasi Pajak Reklame

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	3.943.740.000,00	4.078.872.454,00	103,43	3.645.319.310,00
2	Reklame Kain	519.900.500,00	683.948.089,00	131,55	703.802.985,00
3	Reklame Berjalan	100.000.000,00	169.567.500,00	169,57	183.655.000,00
4	Reklame Udara	720.000,00	721.875,00	100,26	-
5	Reklame Film/Slide	35.639.500,00	28.039.500,00	78,68	-
	JUMLAH	4.600.000.000,00	4.961.149.418,00	107,85	4.532.777.295,00

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp69.299.710.672,00** dan terealisasi senilai **Rp71.963.426.458,00** atau **103,84%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp2.076.064.177,00** atau **2,80%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp74.039.490.635,00**. Realisasi Pajak Penerangan Jalan sebagai berikut.

Tabel 5.9
Realisasi Pajak Penerangan Jalan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pajak Penerangan Jalan PLN	68.992.210.672,00	71.677.783.401,00	103,89	73.843.621.819,00
2	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	307.500.000,00	285.643.057,00	92,89	195.868.816,00
	JUMLAH	69.299.710.672,00	71.963.426.458,00	103,84	74.039.490.635,00

Penurunan target Pajak Penerangan Jalan PLN hal ini disebabkan antara lain oleh kebijakan Pemerintah yang memberikan stimulus pembebasan pembayaran listrik bagi pelanggan 450VA dan diskon tarif sebesar 50% bagi pelanggan 900VA yang berlaku untuk bulan April sampai dengan Desember 2020. Pembebasan dan diskon tarif listrik yang diberikan merupakan kompensasi dari Pemerintah terhadap kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan Pemerintah untuk mencegah penularan wabah Covid-19 lebih massif.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp12.200.000.000,00** dan terealisasi senilai **Rp13.920.408.315,00** atau **114,10%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp2.534.969.734,00** atau **22,27%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp11.385.438.581,00**. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut:

Tabel 5.10



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Batu Kapur	10.651.820.000,00	11.652.052.875,00	109,39	9.300.258.675,00
2	Andesit (Bahan Bangunan)	26.900.000,00	56.583.000,00	210,35	61.668.000,00
3	Andesit Batu Hias	-	12.367.500,00	-	-
4	Pasir Bahan Bangunan	93.290.000,00	310.900.000,00	333,26	73.194.943,00
5	Tanah Liat Tahan Api	103.400.000,00	91.641.900,00	88,63	278.777.050,00
6	Tanah Urug	1.324.590.000,00	1.796.863.040,00	135,65	1.671.539.913,00
	JUMLAH	12.200.000.000,00	13.920.408.315,00	114,10	11.385.438.581,00

Andesit Batu Hias tidak dianggarkan disebabkan oleh kelangkaan sumberdaya alam berupa andesit batu hias namun tetap terealisasi.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp538.327.428,00** dan terealisasi senilai **Rp538.536.901,00** atau **100,04%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp99.956.817,00** atau **15,66%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp638.493.718,00**. Realisasi Pajak Parkir sebagai berikut:

Tabel 5.11
Realisasi Pajak Parkir

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pajak Parkir	538.327.428,00	538.536.901,00	100,04	638.493.718,00
	JUMLAH	538.327.428,00	538.536.901,00	100,04	638.493.718,00

8. Pajak Air Bawah Tanah

Pajak Air Bawah Tanah tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp1.081.630.000,00** dan terealisasi senilai **Rp1.211.111.818,00** atau **111,97%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp48.241.618,00** atau **4,15%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp1.162.870.200,00**. Realisasi Pajak Air Bawah Tanah sebagai berikut:

Tabel 5.12
Realisasi Pajak Air Bawah Tanah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pajak Air Bawah Tanah	1.081.630.000,00	1.211.111.818,00	111,97	1.162.870.200,00
	JUMLAH	1.081.630.000,00	1.211.111.818,00	111,97	1.162.870.200,00

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp60.000.000,00** dan terealisasi senilai **Rp61.016.000,00** atau **101,69%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

mengalami penurunan senilai **Rp205.000,00** atau **0,33%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp61.221.000,00**. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet sebagai berikut:

Tabel 5.13
Realisasi Pajak Sarang Burung Walet

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00	61.016.000,00	101,69	61.221.000,00
	JUMLAH	60.000.000,00	61.016.000,00	101,69	61.221.000,00

10. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp43.691.741.774,00** dan terealisasi senilai **Rp48.247.842.583,00** atau **110,43%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp1.000.280.756,00** atau **2,12%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp47.247.561.827,00**. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 5.14
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pajak Bumi dan Bangunan	43.691.741.774,00	48.247.842.583,00	110,43	47.247.561.827,00
	JUMLAH	43.691.741.774,00	48.247.842.583,00	110,43	47.247.561.827,00

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp51.300.000.000,00** dan terealisasi senilai **Rp62.008.645.222,00** atau **120,87%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp14.961.659.664,00** atau **31,80%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp47.046.985.558,00**. Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 5.15
Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	51.300.000.000,00	62.008.645.222,00	120,87	47.046.985.558,00
	JUMLAH	51.300.000.000,00	62.008.645.222,00	120,87	47.046.985.558,00

7.1.1.2 Hasil Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp30.688.002.650,00** dan terealisasi senilai **Rp31.122.706.929,00** atau **101,42%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

penurunan senilai **Rp11.718.396.076,00** atau **27,35%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp42.841.103.005,00**. Realisasi Hasil Retribusi Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.16
Realisasi Hasil Retribusi Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Retribusi Jasa Umum	24.536.523.900,00	23.341.932.600,00	95,13	35.162.159.450,00
2	Retribusi Jasa Usaha	831.390.300,00	946.798.808,00	113,88	1.482.890.166,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	5.320.088.450,00	6.833.975.521,00	128,46	6.196.053.389,00
	JUMLAH	30.688.002.650,00	31.122.706.929,00	101,42	42.841.103.005,00

Rincian realisasi Hasil Retribusi Daerah per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.17
Rincian Realisasi Retribusi Daerah Per SKPD

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dinas Kesehatan	18.806.406.500,00	16.733.101.000,00	88,98	27.924.685.500,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	279.895.300,00	357.787.862,00	127,83	801.131.266,00
3	Dinas Pemadam Kebakaran	83.163.000,00	83.815.000,00	100,78	105.985.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	300.000.000,00	668.838.000,00	222,95	375.081.600,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	1.672.590.400,00	2.324.392.500,00	138,97	2.197.326.150,00
6	Dinas Perhubungan	2.300.000.000,00	2.417.052.100,00	105,09	2.644.214.500,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.800.088.450,00	2.401.254.375,00	133,40	1.749.111.750,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.220.000.000,00	3.763.883.146,00	116,89	4.071.860.039,00
9	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	25.000.000,00	5.800.000,00	23,20	37.550.000,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	77.640.000,00	67.324.846,00	86,71	71.258.500,00
11	Dinas Pertanian	417.855.000,00	467.259.100,00	111,82	493.622.900,00
12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.705.364.000,00	1.832.199.000,00	107,44	2.369.275.800,00
	JUMLAH	30.688.002.650,00	31.122.706.929,00	101,42	42.841.103.005,00

Realisasi Hasil Retribusi Daerah terbesar tahun 2020 diperoleh dari Retribusi Jasa Umum senilai **Rp23.341.932.600,00** atau **95,13%** dari target yang ditetapkan senilai **Rp24.536.523.900,00**. Realisasi Hasil Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp24.536.523.900,00** dan terealisasi senilai **Rp23.341.932.600,00** atau **95,13%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp11.820.226.850,00** atau **33,62%** jika



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp35.162.159.450,00**. Realisasi Retribusi Jasa Umum sebagai berikut:

Tabel 5.18
Realisasi Retribusi Jasa Umum

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	18.806.406.500,00	16.733.101.000,00	88,98	27.924.685.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.672.590.400,00	2.324.392.500,00	138,97	2.197.326.150,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	300.000.000,00	331.543.000,00	110,51	270.744.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.639.364.000,00	1.698.006.000,00	103,58	2.311.320.800,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.900.000.000,00	1.963.467.100,00	103,34	2.218.326.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	83.163.000,00	83.815.000,00	100,78	105.985.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	135.000.000,00	207.608.000,00	153,78	133.772.000,00
	JUMLAH	24.536.523.900,00	23.341.932.600,00	95,13	35.162.159.450,00

Realisasi Retribusi Jasa Umum terdapat pada SKPD berikut :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup;
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan;
4. Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Pertanian;
5. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran;
6. Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp831.390.300,00** dan terealisasi senilai **Rp946.798.808,00** atau sebesar **113,88%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp536.091.358,00** atau **36,15%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp1.482.890.166,00**. Realisasi Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut:

Tabel 5.19
Realisasi Retribusi Jasa Usaha

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	279.895.300,00	357.787.862,00	127,83	801.131.266,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	77.640.000,00	67.324.846,00	86,71	71.258.500,00
3	Retribusi Terminal	100.000.000,00	122.042.000,00	122,04	155.144.500,00
4	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)	153.275.000,00	196.941.100,00	128,49	213.623.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	25.000.000,00	5.800.000,00	23,20	37.550.000,00
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	195.580.000,00	196.903.000,00	100,68	204.182.500,00
	JUMLAH	831.390.300,00	946.798.808,00	113,88	1.482.890.166,00

Realisasi Retribusi Jasa Usaha terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Retribusi Tempat Pelelangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan;
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
5. Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Pertanian.

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar **23,20%** disebabkan oleh adanya kebijakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp5.320.088.450,00** dan terealisasi senilai **Rp6.833.975.521,00** atau **128,46%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp637.922.132,00** atau **10,30%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp6.196.053.389,00**. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu sebagai berikut:

Tabel 5.20
Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.209.850.000,00	3.758.953.471,00	117,11	4.068.220.039,00
2	Retribusi Izin Trayek	10.000.000,00	4.680.000,00	46,80	3.640.000,00
3	Retribusi Izin Usaha Perikanan	150.000,00	249.675,00	166,45	-
4	Retribusi Menara Telekomunikasi	1.800.088.450,00	2.401.254.375,00	133,40	1.749.111.750,00
5	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	300.000.000,00	668.838.000,00	222,95	375.081.600,00
	JUMLAH	5.320.088.450,00	6.833.975.521,00	128,46	6.196.053.389,00

Realisasi Retribusi Jasa Perijinan Tertentu terdapat pada SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Retribusi Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Realisasi Retribusi Izin Trayek sebesar **46,80%** disebabkan oleh proyeksi penetapan anggaran tidak menyesuaikan realisasi tahun lalu.

7.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tahun 2020 Yang Dipisahkan dianggarkan senilai **Rp9.633.523.000,00**. Dasar penganggaran pendapatan ini mengacu kepada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum Dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp9.312.545.336,00** atau **96,67%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp3.678.070.507,00** atau **28,31%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp12.990.615.843,00** yang diperoleh dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah PD. Bank Perkreditan Rakyat, Bank Jawa Barat-Banten (BJB). Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tabel 5.21
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Perusahaan Daerah PD. BPR	4.308.533.000,00	4.036.037.351,00	93,68	7.973.387.447,00
2	Bank Jawa Barat-Banten (BJB)	5.324.990.000,00	5.276.507.985,00	99,09	5.017.228.396,00
	JUMLAH	9.633.523.000,00	9.312.545.336,00	96,67	12.990.615.843,00

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan untuk Perusahaan Daerah PD. BPR senilai **Rp4.036.037.351,00** merupakan penyetoran deviden dengan rincian sebagai berikut:

1. PD. BPR Astanajapura senilai **Rp2.374.184.547,00**;
2. PD. BPR Babakan senilai **Rp1.661.852.804,00**.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

7.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp324.686.618.626,00** dan terealisasi senilai **Rp352.527.571.922,01** atau **108,57%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp17.909.811.972,18** atau **4,83%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp370.437.383.894,19**. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.22
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	541.105.000,00	1.988.758.410,00	367,54	833.438.781,00
2	Penerimaan Jasa Giro	4.427.500.000,00	9.437.287.871,00	213,15	8.792.001.720,00
3	Pendapatan Bunga Deposito	8.209.689.000,00	9.905.767.260,00	120,66	21.589.345.005,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	24.225.000,00	-	10.350.000,00
5	Pendapatan dari Pengembalian	-	388.943.979,00	-	333.110.582,00
6	Pendapatan BLUD	213.124.713.826,00	238.020.360.777,01	111,68	235.323.133.719,19
7	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas	93.758.760.800,00	86.326.995.000,00	92,07	97.377.918.425,00
8	Pendapatan Lain-Lain	4.624.850.000,00	6.435.233.625,00	139,14	6.178.085.662,00
	JUMLAH	324.686.618.626,00	352.527.571.922,01	108,57	370.437.383.894,19

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terbesar selama tahun 2020 diperoleh dari Pendapatan BLUD senilai **Rp238.020.360.777,01** atau **111,68%** dari target yang ditetapkan senilai **Rp213.124.713.826,00**. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2020 sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp541.105.000,00** dan terealisasi senilai **Rp1.988.758.410,00** atau **367,54%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp1.155.319.629,00** atau **138,62%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp833.438.781,00**. Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebagai berikut:

Tabel 5.23
Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	115.000.000,00	-	-	419.621.480,00
2	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	57.500.000,00	149.551.350,00	260,09	48.709.900,00
3	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	-	575.185.000,00	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019
			(Rp)	(%)	(Rp)
4	Penjualan Drum Bekas	8.291.000,00	6.108.000,00	73,67	11.636.000,00
5	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	4.759.000,00	14.552.000,00	305,78	7.561.310,00
6	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	67.968.000,00	24.408.060,00	35,91	146.508.784,00
7	Penjualan Hasil Perikanan	101.000.000,00	101.000.000,00	100,00	77.920.000,00
8	Hasil Sewa Tanah dan Bangunan	186.587.000,00	1.117.954.000,00	599,16	121.481.307,00
	JUMLAH	541.105.000,00	1.988.758.410,00	367,54	833.438.781,00

Realisasi Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan sebesar **35,91%** disebabkan oleh anggaran pembangunan fisik ditahun 2020 menurun dengan angka signifikan dikarenakan adanya kebijakan refocusing untuk penanganan Covid-19.

2. Penerimaan Hasil Jasa Giro

Penerimaan Hasil Jasa Giro tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp4.427.500.000,00** dan terealisasi senilai **Rp9.437.287.871,00** atau **213,15%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp645.286.151,00** atau **7,34%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp8.792.001.720,00** Realisasi Penerimaan Hasil Jasa Giro sebagai berikut:

Tabel 5.24
Realisasi Penerimaan Jasa Giro

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019
			(Rp)	(%)	(Rp)
1	Jasa Giro Kas Daerah	4.312.500.000,00	8.045.217.486,00	186,56	7.624.245.735,00
2	Jasa Giro Pemegang Kas	115.000.000,00	1.392.070.385,00	1.210,50	1.167.755.985,00
	JUMLAH	4.427.500.000,00	9.437.287.871,00	213,15	8.792.001.720,00

Realisasi Jasa Giro Pemegang Kas senilai **Rp1.392.070.385,00** terdiri dari jasa giro pemegang kas pada Bendahara Pengeluaran SKPD dan jasa bunga pada Bendahara JKN FKTP dan Bendahara Dana BOS. Rincian Jasa Giro Pemegang Kas terdapat dalam Lampiran 5.1.

3. Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan Bunga Deposito tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp8.209.689.000,00** dan terealisasi senilai **Rp9.905.767.260,00** atau senilai **120,66%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp11.683.577.745,00** atau **54,12 %** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp21.589.345.005,00**. Realisasi Pendapatan Bunga Deposito sebagai berikut:

Tabel 5.25
Realisasi Pendapatan Bunga Deposito



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2020 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Rekening Deposito pada Bank Pemerintah	8.209.689.000,00	9.905.767.260,00	120,66	21.589.345.005,00
	JUMLAH	8.209.689.000,00	9.905.767.260,00	120,66	21.589.345.005,00

Rincian realisasi rekening Bunga Deposito pada Bank Pemerintah dan BPR sebagai berikut :

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai **Rp4.614.383.737,00**;
2. Bank Jawa Barat-Banten (BJB) senilai **Rp5.291.383.523,00**;

4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp0,00** dan terealisasi senilai **Rp24.225.000,00** atau **0,00%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp13.875.000,00** atau **134,06%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp10.350.000,00**. Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.26
Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Kerugian Barang	-	24.225.000,00	-	10.350.000,00
	JUMLAH	-	24.225.000,00	-	10.350.000,00

Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tidak dianggarkan tetapi terealisasi dikarenakan pada tahun 2020 terdapat penggantian kerugian daerah atas kehilangan barang berupa kendaraan bermotor yang dibayarkan pada tahun yang sama dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Rincian pembayaran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.27
Rincian Pembayaran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

NO	STS	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	00113/KB/2020	300.000,00	Pengembalian biaya own risk (OR) bulan Dua Puluh Dua an. H.Juju Hermanto,SKM.,M.Si. sesuai SKTJM No.931/SKTJM 324.1-BKAD/2018 (KEC.BABAKAN Tgl 15/01/2020)
2	00273/KB/2020	300.000,00	Pengembalian biaya own risk (OR) bulan Dua Puluh Tiga an. H.Juju Hermanto,SKM.,M.Si. sesuai SKTJM No.931/SKTJM 324.1-BKAD/2018 (KEC.BABAKAN Tgl 06/02/2020)
3	00451/KB/2020	300.000,00	Pengembalian biaya own risk (OR) bulan Dua Puluh empat an. H.Juju Hermanto,SKM.,M.Si. sesuai SKTJM No.931/SKTJM 324.1-BKAD/2018 (KEC.BABAKAN Tgl 05/03/2020)
4	00679/KB/2020	500.000,00	Pengembalian ganti rugi (TGR) a.n. Hj.Lilis Herawati,S.Pd. Kepala SDN 3 Beber, cicilan 3 (Tgl 06/04/2020)



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	STS	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
5	01370/KB/2020	537.500,00	Hilangnya 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk/type honda vario pembuatan Th 2016 nopol E 6241 K (Tgl 21/07/2020)
6	01411/KB/2020	17.300.000,00	Kehilangan 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 2 (dua) merk/type Kawasaki/L 150 G Nopol E 4840 K Th pembuatan 2015 warna hijau a.n. ade prahyanto,SE (Bappenda) (Tgl 29/07/2020)
7	01577/KB/2020	537.500,00	Hilangnya 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) merk/type honda vario pembuatan Th 2016 nopol E 6241 K (Tgl 24/08/2020)
8	02105/KB/2020	500.000,00	Pengembalian ganti rugi (TGR) a.n. Hj.Lilis Herawati,S.Pd. Kepala SDN 3 Beber (Tgl 05/11/2020)
9	02129/KB/2020	450.000,00	Kehilangan 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 2 (dua) merk/type Yamaha Byson Nopol E 4228 K Th pembuatan 2014 warna abu-abu a.n. Tina Octaviana dewi, STP (Distan) (Tgl 10/11/2020)
10	006/LAIN/2020	3.500.000	reklas pembayaran TGR an. Masna
	JUMLAH	24.225.000,00	

5. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp0,00** dan terealisasi senilai **Rp388.943.979,00** atau **0,00%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp55.833.397,00** atau **16,76%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp333.110.582,00**. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebagai berikut:

Tabel 5.28
Realisasi Pendapatan dari Pengembalian

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	388.943.979,00	-	333.110.582,00
	JUMLAH	-	388.943.979,00	-	333.110.582,00

Realisasi tersebut merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan. Terjadinya kelebihan pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan diketahui pada saat rekonsiliasi antara data belanja pegawai dengan Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) pada Bendahara SKPD. Perbedaan antara data belanja pegawai dengan SKUMPTK dikarenakan SKPD belum melaporkan perubahan atau mutasi tunjangan keluarga sehingga tetap membayarkan gaji dan tunjangan pegawai yang bersangkutan. Serta adanya PNS yang meninggal namun gaji dan tunjangannya terlanjur masuk dalam daftar gaji dan ada pula keterlambatan penerbitan SK Pensiun bagi pegawai yang mengajukan pensiun sebelum waktunya.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

6. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD Tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp213.124.713.826,00** terealisasi senilai **Rp238.020.360.777,01** atau **111,68%** yang merupakan Pendapatan BLUD dari retribusi pelayanan kesehatan. Realisasi tersebut merupakan realisasi Pendapatan BLUD dari Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun senilai **Rp116.061.706.515,01** dan Rumah Sakit Umum Daerah Waled senilai **Rp121.958.654.262,00**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp2.697.227.057,82** atau **1,15%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp235.323.133.719,19**. Realisasi Pendapatan BLUD sebagai berikut:

Tabel 5.29
Realisasi Pendapatan BLUD

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pendapatan BLUD	213.124.713.826,00	238.020.360.777,01	111,68	235.323.133.719,19
	JUMLAH	213.124.713.826,00	238.020.360.777,01	111,68	235.323.133.719,19

7. Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Dana Kapitasi JKN pada FKTP tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp93.758.760.800,00** dan terealisasi senilai **Rp86.326.995.000,00** atau **92,07%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp11.050.923.425,00** atau **11,35%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp97.377.918.425,00**.

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan dimuka kepada FKTP oleh BPJS berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Pembayaran pendapatan dana kapitasi berdasarkan Surat Keputusan Dana Kapitasi yang dikirimkan oleh BPJS ke Dinas Kesehatan setiap bulan. Realisasi Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagai berikut:

Tabel 5.30
Realisasi Dana Kapitasi JKN pada FKTP

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	93.758.760.800,00	86.326.995.000,00	92,07	97.377.918.425,00
	JUMLAH	93.758.760.800,00	86.326.995.000,00	92,07	97.377.918.425,00

Realisasi Dana Kapitasi JKN pada FKTP per Puskesmas terdapat dalam Lampiran 5.2.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp4.624.850.000,00** dan terealisasi senilai **Rp6.435.233.625,00** atau **139,14%** yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp257.147.963,00** atau **4,16%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp6.178.085.662,00**. Realisasi Pendapatan Lain-lain sebagai berikut:

Tabel 5.31
Realisasi Pendapatan Lain-Lain

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pendapatan Lain-Lain	4.624.850.000,00	1.052.162.638,00	22,75	1.420.292.122,00
2	Pendapatan Denda Keterlambatan Pengurusan Administrasi Kependudukan	-	545.880.000,00	-	844.575.000,00
3	Pendapatan Pengembalian Kerugian Daerah Atas Pemeriksaan	-	4.795.558.327,00	-	3.861.827.650,00
4	Pendapatan Jasa Bunga Selain Pemegang Kas	-	41.632.660,00	-	51.390.890,00
	JUMLAH	4.624.850.000,00	6.435.233.625,00	139,14	6.178.085.662,00

Rincian realisasi Pendapatan Lain-lain sebagai berikut:

- Pengembalian kelebihan penyaluran bantuan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah senilai **Rp18.000.000,00**;
- Pendapatan Lainnya senilai **Rp507.874.314,00**;
- Kelebihan entri oleh Bank/SKPD senilai **Rp171.212,00**;
- Pengembalian kelebihan pekerjaan senilai **Rp3.600.000,00**;
- Pengembalian bantuan sosial senilai **Rp1.200.000,00**;
- Denda atas keterlambatan pekerjaan senilai **Rp16.295.533,00**;
- Sanksi administratif/Denda atas pelanggaran protokol senilai **Rp7.103.000,00**;
- Set Pot Kasda Dapem dan NonDapem senilai **Rp94.634.540,00**;
- Pembayaran denda administrasi PPAT senilai **Rp42.250.000,00**;
- Pendapatan Denda PBB dll (Bappenda) senilai **Rp361.034.039,00**.

5.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp2.926.004.621.017,00**. Dan terealisasi senilai **Rp2.809.568.527.462,00** atau **96,02%** dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah dari Pendapatan Transfer ini besarnya sangat tergantung kondisi keuangan Pemerintah Pusat. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp159.928.946.293,00** atau **5,39%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp2.969.497.473.755,00** merupakan transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi. Realisasi Pendapatan Transfer sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.32
Realisasi Pendapatan Transfer

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	2.088.479.031.592,00	2.021.914.842.243,00	96,81	2.213.789.276.963,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	504.519.758.000,00	504.519.758.000,00	100,00	461.115.736.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	333.005.831.425,00	283.133.927.219,00	85,02	294.592.460.792,00
	JUMLAH	2.926.004.621.017,00	2.809.568.527.462,00	96,02	2.969.497.473.755,00

Realisasi Pendapatan Transfer terbesar selama tahun 2020 diperoleh dari Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan senilai **Rp2.021.914.842.243,00** atau **96,81%** dari target yang ditetapkan senilai **Rp2.088.479.031.592,00**. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2020 sebagai berikut:

5.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan

Transfer pemerintah Pusat–Dana Perimbangan tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp2.088.479.031.592,00** dan terealisasi senilai **Rp2.021.914.842.243,00** atau **96,81 %** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp191.874.434.720,00** atau **8,67%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp2.213.789.276.963,00**. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan sebagai berikut:

Tabel 5.33
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Bagi Hasil Pajak	83.766.233.867,00	69.558.515.675,00	83,04	50.507.005.280,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	58.652.237.967,00	38.477.796.167,00	65,60	24.351.064.800,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.430.715.056.000,00	1.417.094.602.000,00	99,05	1.591.291.632.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	515.345.503.758,00	496.783.928.401,00	96,40	547.639.574.883,00
	JUMLAH	2.088.479.031.592,00	2.021.914.842.243,00	96,81	2.213.789.276.963,00

5.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp83.766.233.867,00** dan terealisasi senilai **Rp69.558.515.675,00** atau **83,04%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp19.051.510.395,00** atau **37,72%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp50.507.005.280,00**. Realisasi Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.34
Realisasi Bagi Hasil Pajak

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	19.272.002.127,00	12.268.000.355,00	63,66	17.979.187.656,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	58.903.314.974,00	52.269.782.864,00	88,74	28.520.689.598,00
3	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	5.590.916.766,00	5.020.732.456,00	89,90	4.007.128.026,00
	JUMLAH	83.766.233.867,00	69.558.515.675,00	83,04	50.507.005.280,00

5.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp58.652.237.967,00** dan terealisasi senilai **Rp38.477.796.167,00** atau **65,60%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp14.126.731.367,00** atau **58,01%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp24.351.064.800,00**. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebagai berikut:

Tabel 5.35
Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	161.348.065,00	73.592.561,00	45,61	56.122.200,00
2	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.651.338.439,00	788.276.289,00	47,74	590.155.800,00
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	5.334.226.544,00	5.198.363.984,00	97,45	4.797.020.800,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	4.805.793.156,00	4.779.508.956,00	99,45	6.116.790.610,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Mineral dan Batu Bara	585.844.017,00	421.259.298,00	71,91	481.470.892,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	46.113.687.746,00	27.216.795.079,00	59,02	12.309.504.498,00
	JUMLAH	58.652.237.967,00	38.477.796.167,00	65,60	24.351.064.800,00

5.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp1.430.715.056.000,00** berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan terealisasi senilai **Rp1.417.094.602.000,00** atau **99,05%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp174.197.030.000,00** atau **10,95%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rp1.591.291.632.000,00. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai berikut:

Tabel 5.36
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.430.715.056.000,00	1.417.094.602.000,00	99,05	1.591.291.632.000,00
	JUMLAH	1.430.715.056.000,00	1.417.094.602.000,00	99,05	1.591.291.632.000,00

5.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp515.345.503.758,00** berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan terealisasi senilai **Rp496.783.928.401,00** atau **96,40%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp50.855.646.482,00** atau **9,29%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp547.639.574.883,00**. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut:

Tabel 5.37
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dana Alokasi Khusus	94.368.671.172,00	89.126.475.112,00	94,44	129.956.111.056,00
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	420.976.832.586,00	407.657.453.289,00	96,84	417.683.463.827,00
	JUMLAH	515.345.503.758,00	496.783.928.401,00	96,40	547.639.574.883,00

Realisasi Dana Transfer DAK Fisik ke Kas Umum Daerah tersalurkan senilai **Rp89.126.475.112,00** atau **94,44%** dari pagu anggaran yang ditetapkan senilai **Rp94.368.671.172,00**.

Realisasi Dana Transfer DAK Non Fisik ke Kas Umum Daerah tersalurkan senilai **Rp407.657.453.289,00** atau **96,84%** dari pagu anggaran yang ditetapkan senilai **Rp420.976.832.586,00**. Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidang sebagai berikut:

Tabel 5.38
Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Per Bidang

NO	SKPD	BIDANG	REALISASI PEMBAYARAN DARI KAS NEGARA (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
A	Dinas Pendidikan	BOP PAUD	21.123.300.000,00
		Tunjangan Profesi Guru	311.088.923.000,00
		Tambahan Penghasilan Guru	417.250.000,00
		Tunjangan Khusus Guru	889.501.000,00
		BOP Pendidikan Kesetaraan	6.858.532.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	SKPD	BIDANG	REALISASI PEMBAYARAN DARI KAS NEGARA (Rp)
B	Dinas Kesehatan	BOK	55.649.778.375,00
C	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	BOKB	7.222.836.000,00
D	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.468.870.614,00
E	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	BOP Museum	521.103.700,00
F	Dinas Koperasi	Peningkatan Kapasitas Koperasi, usaha kecil dan menengah	417.358.000,00
	JUMLAH		407.657.453.289,00
2	Dana Alokasi Khusus Fisik		
	DAK Fisik Reguler		
A	Dinas Pendidikan	PAUD	961.500.000,00
		SD	21.177.156.300,00
		SMP	8.093.679.800,00
		SKB	591.885.700,00
B	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar	7.032.090.459,00
		Pelayanan Kefarmasian	3.630.797.604,00
C	RSUD Arjawinangun dan RSUD Waled	Pelayanan Rujukan	15.147.095.511,00
D	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Keluarga Berencana	999.694.900,00
E	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sanitasi	1.576.200.000,00
	JUMLAH		59.210.100.274,00
3	DAK Fisik Penugasan		
A	Dinas Kesehatan	Penguatan Intervensi Stunting	2.830.738.260,00
		Pengendalian Penyakit	8.300.096.462,00
B	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sanitasi	2.946.250.000,00
		Infrastruktur Air Minum	3.345.413.389,00
E	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Cadangan	10.018.211.527,00
F	Dinas Pertanian	Pertanian cadangan	1.952.600.000,00
G	Dinas Kelautan & Perikanan	Kelautan dan Perikanan cadangan	523.065.200,00
	JUMLAH		29.916.374.838,00
	JUMLAH KESELURUHAN		496.783.928.401,00

5.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp504.519.758.000,00** dan terealisasi senilai **Rp504.519.758.000,00** atau **100,00%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp43.404.022.000,00** atau **9,41%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp461.115.736.000,00**. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.39
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	504.519.758.000,00	504.519.758.000,00	100,00	461.115.736.000,00
	JUMLAH	504.519.758.000,00	504.519.758.000,00	100,00	461.115.736.000,00

Rincian Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebagai berikut:

Tabel 5.40
Rincian Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dana Desa dari APBN	452.375.165.000,00	452.375.165.000,00	100,00	436.288.708.000,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	52.144.593.000,00	52.144.593.000,00	100,00	24.827.028.000,00
	JUMLAH	504.519.758.000,00	504.519.758.000,00	100,00	461.115.736.000,00

Dana Desa dari APBN mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Pemerintah Daerah mencatat pendapatan dana desa untuk selanjutnya melakukan pemotongan dan penyaluran oleh kepala KPPN Cirebon sebagai KPA penyaluran DAK fisik dan dana desa. Tahun 2020 Dana Desa dari APBN dianggarkan senilai **Rp452.375.165.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp452.375.165.000,00** atau **100,00%** dari anggaran yang ditetapkan.

Sedangkan Dana Insentif Daerah (DID) mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dana Insentif Daerah (DID) dianggarkan senilai **Rp52.144.593.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp52.144.593.000,00** atau **100,00%** dari anggaran yang ditetapkan.

5.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp333.005.831.425,00** sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan terealisasi senilai **Rp283.133.927.219,00** atau **85,02%**. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp11.458.533.573,00** atau **3,89%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp294.592.460.792,00**. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi sebagai berikut:

Tabel 5.41
Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	333.005.831.425,00	283.133.927.219,00	85,02	294.592.460.792,00
	JUMLAH	333.005.831.425,00	283.133.927.219,00	85,02	294.592.460.792,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berupa Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Bagi Hasil dari Pajak Rokok. Rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdapat dalam Lampiran 5.3.

5.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp367.748.850.365,00** dan terealisasi senilai **Rp344.562.422.183,00** atau **93,70%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp60.568.693.420,00** atau **14,95%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp405.131.115.603,00**. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.42
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pendapatan Hibah	234.003.300.000,00	233.724.450.000,00	99,88	221.895.600.000,00
2	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	133.745.550.365,00	110.837.972.183,00	82,87	183.235.515.603,00
	JUMLAH	367.748.850.365,00	344.562.422.183,00	93,70	405.131.115.603,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terbesar selama tahun 2020 diperoleh dari Pendapatan Hibah senilai **Rp233.724.450.000,00** atau **99,88%** dari target yang ditetapkan senilai **Rp234.003.300.000,00**.

5.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp234.003.300.000,00** dan terealisasi senilai **Rp233.724.450.000,00** atau **99,88%**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp11.828.850.000,00** atau **5,33%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp221.895.600.000,00**. Pendapatan Hibah merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS sebagai berikut:

Tabel 5.43
Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Dasar	171.210.900.000,00	170.946.570.000,00	99,85	161.157.600.000,00
2	Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Menengah Pertama	62.792.400.000,00	62.777.880.000,00	99,98	60.738.000.000,00
	JUMLAH	234.003.300.000,00	233.724.450.000,00	99,88	221.895.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

5.1.3.2 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp133.745.550.365,00** dan terealisasi senilai **Rp110.837.972.183,00** atau **82,87%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp72.397.543.420,00** atau **39,51%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp183.235.515.603,00**. Realisasi Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.44
Realisasi Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	133.745.550.365,00	110.837.972.183,00	82,87	183.235.515.603,00
	JUMLAH	133.745.550.365,00	110.837.972.183,00	82,87	183.235.515.603,00

5.2 Belanja

Belanja tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp4.146.596.054.014,06** dan terealisasi senilai **Rp3.694.214.500.257,00** atau mencapai **89,09%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp331.541.435.604,86** atau **8,24%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp4.025.755.935.861,86**. Realisasi Belanja sebagai berikut:

Tabel 5.45
Realisasi Belanja

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Operasi	2.936.274.377.075,00	2.673.701.396.925,00	91,06	2.786.140.573.287,86
2	Belanja Modal	357.509.125.122,00	296.952.045.604,00	83,06	587.833.779.153,00
3	Belanja Tidak Terduga	181.208.859.817,06	53.986.319.820,00	29,79	-
4	Belanja Transfer	671.603.692.000,00	669.574.737.908,00	99,70	651.781.583.421,00
	JUMLAH	4.146.596.054.014,06	3.694.214.500.257,00	89,09	4.025.755.935.861,86

Realisasi Belanja per SKPD terdapat dalam Lampiran 5.4.

5.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp2.936.274.377.075,00** dan terealisasi senilai **Rp2.673.701.396.925,00** atau **91,06%**. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp112.439.176.362,86** atau **4,04%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp2.786.140.573.287,86**. Realisasi Belanja Operasi sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.46
Realisasi Belanja Operasi

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Pegawai	1.958.308.785.644,00	1.779.497.848.207,00	90,87	1.776.844.553.989,00
2	Belanja Barang dan Jasa	928.917.913.431,00	847.795.538.818,00	91,27	976.683.376.555,86
3	Belanja Hibah	47.196.740.000,00	45.483.165.900,00	96,37	31.223.382.600,00
4	Belanja Bantuan Sosial	1.850.938.000,00	924.844.000,00	49,97	1.389.260.143,00
	JUMLAH	2.936.274.377.075,00	2.673.701.396.925,00	91,06	2.786.140.573.287,86

5.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp1.958.308.785.644,00** dan terealisasi senilai **Rp1.779.497.848.207,00** atau **90,87%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp2.653.294.218,00** atau **0,15%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp1.776.844.553.989,00**.

Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung merupakan realisasi yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu berupa Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan.

Belanja Pegawai Langsung merupakan Belanja Pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya dalam bentuk Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim, Honorarium Tenaga Ahli, dan Uang Lembur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47
Realisasi Belanja Pegawai

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
A	Belanja Pegawai – Belanja Tidak Langsung				
1	Gaji dan Tunjangan	1.329.883.214.074,00	1.209.114.679.458,00	90,92	1.255.746.165.137,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	331.320.259.000,00	295.013.329.500,00	89,04	243.565.602.550,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.841.000.000,00	9.586.500.000,00	97,41	9.511.200.000,00
4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	10.000.000.000,00	9.993.123.881,00	99,93	9.605.371.766,00
5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	1.052.786.010,00	769.696.215,00	73,11	1.151.723.399,00
	JUMLAH A	1.682.097.259.084,00	1.524.477.329.054,00	90,63	1.519.580.062.852,00
B	Belanja Pegawai – Belanja Langsung				
1	Honorarium PNS	16.115.338.000,00	10.595.801.000,00	65,75	15.015.774.500,00
2	Honorarium Non PNS	80.188.421.000,00	73.513.535.349,00	91,68	82.648.147.091,00
3	Uang Lembur	4.919.353.000,00	4.422.901.800,00	89,91	5.336.148.100,00
4	Belanja Pegawai BLUD	111.945.445.000,00	104.334.857.654,00	93,20	108.507.084.625,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
5	Belanja Pegawai Dana BOS	63.042.969.560,00	62.153.423.350,00	98,59	45.757.336.821,00
	JUMLAH B	276.211.526.560,00	255.020.519.153,00	92,33	257.264.491.137,00
	JUMLAH A + B	1.958.308.785.644,00	1.779.497.848.207,00	90,87	1.776.844.553.989,00

Dari Jumlah Belanja langsung Pegawai senilai **Rp1.779.497.848.207,00**, alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 senilai **Rp5.946.100.000,00** dan realisasi senilai **Rp2.894.319.000,00** atau **48,68%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja langsung pegawai tersebut untuk kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5.48
Realisasi Belanja Pegawai untuk penanganan Covid-19

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SKPD
1	Peningkatan Surveillance Epidemologi dan Penanggulangan Wabah	710.650.000,00	585.669.000,00	Dinas Kesehatan
2	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	1.727.400.000,00	1.234.350.000,00	RSUD Waled
3	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	3.069.000.000,00	635.250.000,00	RSUD Arjawinangun
4	Aktivisasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	439.050.000,00	439.050.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	JUMLAH	5.946.100.000,00	2.894.319.000,00	

Dan belanja langsung pegawai tersebut juga dialokasikan untuk penganggaran dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 senilai **Rp1.197.620.000,00** dan realisasi senilai **Rp1.152.346.000,00** atau **96,22%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja langsung pegawai tersebut untuk kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5.49
Realisasi Belanja Pegawai untuk dampak ekonomi Covid 19

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SKPD
1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	663.460.000,00	654.936.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	18.600.000,00	18.600.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah	75.060.000,00	51.760.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4	Fasilitas Permasalahan Proses Produksi UKM	5.000.000,00	5.000.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	127.050.000,00	121.050.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6	Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD	33.400.000,00	33.400.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	40.350.000,00	40.350.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
8	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	19.800.000,00	19.800.000,00	Dinas Ketahanan Pangan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SKPD
9	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	99.500.000,00	99.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
10	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	8.750.000,00	7.750.000,00	Dinas Pertanian
11	Pelatihan Budidaya, Pengolahan Hasil dan Pemasaran	63.000.000,00	63.000.000,00	Dinas Pertanian
12	Pengembangan Ternak Ruminansia	4.650.000,00	-	Dinas Pertanian
13	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	20.400.000,00	18.600.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
14	Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	18.600.000,00	18.600.000,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	JUMLAH	1.197.620.000,00	1.152.346.000,00	

5.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp928.917.913.431,00** dan terealisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon senilai **Rp847.795.538.818,00** atau **91,27%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp128.887.837.737,86** atau **13,20%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp976.683.376.555,86**. Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 5.50
Realisasi Belanja Barang dan Jasa

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	32.807.149.088,00	28.521.007.983,00	86,94	34.208.978.417,00
2	Belanja Bahan/Material	74.479.861.022,00	60.552.135.505,00	81,30	37.224.199.948,00
3	Belanja Jasa Kantor	267.934.524.843,00	241.254.509.669,00	90,04	283.651.109.314,00
4	Belanja Premi Asuransi	4.370.543.921,00	2.850.798.999,00	65,23	1.380.774.465,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.071.991.272,00	15.053.755.144,00	88,18	16.396.466.410,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000.716.175,00	18.870.130.436,00	85,77	28.562.034.620,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.117.415.000,00	7.037.152.580,00	86,69	20.571.867.783,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	625.700.000,00	532.920.000,00	85,17	2.318.199.000,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	357.636.350,00	272.636.350,00	76,23	196.022.700,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.714.102.300,00	3.187.774.000,00	85,83	4.479.582.100,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	38.253.805.300,00	31.575.637.672,00	82,54	53.877.573.522,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	622.297.500,00	581.929.200,00	93,51	2.466.566.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
13	Belanja Pakaian Kerja	1.457.421.000,00	1.371.154.780,00	94,08	2.377.500.700,00
14	Belanja Pakaian khusus dan Hari-hari tertentu	6.331.619.600,00	4.662.525.232,00	73,64	3.484.730.900,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	46.165.079.455,00	39.232.523.437,00	84,98	56.097.120.193,00
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	456.500.000,00
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.780.714.390,00	2.708.934.372,00	71,65	5.149.672.000,00
18	Belanja Pemeliharaan	57.533.634.213,00	50.564.202.237,00	87,89	59.101.795.655,00
19	Belanja Jasa Konsultasi	18.206.163.082,00	16.852.754.637,00	92,57	20.165.622.400,00
20	Belanja Stimulan dan Hadiah	-	-	-	316.992.000,00
21	Belanja Jasa Travel/Event Organizer	1.456.101.600,00	1.030.536.600,00	70,77	6.017.766.479,00
22	Belanja Barang Untuk Diserahkan	672.000.000,00	590.993.700,00	87,95	64.500.000,00
23	Belanja Hibah Barang/Jasa yang diserahkan	26.734.680.000,00	25.724.864.589,00	96,22	41.856.136.929,00
24	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	868.084.900,00	864.222.000,00	99,56	11.090.664.000,00
25	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17.883.171.598,00	14.549.590.400,00	81,36	26.418.568.000,00
26	Belanja Barang dan Jasa BLUD	114.573.685.084,00	116.574.755.364,00	101,75	119.946.843.129,86
27	Belanja Hadiah Lomba dan/atau Penghargaan	1.257.043.400,00	1.201.065.500,00	95,55	4.864.006.800,00
28	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	161.642.772.338,00	161.577.028.432,00	99,90	133.941.582.341,00
	JUMLAH	928.917.913.431,00	847.795.538.818,00	91,26	976.683.376.555,86

Dari Jumlah Belanja Barang dan Jasa senilai **Rp847.795.538.818,00**, alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 senilai **Rp56.777.663.281,00** dan realisasi senilai **Rp44.821.947.110,00** atau **78,94%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja langsung barang dan jasa tersebut untuk kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5.51
Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk penanganan Covid 19

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SKPD
1	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	36.212.891.796,00	28.166.226.728,00	Dinas Kesehatan
2	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	10.147.210.392,00	9.617.922.007,00	RSUD Waled



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SKPD
3	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	9.434.111.093,00	6.067.848.375,00	RSUD Arjawinangun
4	Aktivitasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	983.450.000,00	969.950.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	JUMLAH	56.777.663.281,00	44.821.947.110,00	

Dan belanja Barang dan Jasa tersebut juga dialokasikan untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 senilai **Rp6.325.981.512,00** dan realisasi senilai **Rp6.259.074.762,00** atau **98,94%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja Barang dan Jasa tersebut untuk kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5.52
Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk dampak ekonomi Covid 19

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SKPD
1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	1.525.901.812,00	1.441.074.381,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	1.177.800,00	852.708,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	22.750.000,00	22.750.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	2.182.331.600,00	1.873.732.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	Fasilitas Permasalahan Proses Produksi UMK	77.187.400,00	76.294.400,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6	Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan	591.603.800,00	491.186.200,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7	Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD	116.347.700,00	105.347.700,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	1.148.573.000,00	1.129.430.600,00	Dinas Ketahanan Pangan
9	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	57.690.000,00	57.310.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
10	Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif	371.996.000,00	371.449.500,00	Dinas Ketahanan Pangan
11	Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Penerapan Teknologi Pertanian	230.940.000,00	214.555.000,00	Dinas Pertanian
12	Pelatihan Budidaya, Pengolahan Hasil dan Pemasaran	384.245.400,00	381.072.900,00	Dinas Pertanian
13	Pengembangan Ternak Ruminansia	3.836.600,00	3.836.600,00	Dinas Pertanian
14	Pengembangan Pasar dan Distribusi	194.810.200,00	86.071.114,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
15	Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	8.194.000,00	4.111.659,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	JUMLAH	6.325.981.512,00	6.259.074.762,00	

5.2.1.2.1 Belanja Bahan Habis Pakai

Belanja Bahan Habis Pakai tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp32.807.149.088,00** dan terealisasi senilai **Rp28.521.007.983,00** atau **86,94%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rp5.687.970.434,00 atau **16,63%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp34.208.978.417,00**. Realisasi Belanja Bahan Habis Pakai sebagai berikut:

Tabel 5.53
Realisasi Belanja Bahan Habis Pakai

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	14.525.394.898,00	12.743.797.887,00	87,73	13.344.576.020,00
2	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	10.200.000,00	6.700.000,00	65,69	88.300.000,00
3	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.116.821.975,00	1.787.088.096,00	84,42	2.054.245.775,00
4	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	465.288.500,00	398.504.500,00	85,65	461.681.500,00
5	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.464.140.272,00	2.951.853.360,00	85,21	1.963.469.445,00
6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.498.061.900,00	4.907.603.075,00	89,26	5.783.509.519,00
7	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	129.878.680,00	83.412.050,00	64,22	209.231.000,00
8	Belanja Pengisian Tabung Gas	143.809.040,00	114.599.100,00	79,69	132.207.700,00
9	Belanja Atribut Penghargaan/Piagam/Piala/Cenderamata	570.293.700,00	542.951.700,00	95,21	959.332.800,00
10	Belanja Kit Pelatihan	3.281.375.000,00	3.082.219.700,00	93,93	7.739.260.136,00
11	Belanja Dekorasi dan Desain Interior/Ekterior	1.199.278.000,00	975.353.630,00	81,33	544.303.000,00
12	Belanja Kelengkapan (Aksesoris) Komputer	501.083.310,00	288.842.656,00	57,64	277.076.630,00
13	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	-	-	-	269.527.460,00
14	Belanja Tas/Kantong Plastik/Karung	458.824.200,00	353.535.276,00	77,05	134.201.832,00
15	Belanja Piring/Gelas/Sendok/Garpu/Nampan/Mangkok/Cangkir/Asbak	205.861.600,00	171.008.483,00	83,07	126.002.100,00
16	Belanja Bantal/Guling/Sarung Bantal/Sarung Guling/Sprei/Taplak Meja	236.838.013,00	113.538.470,00	47,94	122.053.500,00
	JUMLAH	32.807.149.088,00	28.521.007.983,00	86,94	34.208.978.417,00

Belanja Bantal/Guling/Sarung Bantal/SarungGuling/ Sprei/ Taplak Meja dianggarkan untuk di buat tempat isolasi bagi yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang tidak dapat dilaksanakan.

5.2.1.2.2 Belanja Bahan Material

Belanja Bahan Material tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp74.479.861.022,00** dan terealisasi senilai **Rp60.552.135.505,00** atau **81,30%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp23.327.935.557,00** atau **62,67%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp37.224.199.948,00**. Realisasi Belanja Bahan Material sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.54
Realisasi Belanja Bahan Material

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.366.273.672,00	7.117.700.822,00	96,63	6.399.438.175,00
2	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	365.380.000,00	324.164.000,00	88,72	477.421.500,00
3	Belanja Bibit Ternak	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	88.580.000,00
4	Belanja Bahan Obat-obatan	46.407.222.262,00	34.115.711.762,00	73,51	16.679.337.204,00
5	Belanja Bahan Kimia	459.468.200,00	450.138.300,00	97,97	1.391.918.700,00
6	Belanja Material Fasilitas Pameran/Stand	296.000.000,00	289.835.000,00	97,92	420.803.000,00
7	Belanja Material Dokumentasi/Film/Kaset/VC D/DVD	174.743.300,00	143.484.900,00	82,11	112.034.900,00
8	Belanja Bahan/Material Praktek	16.035.740.188,00	14.975.946.281,00	93,39	7.169.570.569,00
9	Belanja Bahan/Material Penerangan Jalan, Rambu Jalan, Taman dan Hutan Kota	202.266.600,00	196.922.990,00	97,36	2.606.401.000,00
10	Belanja Bahan/Material Perbengkelan	336.832.800,00	335.355.500,00	99,56	243.391.000,00
11	Belanja Pakan Hewan / Ternak	308.296.700,00	287.232.200,00	93,17	325.091.900,00
12	Belanja Persediaan Bahan Makanan Pokok	864.000.000,00	775.889.750,00	89,80	260.786.900,00
13	Belanja Bahan/Material untuk Budidaya dan Pasca Panen	1.386.515.900,00	1.307.637.900,00	94,31	775.475.100,00
14	Belanja Bahan/Material Lainnya	4.565.000,00	4.565.000,00	100,00	35.000.000,00
15	Belanja Bahan dan Alat Praktek Sekolah Lapang Komoditi Pertanian/Perkebunan	4.366.400,00	4.366.400,00	100,00	78.580.000,00
16	Belanja Papan Nama/Nomenklatur	113.670.000,00	85.554.700,00	75,27	113.570.000,00
17	Belanja Patok	108.920.000,00	104.030.000,00	95,51	46.800.000,00
18	Belanja Bahan Makanan/Minuman Pasien	12.000.000,00	-	-	-
	JUMLAH	74.479.861.022,00	60.552.135.505,00	81,30	37.224.199.948,00

5.2.1.2.3 Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Kantor tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp267.934.524.843,00** dan terealisasi senilai **Rp241.254.509.669,00** atau **90,04%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp42.396.599.645,00** atau **14,95%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp283.651.109.314,00**. Realisasi Belanja Jasa Kantor sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.55
Realisasi Belanja Jasa Kantor

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Telepon	994.289.280,00	502.282.388,00	50,52	476.163.136,00
2	Belanja Air	1.507.640.400,00	846.084.739,00	56,12	990.190.227,00
3	Belanja Listrik	43.645.088.018,00	38.406.713.539,00	88,00	37.142.213.500,00
4	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.076.563.300,00	1.893.847.878,00	91,20	1.884.155.750,00
5	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.963.989.000,00	3.545.335.013,00	89,44	3.186.806.373,00
6	Belanja Paket/Pengiriman	49.212.000,00	16.756.500,00	34,05	3.726.500,00
7	Belanja Sertifikasi	698.565.352,00	199.590.549,00	28,57	360.992.609,00
8	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	11.122.200,00	2.674.053,00	24,04	3.240.000,00
9	Belanja Jasa Dokumentasi	255.500.000,00	234.600.000,00	91,82	237.901.000,00
10	Belanja Jasa Publikasi	7.254.791.000,00	7.073.378.440,00	97,50	8.445.395.109,00
11	Belanja Jasa Dekorasi Ruang/Gedung Kantor	1.146.024.000,00	1.085.550.000,00	94,72	1.475.275.000,00
12	Belanja Jasa Pengolahan Data Perkantoran	1.083.968.000,00	1.053.410.100,00	97,18	137.940.000,00
13	Belanja Jasa Pengarsipan	95.000.000,00	93.781.000,00	98,72	114.900.000,00
14	Belanja Jasa Kesehatan	190.206.678.354,00	172.320.322.581,00	90,60	212.457.379.729,00
15	Belanja Pajak	261.639.150,00	173.232.737,00	66,21	165.076.664,00
16	Belanja Gas Alam	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	1.000.040,00
17	Belanja Jasa Uji Laboratorium	161.990.000,00	150.334.550,00	92,80	510.701.000,00
18	Belanja Jasa Administrasi Penanganan Perkara	20.000.000,00	15.857.000,00	79,29	4.500.000,00
19	Belanja Jasa Upah Tukang/Mandor/Juru Laden/Petugas Kebersihan	8.387.710.000,00	8.260.057.500,00	98,48	13.051.202.000,00
20	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Medis	423.316.769,00	172.035.817,00	40,64	119.380.176,00
21	Belanja Jasa Profesi	-	-	-	10.752.500,00
22	Belanja Jasa Kebersihan	3.498.469.620,00	3.075.522.085,00	87,91	1.979.750.001,00
23	Belanja Jasa Pengamanan	2.134.128.400,00	2.107.781.200,00	98,77	884.195.000,00
24	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	56.440.000,00	22.962.000,00	40,68	8.273.000,00
	JUMLAH	267.934.524.843,00	241.254.509.669,00	90,04	283.651.109.314,00

Realisasi Belanja Paket/Pengiriman sebesar **34,05%** disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga anggaran tidak terealisasi karena tidak adanya pemeriksaan kontingental selama masa pandemi Covid-19.

Realisasi Belanja Sertifikasi sebesar **28,57%** disebabkan oleh tidak adanya kebutuhan untuk sertifikasi.

Realisasi Belanja Transaksi Keuangan sebesar **24,04%** disebabkan oleh biaya kliring April menurun dari **Rp3.500,00** menjadi **Rp1.900,00**.

Realisasi Belanja Jasa Pengolahan Limbah Medis sebesar **40,64%** dan Belanja Jasa Pengangkutan Sampah **40,68%** disebabkan oleh adanya penurunan pelayanan kesehatan di Puskesmas pada masa Pandemi Covid-19.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

5.2.1.2.4 Belanja Premi Asuransi

Belanja Premi Asuransi tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp4.370.543.921,00** dan terealisasi senilai **Rp2.850.798.999,00** atau **65,23%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp1.470.024.534,00** atau **106,46%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp1.380.774.465,00**. Realisasi Belanja Premi Asuransi sebagai berikut:

Tabel 5.56
Realisasi Belanja Premi Asuransi

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.585.538.360,00	1.486.669.556,40	57,50	360.630.500,00
2	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	700.747.000,00	665.248.171,00	94,93	999.911.442,00
3	Belanja Premi Asuransi Jiwa	367.350.686,00	113.881.271,60	31,00	20.232.523,00
4	Belanja Premi Asuransi Kebakaran	716.907.875,00	585.000.000,00	81,60	
	JUMLAH	4.370.543.921,00	2.850.798.999,00	65,23	1.380.774.465,00

Belanja Premi Asuransi Jiwa sebesar **31,00%** disebabkan oleh belum adanya kesepakatan antara SKPD dan BPJS Kesehatan dan kurangnya sosialisasi oleh BPJS kepada SKPD mengenai asuransi bagi tenaga honorer sehingga banyak SKPD yang tidak merealisasikan belanja tersebut.

5.2.1.2.5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp17.071.991.272,00** dan terealisasi senilai **Rp15.053.755.144,00** atau **88,18%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp1.342.711.266,00** atau **8,19%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp16.396.466.410,00**. Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

Tabel 5.57
Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Jasa Service	1.439.801.200,00	1.116.651.362,00	77,56	2.408.588.503,00
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.669.715.840,00	3.231.328.934,00	88,05	4.131.917.414,00
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.777.107.762,00	9.876.957.848,00	91,65	8.998.223.193,00
4	Belanja Jasa KIR	35.050.000,00	14.478.100,00	41,31	11.845.200,00
5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	1.150.316.470,00	814.338.900,00	70,79	845.892.100,00
	JUMLAH	17.071.991.272,00	15.053.755.144,00	88,18	16.396.466.410,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Belanja Jasa KIR terealisasi sebesar **41,31%** dari anggaran dikarenakan beberapa SKPD seperti Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial yang beberapa pemilik kendaraan tidak bersedia melakukan perpanjangan KIR.

5.2.1.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak dan Penggandaan tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp22.000.716.175,00** dan terealisasi senilai **Rp18.870.130.436,00** atau **85,77%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp9.691.904.184,00** atau **33,93%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp28.562.034.620,00**. Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan sebagai berikut:

Tabel 5.58
Realisasi Belanja Cetak Dan Penggandaan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Cetak	17.357.658.396,00	15.059.271.139,00	86,76	22.798.898.506,00
2	Belanja Penggandaan	3.384.872.350,00	2.902.514.083,00	85,75	4.377.646.657,00
3	Belanja Penjilidan	776.382.529,00	643.489.514,00	82,88	859.180.447,00
4	Cetak Buku, Majalah, Profil	445.510.000,00	237.950.000,00	53,41	449.063.900,00
5	Belanja Cetak Foto	36.292.900,00	26.905.700,00	74,13	77.245.110,00
	JUMLAH	22.000.716.175,00	18.870.130.436,00	85,77	28.562.034.620,00

5.2.1.2.7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp8.117.415.000,00** dan terealisasi senilai **Rp7.037.152.580,00** atau **86,69%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp13.534.715.203,00** atau **65,79%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp20.571.867.783,00**. Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebagai berikut:

Tabel 5.59
Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	-	-	-	16.000.000,00
2	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	2.753.740.000,00	2.609.992.580,00	94,78	8.646.349.701,00
3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.217.265.000,00	3.514.980.000,00	83,35	9.999.088.600,00
4	Belanja Sewa Tempat Parkir/Ruang Tambat/ Hanggar Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	1.280.000,00
5	Belanja Sewa Kamar Hotel	1.120.310.000,00	886.080.000,00	79,09	1.909.149.482,00
6	Belanja Sewa Tanah/Lahan	11.100.000,00	11.100.000,00	100,00	-
	JUMLAH	8.117.415.000,00	7.037.152.580,00	86,69	20.571.867.783,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

5.2.1.2.8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja Sewa Sarana Mobilitas tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp625.700.000,00** dan terealisasi senilai **Rp532.920.000,00** atau **85,17%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp1.785.279.000,00** atau **77,01%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 **Rp2.318.199.000,00**. Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebagai berikut:

Tabel 5.60
Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	625.700.000,00	532.920.000,00	85,17	2.315.199.000,00
2	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	-	-	-	3.000.000,00
	JUMLAH	625.700.000,00	532.920.000,00	85,17	2.318.199.000,00

5.2.1.2.9 Belanja Sewa Alat Berat

Belanja Sewa Alat Berat tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp357.636.350,00** dan terealisasi senilai **Rp272.636.350,00** atau **76,23%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp76.613.650,00** atau **39,08%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp196.022.700,00**. Realisasi Belanja Sewa Alat Berat sebagai berikut:

Tabel 5.61
Realisasi Belanja Sewa Alat Berat

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Sewa Eskavator	40.000.000,00	-	-	47.052.000,00
2	Belanja Sewa Buldoser	40.000.000,00	-	-	50.000.000,00
3	Belanja Sewa Mesin Gilas	265.652.350,00	265.652.350,00	100,00	-
4	Belanja Sewa Dump Truck	11.984.000,00	6.984.000,00	58,28	18.392.000,00
5	Belanja Sewa Alat Lainnya	-	-	-	80.578.700,00
	JUMLAH	357.636.350,00	272.636.350,00	76,23	196.022.700,00

5.2.1.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp3.714.102.300,00** dan terealisasi senilai **Rp3.187.774.000,00** atau **85,83 %** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp1.291.808.100,00** atau **28,84%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp4.479.582.100,00**. Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.62
Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Sewa Meja Kursi	561.268.500,00	455.885.000,00	81,22	597.423.900,00
2	Belanja Sewa Proyektor	321.000.000,00	321.000.000,00	100,00	49.860.000,00
NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
3	Belanja Sewa Generator	157.336.000,00	145.836.000,00	92,69	178.723.800,00
4	Belanja Sewa Tenda/Panggung	1.435.341.800,00	1.158.577.000,00	80,72	1.937.288.300,00
5	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	23.500.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Teknologi Tepat Guna	172.623.000,00	164.616.000,00	95,36	45.000.000,00
7	Belanja Sewa Sound System	1.004.304.000,00	881.731.000,00	87,80	1.450.504.800,00
8	Belanja Sewa Peralatan Praktek/Perbengkelan	-	-	-	10.800.000,00
9	Belanja Sewa Komputer dan Printer	7.500.000,00	6.000.000,00	80,00	-
10	Belanja Sewa Alat Musik	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	43.800.000,00
11	Belanja Sewa Peralatan Studio	-	-	-	11.800.000,00
12	Belanja Sewa Alat-alat Laboratorium	-	-	-	33.790.900,00
13	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Acara Pembukaan/Penutupan	26.729.000,00	26.129.000,00	97,76	61.090.400,00
14	Belanja Sewa Peralatan & Perlengkapan Lainnya	-	-	-	36.000.000,00
	JUMLAH	3.714.102.300,00	3.187.774.000,00	85,83	4.479.582.100,00

5.2.1.2.11 Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp38.253.805.300,00** dan terealisasi senilai **Rp31.575.637.672,00** atau **82,54%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp22.301.935.850,00** atau **41,39%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp53.877.573.522,00**. Realisasi Belanja Makanan dan Minuman sebagai berikut:

Tabel 5.63
Realisasi Belanja Makanan Dan Minuman

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2020 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	3.633.408.000,00	3.294.182.475,00	90,66	1.876.269.313,00
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.157.931.500,00	13.767.427.135,00	71,86	26.874.909.759,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.145.776.400,00	3.073.867.151,00	97,71	4.797.251.480,00
4	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan	6.643.570.900,00	6.045.184.100,00	90,99	13.001.075.370,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2020
			(Rp)	(%)	(Rp)
5	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	560.000,00	560.000,00	100,00	128.852.000,00
6	Belanja Makanan dan Minuman Atlit/Panti/Balita	5.672.558.500,00	5.394.416.811,00	95,10	7.199.215.600,00
	Jumlah	38.253.805.300,00	31.575.637.672,00	82,54	53.877.573.522,00

5.2.1.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributya

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp622.297.500,00** dan terealisasi senilai **Rp581.929.200,00** atau **93,51%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp1.884.637.550,00** atau **76,41%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp2.466.566.750,00**. Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributya sebagai berikut:

Tabel 5.64
Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019
			(Rp)	(%)	(Rp)
1	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	147.280.000,00	140.400.000,00	95,33	212.300.000,00
2	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	206.050.000,00	205.705.000,00	99,83	216.794.000,00
3	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	7.700.000,00	7.600.000,00	98,70	288.446.000,00
4	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	123.190.000,00	97.140.000,00	78,85	1.543.494.250,00
5	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	116.600.000,00	116.418.500,00	99,84	159.650.000,00
6	Belanja Atribut Pakaian	21.477.500,00	14.665.700,00	68,28	45.882.500,00
	JUMLAH	622.297.500,00	581.929.200,00	93,51	2.466.566.750,00

5.2.1.2.13 Belanja Pakaian Kerja

Belanja Pakaian Kerja tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp1.457.421.000,00** dan terealisasi senilai **Rp1.371.154.780,00** atau **94,08 %** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp1.006.345.920,00** atau **42,33%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp2.377.500.700,00**. Realisasi Belanja Pakaian Kerja sebagai berikut:

Tabel 5.65
Realisasi Belanja Pakaian Kerja

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019
			(Rp)	(%)	(Rp)
1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.368.646.000,00	1.284.649.940,00	93,86	2.109.620.700,00
2	Belanja Pakaian Seragam	69.000.000,00	66.729.840,00	96,71	182.604.000,00
3	Belanja Topi Lapangan	19.775.000,00	19.775.000,00	100,00	10.530.000,00
4	Belanja Sepatu Lapangan	-	-	-	74.746.000,00
	JUMLAH	1.457.421.000,00	1.371.154.780,00	94,08	2.377.500.700,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

5.2.1.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu dianggarkan senilai **Rp6.331.619.600,00** dan terealisasi senilai **Rp4.662.525.232,00** atau **73,64%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp1.177.794.332,00** atau **33,80%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp3.484.730.900,00**. Realisasi Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu sebagai berikut:

Tabel 5.66
Realisasi Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Pakaian KORPRI	-	-	-	85.166.000,00
2	Belanja Pakaian Adat Daerah	142.400.000,00	142.070.000,00	99,77	334.922.000,00
3	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.188.115.000,00	1.895.717.912,00	86,64	840.992.500,00
4	Belanja Pakaian Olahraga	703.805.000,00	641.356.000,00	91,13	2.080.374.000,00
5	Belanja Pakaian Pasien dan Tenaga Medis	3.297.299.600,00	1.983.381.320,00	60,15	143.276.400,00
	JUMLAH	6.331.619.600,00	4.662.525.232,00	73,64	3.484.730.900,00

5.2.1.2.15 Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp46.165.079.455,00** dan terealisasi senilai **Rp39.232.523.437,00** atau **84,98 %** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp16.864.596.756,00** atau **30,06%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp56.097.120.193,00**. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Tabel 5.67
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.725.292.723,00	21.207.994.455,00	82,44	26.904.969.600,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.439.786.732,00	18.024.528.982,00	88,18	29.192.150.593,00
	JUMLAH	46.165.079.455,00	39.232.523.437,00	84,98	56.097.120.193,00

5.2.1.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp0,00** dan terealisasi senilai **Rp0,00** atau **0,00%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp456.500.000,00** atau **100,00%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp456.500.000,00**. Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.68
Realisasi Beasiswa Pendidikan PNS

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	-	-	-	134.000.000,00
2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	-	-	-	322.500.000,00
	JUMLAH	-	-	-	456.500.000,00

5.2.1.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp3.780.714.390,00** dan terealisasi senilai **Rp2.708.934.372,00** atau **71,65 %** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp2.440.737.628,00** atau **47,40%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp5.149.672.000,00**. Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS sebagai berikut:

Tabel 5.69
Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	3.608.227.390,00	2.536.447.372,00	70,30	4.533.372.000,00
2	Belanja Sosialisasi	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	4.800.000,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	148.487.000,00	148.487.000,00	100,00	611.500.000,00
	JUMLAH	3.780.714.390,00	2.708.934.372,00	71,65	5.149.672.000,00

5.2.1.2.18 Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp57.533.634.213,00** dan terealisasi senilai **Rp50.564.202.237,00** atau **87,89%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp8.537.593.418,00** atau **14,45%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp59.101.795.655,00**. Realisasi Belanja Pemeliharaan sebagai berikut:

Tabel 5.70
Realisasi Belanja Pemeliharaan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Pemeliharaan Jalan	26.097.795.000,00	23.255.300.527,00	89,11	36.057.136.519,00
2	Belanja Pemeliharaan Jembatan	1.191.515.000,00	1.151.398.000,00	96,63	1.348.193.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor	14.545.380.375,00	12.573.653.972,00	86,44	12.032.784.471,00
4	Belanja Penggantian Suku Cadang	737.491.000,00	718.449.250,00	97,42	761.987.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
5	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.902.660.370,00	2.116.511.631,00	72,92	2.121.043.136,00
6	Belanja Pemeliharaan Saluran Air	2.191.350.000,00	2.069.770.000,00	94,45	1.614.991.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	330.786.400,00	330.558.400,00	99,93	1.082.847.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga	91.258.000,00	38.604.250,00	42,30	51.935.530,00
9	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan	1.835.769.468,00	1.479.756.582,00	80,61	1.952.580.517,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	505.440.000,00	498.604.950,00	98,65	528.461.500,00
11	Belanja Pemeliharaan Mesin / Alat-alat Bengkel	43.800.000,00	34.350.000,00	78,42	68.167.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	44.400.000,00	42.000.000,00	94,59	49.350.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio	5.650.000,00	3.912.000,00	69,24	5.515.800,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	416.739.800,00	179.588.500,00	43,09	103.511.522,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	94.762.000,00	55.704.000,00	58,78	72.035.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS/TPA)	210.000.000,00	209.886.000,00	99,95	331.107.000,00
17	Belanja Pemeliharaan/Service	6.288.836.800,00	5.806.154.175,00	92,32	920.149.660,00
	JUMLAH	57.533.634.213,00	50.564.202.237,00	87,89	59.101.795.655,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran sebesar **43,09%** disebabkan oleh adanya penurunan pelayanan kesehatan di Puskesmas pada masa pandemi Covid-19.

5.2.1.2.19 Belanja Jasa Konsultansi

Belanja Jasa Konsultansi tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp18.206.163.082,00** dan terealisasi senilai **Rp16.852.754.637,00** atau **92,57%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp3.312.867.763,00** atau **16,43%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp20.165.622.400,00**. Realisasi Belanja Jasa Konsultansi sebagai berikut:

Tabel 5.71
Realisasi Belanja Jasa Konsultansi

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.497.327.100,00	1.439.542.600,00	96,14	2.284.466.000,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	13.002.714.382,00	11.770.802.537,00	90,53	14.777.389.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
3	Belanja Jasa Konsultansi Sistem Informasi Manajemen	2.061.952.100,00	2.032.306.000,00	98,56	1.069.484.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi	1.241.169.500,00	1.214.672.500,00	97,87	1.450.830.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal	403.000.000,00	395.431.000,00	98,12	583.453.000,00
	JUMLAH	18.206.163.082,00	16.852.754.637,00	92,57	20.165.622.400,00

5.2.1.2.20 Belanja Stimulan dan Hadiah

Belanja Stimulan dan Hadiah tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp0,00** dan terealisasi senilai **Rp0,00** atau **0,00%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp316.992.000,00** atau **100,00%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp316.992.000,00**. Realisasi Belanja Stimulan dan hadiah sebagai berikut:

Tabel 5.72
Realisasi Belanja Stimulan dan Hadiah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Hadiah dalam Bentuk Uang	-	-	-	237.250.000,00
2	Belanja Stimulan dalam Bentuk Barang	-	-	-	79.742.000,00
	JUMLAH	-	-	-	316.992.000,00

5.2.1.2.21 Belanja Jasa Travel/Event Organizer

Belanja Jasa Travel/Event Organizer tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp1.456.101.600,00** dan terealisasi senilai **Rp1.030.536.600,00** atau **70,77%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp4.987.229.879,00** atau **82,88%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp6.017.766.479,00**. Realisasi Belanja Jasa Travel/Event Organizer sebagai berikut:

Tabel 5.73
Realisasi Belanja Jasa Travel/Event Organizer

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Jasa Event Organizer	1.456.101.600,00	1.030.536.600,00	70,77	6.017.766.479,00
	JUMLAH	1.456.101.600,00	1.030.536.600,00	70,77	6.017.766.479,00

5.2.1.2.22 Belanja Barang Untuk Diserahkan

Belanja Barang Untuk Diserahkan tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp672.000.000,00** dan terealisasi senilai



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rp590.993.700,00 atau **87,95 %** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp526.493.700,00** atau **816,27%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp64.500.000,00**. Rincian realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan sebagai berikut:

Tabel 5.74
Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Jalan, Jaringan dan Instalasi untuk Diserahkan	-	-	-	64.500.000,00
2	Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan	672.000.000,00	590.993.700,00	87,95	-
	JUMLAH	672.000.000,00	590.993.700,00	87,95	64.500.000,00

5.2.1.2.23 Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan

Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp26.734.680.000,00** dan terealisasi senilai **Rp25.724.864.589,00** atau sebesar **96,22 %** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp16.131.272.340,00** atau **38,54%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp41.856.136.929,00**. Realisasi Belanja Hibah Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan sebagai berikut:

Tabel 5.75
Realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	26.734.680.000,00	25.724.864.589,00	96,22	41.856.136.929,00
	JUMLAH	26.734.680.000,00	25.724.864.589,00	96,22	41.856.136.929,00

Rincian realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.76
Realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Per SKPD

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan	22.275.900.000,00	21.991.584.389,00	98,72	33.024.017.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	1.570.500.000,00	1.543.645.000,00	98,29	-
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	124.659.000,00
4	Dinas Pertanian	1.883.280.000,00	1.716.820.000,00	91,16	4.619.303.929,00
5	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.005.000.000,00	472.815.200,00	47,05	1.071.400.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
6	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	-	-	-	2.915.757.000,00
7	Kecamatan Sumber	-	-	-	101.000.000,00
	JUMLAH	26.734.680.000,00	25.724.864.589,00	96,22	41.856.136.929,00

Realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan sebesar **47,05%** pada Dinas Kelautan dan Perikanan disebabkan oleh berkurangnya kebutuhan belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

5.2.1.2.24 Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp868.084.900,00** dan terealisasi senilai **Rp864.222.000,00** atau **99,56%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp10.226.442.000,00** atau **92,21%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp11.090.664.000,00**. Realisasi Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 5.77
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	868.084.900,00	864.222.000,00	99,56	11.090.664.000,00
	JUMLAH	868.084.900,00	864.222.000,00	99,56	11.090.664.000,00

5.2.1.2.25 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp17.883.171.598,00** dan terealisasi senilai **Rp14.549.590.400,00** atau **81,36%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp11.868.977.600,00** atau **44,93%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp26.418.568.000,00**. Realisasi Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber sebagai berikut:

Tabel 5.78
Realisasi Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber PNS	4.727.027.798,00	4.198.583.000,00	88,82	11.496.974.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
2	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber Non PNS	13.156.143.800,00	10.351.007.400,00	78,68	14.921.594.000,00
	JUMLAH	17.883.171.598,00	14.549.590.400,00	81,36	26.418.568.000,00

5.2.1.2.26 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp114.573.685.084,00** dan terealisasi senilai **Rp116.574.755.364,00** atau **101,75%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp3.372.087.765,86** atau **2.81%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp119.946.843.129,86**. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagai berikut:

Tabel 5.79
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
A	RSUD ARJAWINANGUN				
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.986.256.162,00	54.153.155.520,00	102,20	59.187.607.974,86
B	RSUD WALED				
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	61.587.428.922,00	62.421.599.844,00	101,35	60.759.235.155,00
	JUMLAH	114.573.685.084,00	116.574.755.364,00	101,75	119.946.843.129,86

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa per BLUD terdapat dalam Lampiran 5.5.

5.2.1.2.27 Belanja Hadiah Lomba dan/atau Penghargaan

Belanja Hadiah Lomba dan/atau Penghargaan tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp1.257.043.400,00** dan terealisasi senilai **Rp1.201.065.500,00** atau **95,55 %** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp3.662.941.300,00** atau **75,31%** jika dibandingkan dengan tahun 2019 senilai **Rp4.864.006.800,00**. Realisasi Belanja Hadiah Lomba dan/atau Penghargaan sebagai berikut:

Tabel 5.80
Realisasi Belanja Hadiah Lomba dan/atau Penghargaan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Hadiah Lomba	1.240.043.400,00	1.184.065.500,00	95,49	4.057.477.800,00
2	Belanja Penghargaan	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	806.529.000,00
	JUMLAH	1.257.043.400,00	1.201.065.500,00	95,55	4.864.006.800,00

5.2.1.2.28 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

Belanja Barang dan Jasa Dana BOS tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp161.642.772.338,00** dan terealisasi senilai



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rp161.577.028.432,00 atau **99,96%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp27.635.446.091,00** atau **20,63 %** jika dibandingkan dengan tahun 2019 senilai **Rp133.941.582.341,00**. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS sebagai berikut:

Tabel 5.81
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	161.642.772.338,00	161.577.028.432,00	99,96	133.941.582.341,00
	JUMLAH	161.642.772.338,00	161.577.028.432,00	99,96	133.941.582.341,00

Pada masa Pandemi Covid-19 terdapat perubahan petunjuk teknis penggunaan dana BOS tahun 2020 yang semula diatur oleh Juknis penggunaan dana BOS Nomor 8 tahun 2020 dirubah dengan Juknis penggunaan dana BOS Nomor 19 tahun 2020. Secara garis besar poin-poin perubahan terdiri dari :

1. Besaran prosentase pembayaran honorarium semula tidak boleh melebihi 50% diubah sehingga dapat melampaui 50% dari total dana BOS
2. Pembayaran honorarium semula hanya untuk tenaga kependidikan yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) diubah menjadi tidak wajib memiliki NUPTK dengan syarat terdaftar di DAPODIK per 31 desember 2019
3. Mengarahkan penganggaran belanja untuk mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 seperti pembangunan wastafel, pengadaan masker, *handsanitizer* dan perlengkapan kebersihan.

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS terdapat dalam Lampiran 5.6.

5.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp47.196.740.000,00** dan terealisasi senilai **Rp45.483.165.900,00** atau **96,37%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi belanja hibah pada PPKD mengalami kenaikan senilai **Rp14.259.783.300,00** atau **45,67%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp31.223.382.600,00**.

Belanja hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Rincian realisasi Belanja Hibah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.82
Realisasi Belanja Hibah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Hibah pada PPKD Untuk Pemerintah Pusat	5.157.240.000,00	4.937.188.500,00	95,73	-
2	Belanja Hibah pada PPKD Untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	10.660.000.000,00	10.309.779.000,00	96,71	4.076.550.000,00
3	BOP PAUD Masyarakat/Swasta di Kab. Cirebon	19.857.600.000,00	18.938.100.000,00	95,37	18.786.900.000,00
4	BOP Pendidikan Kesetaraan di Kab. Cirebon	11.521.900.000,00	11.298.098.400,00	98,06	8.359.932.600,00
	JUMLAH	47.196.740.000,00	45.483.165.900,00	96,37	31.223.382.600,00

5.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp1.850.938.000,00** dan terealisasi senilai **Rp924.844.000,00** atau **49,97%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi Belanja Bantuan Sosial tersebut mengalami penurunan senilai **Rp464.416.143,00** atau **33,43%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp1.389.260.143,00**.

Belanja Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut:

Tabel 5.83
Realisasi Belanja Bantuan Sosial

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bantuan Sosial pada PPKD untuk Individu dan atau Keluarga	1.850.938.000,00	924.844.000,00	49,97	1.389.260.143,00
	JUMLAH	1.850.938.000,00	924.844.000,00	49,97	1.389.260.143,00

Realisasi belanja bantuan sosial pada PPKD menggunakan mekanisme pengajuan, nilai yang terealisasi sudah sesuai denganajuan yang diterima.

5.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp357.509.125.122,00** dan terealisasi senilai **Rp296.952.045.604,00** atau **83,06%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp290.881.733.549,00** atau **49,98%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp587.833.779.153,00**. Realisasi Belanja Modal sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.84
Realisasi Belanja Modal

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Tanah	-	-	-	7.355.693.793,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	152.704.155.008,00	133.412.280.354,56	87,37	123.053.357.908,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	123.078.369.496,00	90.175.480.974,00	73,27	193.588.871.113,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	81.243.896.212,00	72.994.260.369,44	89,85	235.134.118.886,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	482.704.406,00	370.023.906,00	76,66	28.701.737.453,00
6	Belanja Modal BLUD	-	-	-	-
	JUMLAH	357.509.125.122,00	296.952.045.604,00	83,06	587.833.779.153,00

Dari Jumlah Belanja Modal senilai **Rp296.952.045.604,00**, alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 senilai **Rp30.658.234.515,00** dan realisasi senilai **Rp29.003.602.111,00** atau **94,60%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja Modal tersebut berupa belanja modal peralatan dan mesin untuk kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5.85
Realisasi Belanja Modal untuk penanganan Covid-19

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SKPD
1	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	7.837.706.000,00	6.925.352.601,00	Dinas Kesehatan
2	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	17.483.289.608,00	17.361.008.938,00	RSUD Waled
3	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	5.259.738.907,00	4.639.740.572,00	RSUD Arjawinangun
4	Aktivitasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	77.500.000,00	77.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	JUMLAH	30.658.234.515,00	29.003.602.111,00	

Dan Belanja Modal tersebut juga dialokasikan untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 senilai **Rp34.500.000,00** dan realisasi senilai **Rp34.500.000,00** atau **100,00%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Belanja Modal tersebut untuk kegiatan sebagai berikut:

Tabel 5.86
Realisasi Belanja Modal untuk dampak ekonomi Covid-19

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SKPD
1	Pengembangan Lumbung Pangan Desa	4.500.000,00	4.500.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	Kegiatan Penyuluhan Kegiatan Penerapan Teknologi Pertanian	30.000.000,00	30.000.000,00	Dinas Pertanian
	JUMLAH	34.500.000,00	34.500.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

5.2.2.1 Belanja Tanah

Belanja Tanah tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp0,00**, dan terealisasi senilai **Rp0,00** atau senilai **0,00%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp7.355.693.793,00** atau **100,00%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp7.355.693.793,00**. Realisasi Belanja Tanah sebagai berikut:

Tabel 5.87
Rincian Realisasi Belanja Tanah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	-	-	-	48.881.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Tinggi	-	-	-	20.000.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Sarana Air Minum/Air Bersih	-	-	-	7.286.812.793,00
	JUMLAH	-	-	-	7.355.693.793,00

5.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp152.704.155.008,00** dan terealisasi senilai **Rp133.412.280.354,56** atau **87,37%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp10.358.922.446,56** atau **8,42%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp123.053.357.908,00**. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 5.88
Realisasi Belanja Peralatan Dan Mesin

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	2.284.986.500,00	1.712.885.600,00	74,96	3.328.641.750,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	10.439.000.000,00	10.079.355.000,00	96,55	17.469.541.520,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	3.518.756.100,00	3.437.451.100,00	97,69	5.041.126.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	-	-	-	57.185.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	-	-	-	153.750.000,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara	30.521.725,00	30.521.725,00	100,00	-
7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	372.486.600,00	342.942.640,00	92,07	554.152.236,00
8	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan	85.588.000,00	84.145.000,00	98,31	461.923.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
	Pertanian dan Peternakan				
9	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	1.706.519.544,00	1.151.373.490,00	67,47	2.181.989.390,00
10	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.096.994.155,00	3.987.031.077,00	65,39	4.270.126.698,00
11	Belanja Modal Pengadaan Komputer	13.400.260.804,00	11.181.770.982,00	83,44	20.395.902.723,00
12	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	7.524.803.733,00	5.677.002.372,00	75,44	6.977.720.447,00
13	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	555.519.502,00	374.853.305,00	67,48	357.496.370,00
14	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.154.699.500,00	754.717.460,00	65,36	1.290.299.036,00
15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1.578.534.008,00	1.094.833.210,00	69,36	3.418.240.290,00
16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.299.678.784,00	752.705.962,00	57,91	1.052.201.202,00
17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	831.505.500,00	795.667.800,00	95,69	555.648.000,00
18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	69.587.892.710,00	61.411.312.535,56	88,25	33.732.152.619,00
19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	6.528.879.304,00	5.371.548.855,00	82,27	5.409.220.770,00
20	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	11.730.000,00
21	Belanja Pendukung Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.500.000,00	500.000,00	9,09	-
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.687.028.539,00	25.156.662.241,00	97,94	16.334.309.957,00
	JUMLAH	152.704.155.008,00	133.412.280.354,56	87,37	123.053.357.908,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai **Rp25.156.662.241,00** terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD senilai **Rp5.759.935.023,00** dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS senilai **Rp19.396.727.218,00**.

Realisasi Belanja Pendukung Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **9,09%** disebabkan tidak boleh ada belanja pendukung belanja modal peralatan dan mesin.

5.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp123.078.369.496,00** dan terealisasi senilai **Rp90.175.480.974,00** atau **73,27%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp103.413.390.139,00** atau **53,42%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp193.588.871.113,00**. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.89
Realisasi Belanja Gedung Dan Bangunan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	71.445.837.436,00	41.610.309.895,00	58,24	17.785.849.354,00
2	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas	-	-	-	767.284.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	202.100.000,00	199.425.000,00	98,68	714.470.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Monumen	409.260.000,00	349.531.450,00	85,41	88.016.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olah Raga	492.182.500,00	490.387.500,00	99,64	81.391.163.000,00
6	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Fisik/Bangunan Bukan Gedung	11.500.749.760,00	10.533.231.538,00	91,59	16.714.964.994,00
7	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Perpustakaan	7.910.000.000,00	7.689.780.000,00	97,22	529.247.000,00
8	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Taman Kanak-Kanak	784.500.000,00	784.500.000,00	100,00	748.487.100,00
9	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah Dasar/ Sederajat	15.901.280.000,00	15.877.263.000,00	99,85	37.889.608.345,00
10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung SMP/Sederajat	6.360.250.000,00	6.359.869.600,00	99,99	12.524.870.643,00
11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Terminal	-	-	-	196.097.000,00
12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Tempat Pelelangan Ikan	-	-	-	521.760.700,00
13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Pasar	2.598.955.400,00	2.240.978.000,00	86,23	12.645.918.585,00
14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pusat Perdagangan	-	-	-	224.935.000,00
15	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman	767.855.000,00	707.394.000,00	92,13	4.710.338.469,00
16	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pusat Hiburan Rakyat	295.000.000,00	294.347.000,00	99,78	853.358.000,00
17	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Halte	240.000.000,00	237.942.593,00	99,14	208.847.000,00
18	Belanja Modal Pemagaran	1.535.111.900,00	1.229.423.218,00	80,09	2.940.432.485,00
19	Belanja Modal Pengadaan Rambu Lalu Lintas	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
20	Belanja Modal Pembangunan Tempat/Halaman Parkir	780.287.500,00	720.297.250,00	92,31	632.756.094,00
21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.800.000.000,00	795.800.930,00	44,21	1.500.467.344,00
	JUMLAH	123.078.369.496,00	90.175.480.974,00	73,27	193.588.871.113,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar **44,21%** disebabkan oleh adanya perubahan RBA yang belum disesuaikan dengan DPA perubahan.

5.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp81.243.896.212,00** dan terealisasi senilai **Rp72.994.260.369,44** atau **89,85%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp162.139.858.516,56** atau **68,96%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp235.134.118.886,00**. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 5.90
Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	34.710.910.767,00	31.798.853.394,00	91,61	108.334.260.792,00
2	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	-	-	-	31.961.601.229,00
3	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	38.946.652.973,00	38.205.858.717,44	98,10	83.425.308.448,00
4	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	6.825.000.000,00	2.595.148.481,00	38,02	10.990.798.428,00
5	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telpo dan Air	761.332.472,00	394.399.777,00	51,80	422.149.989,00
	JUMLAH	81.243.896.212,00	72.994.260.369,44	89,85	235.134.118.886,00

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan kota sebesar **38,02%** disebabkan oleh proses lelang gagal karena spec tidak sesuai, dan pada saat akan dilakukan lelang ulang sudah tidak punya cukup waktu karena mepet ke akhir tahun.

5.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp482.704.406,00** dan terealisasi senilai **Rp370.023.906,00** atau sebesar **76,66%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp28.331.713.547,00** atau **98,71%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp28.701.737.453,00**. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.91
Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	53.800.000,00	50.132.000,00	93,18	6.297.582.413,00
2	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	45.241.400,00	8.319.500,00	18,39	141.575.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	-	-	-	413.280.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	30.000.000,00	-	-	2.065.000,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	353.663.006,00	311.572.406,00	88,10	21.847.235.040,00
	JUMLAH	482.704.406,00	370.023.906,00	76,66	28.701.737.453,00

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, kebudayaan sebesar **18,39%** disebabkan oleh waktu tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp181.208.859.817,06** dan terealisasi senilai **Rp53.986.319.820,00** atau **29,79%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp53.986.319.820,00** atau **100,00%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp0,00**. Realisasi Belanja Tidak Terduga sebagai berikut:

Tabel 5.92
Realisasi Belanja Tidak Terduga

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Tidak Teduga	181.208.859.817,06	53.986.319.820,00	29,79	-
	JUMLAH	181.208.859.817,06	53.986.319.820,00	29,79	-

Dari Jumlah Belanja Tidak terduga senilai **Rp53.986.319.820,00**, realisasi untuk Penanggulangan bencana banjir dan longsor senilai **Rp317.143.000,00**, kelebihan pembayaran pajak air tanah senilai **Rp8.833.536,00** dan penanganan Covid-19 senilai **Rp53.660.343.284,00**, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.93
Realisasi Belanja Tidak Terduga untuk penangan Covid-19

NO	KEGIATAN	REALISASI	SKPD
1	Bantuan Pangan untuk Masyarakat terdampak Pandemi Covid-19	29.542.165.000,00	Dinas Sosial
2	Kegiatan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Cirebon	5.353.541.400,00	Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah
3	Kegiatan Tim Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus	252.040.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	KEGIATAN	REALISASI	SKPD
4	Kegiatan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Pada Bidang Penanganan Kesehatan	4.635.628.720,00	Dinas Kesehatan
5	Penambahan Ruang Isolasi Pasien Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun	13.876.968.164,00	RSUD Arjawinangun

5.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp671.603.692.000,00** dan terealisasi senilai **Rp669.574.737.908,00** atau **99,70%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp17.793.154.487,00** atau **2,73%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp651.781.583.421,00**. Realisasi Belanja Transfer sebagai berikut:

Tabel 5.94
Realisasi Belanja Transfer

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	28.607.131.000,00	26.867.504.952,00	93,92	20.433.532.671,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	642.996.561.000,00	642.707.232.956,00	100,00	631.348.050.750,00
	JUMLAH	671.603.692.000,00	669.574.737.908,00	99,70	651.781.583.421,00

5.2.4.1 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp28.607.131.000,00** dan terealisasi senilai **Rp26.867.504.952,00** atau **93,92%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp6.433.972.281,00** atau **31,49%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp20.433.532.671,00**. Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebagai berikut:

Tabel 5.95
Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	24.232.263.000,00	23.138.396.000,00	95,49	17.562.112.671,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.374.868.000,00	3.729.108.952,00	85,24	2.871.420.000,00
	JUMLAH	28.607.131.000,00	26.867.504.952,00	93,92	20.433.532.671,00

5.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp642.996.561.000,00** dan terealisasi senilai **Rp642.707.232.956,00** atau



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

99,96% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp11.359.182.206,00** atau **1,80%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp631.348.050.750,00**. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebagai berikut:

Tabel 5.96
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	641.444.331.000,00	641.155.002.956,00	99,95	630.351.298.750,00
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.552.230.000,00	1.552.230.000,00	100,00	996.752.000,00
	JUMLAH	642.996.561.000,00	642.707.232.956,00	99,96	631.348.050.750,00

Belanja Bantuan Keuangan merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebagai berikut:

Tabel 5.97
Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa				
A	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	641.444.331.000,00	641.155.002.956,00	99,95	630.351.298.750,00
	JUMLAH	641.444.331.000,00	641.155.002.956,00	99,95	630.351.298.750,00
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
A	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	289.552.500,00	289.552.500,00	100,00	222.253.000,00
B	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	133.150.500,00	133.150.500,00	100,00	88.107.000,00
C	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	329.955.000,00	329.955.000,00	100,00	175.777.000,00
D	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	139.705.500,00	139.705.500,00	100,00	87.632.000,00
E	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya	212.616.000,00	212.616.000,00	100,00	102.161.000,00
F	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat	59.385.000,00	59.385.000,00	100,00	74.612.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
G	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	212.218.500,00	212.218.500,00	100,00	116.176.000,00
H	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Bulan Bintang	-	-	-	18.561.000,00
I	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat	175.647.000,00	175.647.000,00	100,00	78.057.000,00
J	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	-	-	-	33.416.000,00
	JUMLAH	1.552.230.000,00	1.552.230.000,00	100,00	996.752.000,00
	JUMLAH KESELURUHAN	642.996.561.000,00	642.707.232.956,00	99,96	631.348.050.750,00

Termasuk kedalam bantuan keuangan kepada pemerintah desa adalah penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati memberikan Surat Kuasa kepada Kepala KPPN Cirebon sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan dana desa untuk melakukan penyaluran Dana Desa dengan melakukan pemotongan dana desa dan menyalurkan hasil pemotongan tersebut kepada rekening kas desa pada setiap saat. Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa pada setiap tahap penyaluran yang salah satunya memuat besaran penyaluran tiap-tiap desa.

5.3 Pembiayaan

Pembiayaan tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp287.834.438.356,06** dan terealisasi senilai **Rp288.834.438.356,06** atau **100,35%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp11.286.005.145,67** atau **3,76%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp300.120.443.501,73**. Realisasi Pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 5.98
Realisasi Pembiayaan Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Penerimaan Pembiayaan	288.834.438.356,06	288.834.438.356,06	100,00	321.620.443.501,73
2	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	-	-	21.500.000.000,00
	JUMLAH	287.834.438.356,06	288.834.438.356,06	100,35	300.120.443.501,73

5.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp288.834.438.356,06** dan terealisasi senilai **Rp288.834.438.356,06** atau **100,00%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp32.786.005.145,67** atau **10,19%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp321.620.443.501,73**. Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 5.99
Realisasi Penerimaan Pembiayaan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Penggunaan SiLPA	288.834.438.356,06	288.834.438.356,06	100,00	300.120.443.501,73
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	21.500.000.000,00
	JUMLAH	288.834.438.356,06	288.834.438.356,06	100,00	321.620.443.501,73

5.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan tahun 2020 dianggarkan senilai **Rp1.000.000.000,00** dan terealisasi senilai **Rp0,00** atau **00,00%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp21.500.000.000,00** atau **100,00%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 senilai **Rp21.500.000.000,00**. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 5.100
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020		REALISASI 2019 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang kepada Pihak Ketiga	-	-	-	21.500.000.000,00
	JUMLAH	-	-	-	21.500.000.000,00

5.3.3 Perhitungan Anggaran

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2020 diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai **Rp365.324.004.700,07** merupakan hasil perhitungan dari:

- Realisasi Pendapatan TA. 2020	Rp	3.770.704.066.601,01
- Realisasi Belanja TA. 2020	Rp	3.694.214.500.257,00
Surplus (I)	Rp	76.489.566.344,01
- Penerimaan Daerah dari Pembiayaan	Rp	288.834.438.356,06
- Pengeluaran Daerah dari Pembiayaan	Rp	-
- Saldo Akhir Kas di BOS	Rp	-
Pembiayaan Netto (II)	Rp	288.834.438.356,06
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan (I+II)	Rp	365.324.004.700,07

5.3.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan senilai **Rp365.324.004.700,07** merupakan hasil perhitungan dari:

- Saldo Kas di Kas Daerah	Rp	300.461.473.382,00
- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	-
- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	196.855.282,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- Saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD	Rp	33.201.262.064,07
- Saldo Akhir Kas di Dana Kapitasi FKTP	Rp	30.681.432.863,00
- Saldo Akhir Kas di BOS	Rp	1.404.689.622,00
JUMLAH	Rp	365.945.713.213,07

Terdapat selisih nilai SiLPA berdasarkan perhitungan anggaran dengan SiLPA perhitungan saldo kas senilai **Rp621.708.513,00** yang merupakan koreksi atas saldo awal Kas di bendahara Dana BOS senilai **Rp2.871.471,00** koreksi atas saldo awal kas di Bendahara Kapitasi JKN senilai **Rp2.792.003,00** dan koreksi hutang pajak senilai **Rp616.045.039,00** yang tidak masuk dalam perhitungan anggaran ditahun berjalan.

SiLPA senilai **Rp365.324.004.700,07** terdiri dari SILPA atas dana-dana spesifik senilai **Rp131.113.410.974,07** dengan rincian sebagai berikut:

- DAK Non Fisik	Rp	17.777.794.378,00
- DAK Fisik	Rp	3.980.947.200,00
- DBHCHT	Rp	-
- Dana Insentif Daerah	Rp	29.278.706.255,00
- Bantuan Keuangan Provinsi	Rp	14.788.578.592,00
- SILPA BLUD	Rp	33.201.262.064,07
- SILPA JKN	Rp	30.681.432.863,00
- SILPA Dana BOS	Rp	1.404.689.622,00

Sisanya senilai **Rp234.210.593.726,00** merupakan SiLPA yang penganggarannya tidak diatur secara spesifik.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

BAB VI

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

6.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal senilai **Rp288.834.438.356,06** merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember Tahun 2019.

6.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan senilai **Rp288.834.438.356,06** merupakan SiLPA tahun 2019 yang digunakan untuk pembiayaan tahun 2020.

6.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai **Rp365.324.004.700,07** merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran selama tahun berjalan. Total Penerimaan tahun 2020 adalah senilai **Rp3.318.328.901.601,01** dikurangi dengan jumlah belanja **Rp3.024.639.762.349,00** dikurangi dengan jumlah transfer **Rp217.199.572.908,00** serta ditambah dengan pembiayaan senilai **Rp288.834.438.356,06**

6.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya senilai **Rp5.663.474,00**. Merupakan koreksi atas saldo awal kas dibendahara BOS senilai **Rp2.871.471,00** dan koreksi atas saldo awal kas dibendahara Dana Kapitasi FKTP senilai **Rp2.792.003,00**.

6.5 Lain-Lain

Lain-lain senilai **Rp0,00**.

6.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan Saldo Anggaran Lebih Awal, dikurangi Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ditambahkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2020 senilai **Rp365.329.668.174,07**.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

BAB VII

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
NERACA

7.1 Aset

5.1.4 Aset Lancar

7.1.1.5 Kas di Kas Daerah

Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 senilai **Rp300.461.473.382,00** dan saldo per 31 Desember 2019 senilai **Rp215.722.795.407,00**. Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dikelola pada Bank BJB Cabang Sumber. Saldo Kas tersebut merupakan hasil rekonsiliasi antara saldo Buku Kas Umum Harian BUD Kabupaten Cirebon dengan Rekening Koran Bank BJB Cabang Sumber per 31 Desember 2020. Kas di Kas Daerah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Kas di Kas Daerah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019 AUDITED
1	Rekening No.0008753148001/Kas umum	300.461.459.817,00	215.722.595.690,00
2	Rekening No.0008753032001/Kas Penerimaan	13.565,00	199.717,00
	JUMLAH	300.461.473.382,00	215.722.795.407,00

Saldo Kas di Kas Daerah senilai **Rp300.461.473.382,00** terdiri dari SiLPA atas dana-dana spesifik senilai **Rp65.826.026.434,00** dengan rincian sebagai berikut:

- DAK Non Fisik	Rp	17.777.794.387,00
- DAK Fisik	Rp	3.980.947.200,00
- Dana Insentif Daerah	Rp	29.278.706.255,00
- Bantuan Keuangan Provinsi	Rp	14.788.578.592,00

Sisanya senilai **Rp234.635.446.948,00** merupakan SiLPA yang penganggarnya tidak diatur secara spesifik.

7.1.1.6 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 senilai **Rp196.855.282,00** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp240.283.177,00**. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Cirebon yang masih berada pada Bendahara Pengeluaran berupa sisa dana kegiatan yang belum disetor ke Kas Daerah senilai **Rp196.855.282,00** pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Kas di Bendahara Pengeluaran per SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 7.2
Kas di Bendahara Pengeluaran

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	Dinas Pendidikan	-	2.983.325,00
2	Kecamatan Pabedilan	-	6.743.499,00
3	Kecamatan Pangenan	-	634.440,00
4	Kecamatan Sumber	-	2.200.000,00
5	Kecamatan Klangeran	-	1.372.800,00
6	Kecamatan Kaliwedi	-	7.646.657,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	21.413.000,00
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	197.289.456,00
9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	196.855.282,00	-
	JUMLAH	196.855.282,00	240.283.177,00

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan senilai **Rp196.855.282,00** telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 20 Januari 2021 dengan STS No : 900/002-STIS-UP/DPKPP/2021.

7.1.1.7 Kas di Bendahara BLUD

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2020 senilai **Rp33.201.262.064,07** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp21.514.650.258,06**. Kas di Bendahara BLUD sebagai berikut:

Tabel 7.3
Kas di Bendahara BLUD

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	RSUD Arjawinangun	18.103.559.859,07	10.253.183.162,06
2	RSUD Waled	15.097.702.205,00	11.261.467.096,00
	JUMLAH	33.201.262.064,07	21.514.650.258,06

7.1.1.8 Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN

Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2020 senilai **Rp30.681.432.863,00** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp41.140.564.248,00**. Perhitungan Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN adalah sebagai berikut:

Tabel 7.4
Perhitungan Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	SILPA 2019	41.140.564.248,00
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2020	86.326.995.000,00
2	Pendapatan Atas Pengembalian Belanja Tahun lalu	23.553.979,00
3	Belanja Tahun 2020	(96.812.472.367,00)
4	Koreksi Saldo Awal	2.792.003,00
	SILPA 2020	30.681.432.863,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Terdapat pengembalian pada belanja JKN senilai **Rp23.553.979,00** merupakan pengembalian belanja JKN atas temuan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon tahun yang lalu. Koreksi saldo awal senilai **Rp2.792.003,00** merupakan pengakuan atas dana saldo awal pembukaan rekening yang bukan berasal dari dana kapitasi JKN. Rincian kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN per puskesmas terdapat dalam Lampiran 7.1.

7.1.1.9 Kas di Bendahara Dana BOS

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2020 senilai **Rp1.404.689.622,00** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp10.432.899.443,00**. Perhitungan Kas di Bendahara Dana BOS sebagai berikut:

Tabel 7.5
Perhitungan Kas di Bendahara Dana BOS

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	SILPA 2019	10.432.899.443,00
1	Pendapatan Tahun 2020	233.794.496.546,00
2	Belanja Tahun 2020	(243.438.751.406,00)
	SILPA 2020	788.644.583,00
3	Utang Pajak	616.045.039,00
	Kas di Bendahara Dana BOS	1.404.689.622,00

Rincian kas di Bendahara Bos Per Sekolah terdapat dalam Lampiran 7.2.

7.1.1.10 Piutang Pajak

7.1.1.6.1 Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020 senilai **Rp81.502.715.912,50** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp78.393.726.958,50**. Piutang Pajak sebagai berikut:

Tabel 7.6
Piutang Pajak Daerah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	Pajak Hotel	1.044.750,00	1.044.750,00
2	Pajak Restoran	117.828.823,00	117.828.823,00
3	Pajak Hiburan	1.761.000,00	1.761.000,00
4	Pajak Reklame	542.847.188,00	564.077.921,00
5	Pajak Penerangan Jalan	179.400,00	179.400,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam	236.625.750,00	177.098.211,50
7	Pajak Parkir	19.075.276,00	247.203.500,00
8	Pajak Air Tanah	5.700.000,00	216.049,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	164.730.711,50	5.700.000,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	80.412.923.014,00	77.278.617.304,00
	JUMLAH	81.502.715.912,50	78.393.726.958,50

Piutang Pajak Daerah terendah adalah Pajak Penerangan Jalan senilai **Rp179.400,00** dan Piutang Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

tertinggi adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) senilai **Rp80.412.923.014,00**.

7.1.1.6.2 Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak Daerah tahun 2020 senilai **(Rp50.096.970.677,01)** merupakan penyisihan piutang pajak tak tertagih untuk tahun 2020. Rincian Penyisihan Piutang Pajak terdapat dalam Lampiran 7.3.

7.1.1.6.3 Piutang Pajak Netto

Piutang Pajak Netto tahun 2020 senilai **Rp31.405.745.235,49** merupakan selisih dari Piutang Pajak dengan Penyisihan Piutang Pajak.

7.1.1.11 Piutang Retribusi

7.1.1.7.1 Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 senilai **Rp3.854.137.000,00** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp2.882.423.000,00**. Piutang Retribusi sebagai berikut:

Tabel 7.7
Piutang Retribusi Daerah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	Dinas Kesehatan	3.807.502.000,00	2.830.988.000,00
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	46.635.000,00	51.435.000,00
	JUMLAH	3.854.137.000,00	2.882.423.000,00

Piutang Retribusi senilai **Rp3.807.502.000,00** pada Dinas Kesehatan merupakan pendapatan atas jasa pelayanan kesehatan yang belum diterima pembayarannya berupa klaim Dana Non Kapitasi pada BPJS senilai **Rp3.805.302.000,00** dan PT Indocement senilai **Rp2.200.000,00**.

Klaim Dana Non Kapitasi pada BPJS senilai **Rp3.805.302.000,00** merupakan angka klaim bulan Agustus 2020 senilai **Rp704.813.000,00**, September 2020 senilai **Rp744.868.000,00**, Oktober 2020 senilai **Rp782.789.000,00**, November 2020 senilai **Rp780.063.000,00** dan Desember 2020 senilai **Rp792.769.000,00**.

Piutang Retribusi senilai **Rp46.635.000,00** pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan pendapatan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Batik Weru senilai **Rp46.635.000,00** yang belum diterima per 31 Desember 2020.

7.1.1.7.2 Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi pada tahun 2020 adalah senilai **(Rp50.609.845,00)**. Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 7.8
Penyisihan Piutang Retribusi

NO	URAIAN	PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG
1	Dinas Kesehatan		
	<1 Tahun	3.807.502.000,00	(3.974.845,00)
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	> 1 Tahun	46.635.000,00	(46.635.000,00)
	JUMLAH	3.854.137.000,00	(50.609.845,00)

7.1.1.7.3 Piutang Retribusi Netto

Piutang Retribusi Netto per 31 Desember 2020 senilai **Rp3.803.527.155,00** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp2.639.413.025,00** merupakan selisih dari Piutang Retribusi dengan Penyisihan Piutang Retribusi.

7.1.1.12 Piutang BLUD

7.1.1.8.1 Piutang BLUD

Saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2020 senilai **Rp33.204.444.664,00** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp59.267.828.827,00**. Saldo Piutang BLUD merupakan Piutang Jamkesda dan Piutang JKN yang terdapat di RSUD Arjawinangun dan RSUD Waled. Piutang BLUD sebagai berikut:

Tabel 7.9
Rincian Piutang BLUD

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
A	RSUD Arjawinangun		
1	Piutang JKN	14.581.551.011,00	29.836.578.605,00
2	Jamkesda	1.189.005.800,00	1.032.004.700,00
3	COVID 19	4.047.273.300,00	-
4	Piutang Pihak ketiga	400.396.935,00	485.509.151,00
	JUMLAH A	20.218.227.046,00	31.354.092.456,00
B	RSUD Waled		
1	Piutang JKN	13.170.967.100,00	28.208.700.947,00
2	Jamkesda	2.004.633.514,00	940.778.356,00
3	Piutang Pihak ketiga	998.697.618,00	737.040.124,00
	JUMLAH B	16.174.298.232,00	29.886.519.427,00
	JUMLAH A+B	36.392.525.278,00	61.240.611.883,00
	Jamkesda Dinas Kesehatan	(3.188.080.614,00)	(1.972.783.056,00)
	JUMLAH	33.204.444.664,00	59.267.828.827,00

Piutang Jamkesda senilai **Rp3.188.080.614,00** merupakan tagihan RSUD kepada Dinas Kesehatan, pada laporan keuangan konsolidasi tidak disajikan dengan mengeliminasi utang belanja jasa Dinas Kesehatan dengan nilai yang sama. Piutang senilai **Rp2.004.633.514,00** pada RSUD Waled merupakan piutang jamkesda Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Cirebon senilai **Rp1.999.074.814,00** dan piutang jamkesda Kabupaten Brebes senilai **Rp5.558.700,00**.

7.1.1.8.2 Penyisihan Piutang BLUD

Penyisihan Piutang BLUD per 31 Desember tahun 2020 senilai (**Rp1.576.257.781,17**) dan per 31 Desember 2019 senilai (**Rp568.700.890,97**). Perhitungan Penyisihan Piutang BLUD sebagai berikut:

Tabel 7.10
Penyisihan Piutang BLUD

NO	URAIAN	PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG
1	RSUD Arjawinangun		
	<1 Tahun	19.817.830.111,00	(99.089.150,56)
2	>1 Tahun	400.396.935,00	(40.039.693,50)
	JUMLAH	20.218.227.046,00	(139.128.844,06)
	RSUD Waled		
	<1 Tahun	14.811.225.422,00	(74.056.127,11)
	>1 Tahun	1.363.072.810,00	(1.363.072.810,00)
	JUMLAH	16.174.298.232,00	(1.437.128.937,11)
	JUMLAH KESELURUHAN	36.392.525.278,00	(1.576.257.781,17)

7.1.1.8.3 Piutang BLUD Netto

Piutang BLUD Netto per 31 Desember 2020 senilai **Rp31.628.186.882,83** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp58.699.127.936,03** merupakan selisih antara Piutang BLUD dengan Penyisihan Piutang BLUD.

7.1.1.13 Piutang Transfer

7.1.1.9.1 Piutang Transfer

Piutang Transfer per 31 Desember 2020 senilai **Rp33.517.940.730,00** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp55.667.233.746,00**. Piutang Transfer merupakan pengakuan kurang bayar pendapatan transfer atas pendapatan bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Pengakuan nilai piutang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK No.25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar, Lebih Bayar, dan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2021 dan berdasarkan Keputusan Gubernur No.973/Kep.160-Bapenda/2021. Piutang Pendapatan Transfer sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 7.11
Piutang Pendapatan Transfer

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020
1	TRANSFER PUSAT	
	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21, 25/29	8.160.194.300,00
	DBH PBB Pertambangan	3.721.426.160,00
	DBH PBB Umum	274.894.900,00
	DBH PBB Perhutanan	76.643.100,00
	DBHCHT	422.015.604,00
	DBH SDA Minyak Bumi	131.844.900,00
	DBH SDA Pertambangan Umum	32.858.100,00
	DBH SDA Gas Bumi	13.142.100,00
	DBH SDA Panas Bumi	1.637.984.125,00
	DBH SDA Provisi Sumber Daya Hutan	20.952.425,00
	DBH SDA Pungutan Hasil Perikanan	316.881.000,00
	JUMLAH	14.808.836.714,00
2	TRANSFER PROVINSI	
	Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.310.642.295,00
	Dana Bagi Hasil Pajak BBNKB	1.932.824.790,00
	Dana Bagi Hasil Pajak PBBKB	5.896.881.480,00
	Dana Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	69.354.500,00
	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	7.499.400.951,00
	JUMLAH	18.709.104.016,00
	JUMLAH KESELURUHAN	33.517.940.730,00

Mutasi Piutang Transfer sebagai berikut:

Tabel 7.12
Mutasi Piutang Transfer

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	TRANSFER PUSAT	
	Saldo 31 Desember 2019	40.865.973.807,00
	Penerimaan Pembayaran Piutang	(40.865.973.807,00)
	Piutang 2020	14.808.836.714,00
	Saldo 31 Desember 2020	14.808.836.714,00
2	TRANSFER PROVINSI	
	Saldo 31 Desember 2019	14.801.259.939,00
	Penerimaan Pembayaran Piutang	(108.036.311.842,00)
	Koreksi	93.235.051.903,00
	Piutang 2020	18.709.104.016,00
	Saldo 31 Desember 2020	18.709.104.016,00
	JUMLAH KESELURUHAN	33.517.940.730,00

7.1.1.9.2 Penyisihan Piutang Transfer

Penyisihan Piutang Transfer per 31 Desember 2020 senilai **(Rp167.589.703,65)** dan per 31 Desember 2019 senilai **(Rp278.336.168,74)**.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 7.13
Perhitungan Penyisihan Piutang Transfer

NO	URAIAN	PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG
1	Penyisihan Piutang Transfer	33.517.940.730,00	(167.589.703,65)
	JUMLAH	33.517.940.730,00	(167.589.703,65)

7.1.1.9.3 Piutang Transfer Netto

Piutang Transfer Netto per 31 Desember 2020 senilai **Rp33.350.351.026,35** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp55.388.897.577,26**. Piutang Transfer Netto merupakan selisih antara Piutang Transfer dengan Penyisihan Piutang Transfer.

7.1.1.14 Piutang Pendapatan Lainnya

7.1.1.10.1 Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2020 senilai **Rp1.871.359.509,00** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp1.805.063.257,00**. Piutang pendapatan lainnya sebagai berikut:

Tabel 7.14
Piutang Pendapatan Lainnya

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	LUEP	363.500.000,00	363.500.000,00
2	PD BPR	146.923.050,00	146.923.050,00
3	PT TASPEN	134.659.516,00	46.993.400,00
4	Piutang Bunga Deposito	-	21.369.864,00
5	Penjualan Tanah	993.583.943,00	993.583.943,00
6	Penjualan Kendaraan	232.693.000,00	232.693.000,00
	JUMLAH	1.871.359.509,00	1.805.063.257,00

Mutasi piutang pendapatan lainnya sebagai berikut:

Tabel 7.15
Mutasi Piutang Pendapatan Lainnya

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Piutang LUEP	
	Saldo 31 Desember 2019	363.500.000,00
	Penerimaan Pembayaran Piutang	-
	Saldo 31 Desember 2020	363.500.000,00
2	Piutang PD BPR	
	Saldo 31 Desember 2019	146.923.050,00
	Penerimaan Pembayaran Piutang	-
	Saldo 31 Desember 2020	146.923.050,00
3	Piutang PT TASPEN	
	Saldo 31 Desember 2019	46.993.400,00
	Piutang 2020	182.022.222,00
	Penerimaan Pembayaran Piutang	(94.356.106,00)
	Saldo 31 Desember 2020	134.659.516,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 7.15
Mutasi Piutang Pendapatan Lainnya

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
4	Piutang Bunga Deposito	
	Saldo 31 Desember 2019	21.369.864,00
	Penerimaan Pembayaran Piutang	(21.369.864,00)
	Saldo 31 Desember 2020	-
5	Penjualan Tanah	
	Saldo 31 Desember 2019	993.583.943,00
	Piutang 2020	-
	Saldo 31 Desember 2020	993.583.943,00
6	Penjualan Kendaraan	
	Saldo 31 Desember 2019	232.693.000,00
	Piutang 2020	-
	Saldo 31 Desember 2020	232.693.000,00

Rincian Piutang kepada PT.TASPEN terdapat dalam Lampiran 7.4.

7.1.1.10.2 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya

Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2020 senilai **(Rp1.737.373.290,58)** dan per 31 Desember 2019 senilai **(Rp1.736.934.960,00)** Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya sebagai berikut:

Tabel 7.16
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya

NO	URAIAN	PIUTANG	PENYISIHAN PIUTANG
1	LUEP	363.500.000,00	(363.500.000,00)
2	PD BPR	146.923.050,00	(146.923.050,00)
3	PT TASPEN	134.659.516,00	(673.297,58)
4	Penjualan Tanah	993.583.943,00	(993.583.943,00)
5	Penjualan Kendaraan	232.693.000,00	(232.693.000,00)
	JUMLAH	1.871.359.509,00	(1.737.373.290,58)

7.1.1.10.3 Piutang Pendapatan Lainnya Netto

Piutang Pendapatan Lainnya Netto pada tahun 2020 senilai **Rp133.986.218,42** merupakan selisih antara Piutang Pendapatan Lainnya dengan Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya.

7.1.1.15 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 senilai **Rp2.198.236.135,00** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp1.954.330.185,00**. Perhitungan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 7.17
Perhitungan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

NO	URAIAN	JUMLAH
	Saldo 2019	1.954.330.185,00
1	Tuntutan Ganti Rugi 2020 :	225.787.400,00
	SKTJM tanggal 18 Juni 2020	12.900.000,00
	SKTJM tanggal 29 Juli 2020	17.300.000,00
	SKTJM tanggal 06 Agustus 2020	8.500.000,00
	SKTJM tanggal 06 Agustus 2020	129.000.000,00
	SKTJM tanggal 29 Desember 2020	25.000.000,00
	SKTJM tanggal 29 Desember 2020	33.087.400,00
2	Penerimaan 2020	(20.725.000,00)
	Tunai	(20.725.000,00)
3	Koreksi 2020	38.843.550,00
	Saldo 2020	2.198.236.135,00

Koreksi Tuntutan Ganti Rugi senilai **Rp38.843.550,00** merupakan koreksi pencatatan atas SKTJM yang bukan tahun 2020 namun belum tercatat di piutang. Rincian perkembangan penyelesaian kerugian daerah terdapat dalam Lampiran 7.5.

7.1.1.16 Biaya Dibayar Dimuka

Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 senilai **Rp1.597.295.066,64** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp1.513.577.708,06** merupakan penyesuaian atas belanja jasa dan sewa yang belum jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2020. Biaya Dibayar Dimuka sebagai berikut:

Tabel 7.18
Biaya Dibayar Dimuka

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019 AUDITED
	Biaya Jasa Dibayar Dimuka		
1	Asuransi Kebakaran	384.926.250,00	200.241.340,00
2	Jasa KIR	5.307.400,00	8.289.974,99
3	Pajak Kendaraan Bermotor	474.142.816,68	456.285.275,01
4	Sertifikasi	3.975.000,00	1.575.000,00
5	Premi Asuransi Barang Milik Daerah	406.872.599,16	456.908.335,00
	Biaya Sewa Dibayar Dimuka		
1	Gedung/Kantor/Tempat	322.071.000,80	390.277.783,06
	JUMLAH	1.597.295.066,64	1.513.577.708,06

Rincian saldo Biaya Dibayar Dimuka per SKPD disajikan dalam Lampiran 7.6.

7.1.1.17 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2020 senilai **Rp66.512.942.245,07** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp51.612.326.166,78** merupakan hasil *stock opname* Bendahara Barang SKPD dengan metode periodik sesuai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran, penilaian dan pencatatan persediaan menggunakan metode periodik. Persediaan sebagai berikut:

Tabel 7.19
Persediaan

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019 AUDITED
1	Persediaan Bahan Pakai Habis	5.083.053.050,26	3.429.819.384,82
2	Persediaan Bahan/Material	47.221.877.150,81	33.312.547.273,96
3	Persediaan Barang Lainnya	14.208.012.044,00	14.869.959.508,00
	JUMLAH	66.512.942.245,07	51.612.326.166,78

Rincian Persediaan per SKPD beserta jenis persediaannya terdapat dalam Lampiran 7.7.

5.1.5 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 senilai **Rp169.100.164.376,17** merupakan investasi yang dimiliki sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri dari Investasi Non Permanen senilai **Rp14.075.000.000,00** dengan nilai bersih **Rp7.099.219.101,00** dan Investasi Permanen senilai **Rp162.000.945.275,17**.

7.1.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 senilai **Rp7.099.219.101,00** yang merupakan nilai bersih dari dana bergulir senilai **Rp14.075.000.000,00** dikurangi dengan dana bergulir yang diragukan tertagih senilai **(Rp6.975.780.899,00)**. Investasi Non Permanen sebagai berikut:

Tabel 7.20
Investasi Non Permanen

NO	SEKTOR	DANA AWAL	DIRAGUKAN TERTAGIH	NILAI BERSIH DAPAT DIREALISASIKAN
1	2	3	4	5 = (3 - 4)
	Rekapitulasi Nilai Bersih Dana Bergulir			
I	Kredit Program Bantuan/KPB (Bagian Perekonomian Setda)			
1	Peternakan	2.001.000.000,00	1.188.599.805,00	812.400.195,00
2	Perkebunan	900.000.000,00	211.105.000,00	688.895.000,00
3	Pertanian	1.599.000.000,00	581.619.167,00	1.017.380.833,00
4	Perikanan	1.000.000.000,00	386.057.886,00	613.942.114,00
5	Koperasi	1.500.000.000,00	522.058.183,00	977.941.817,00
6	Indag	2.450.000.000,00	865.150.198,00	1.584.849.802,00
	JUMLAH	9.450.000.000,00	3.754.590.239,00	5.695.409.761,00
II	Dana Kredit Modal Bantuan Lunak Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Disperindag)			
1	Industri & Perdagangan	2.000.000.000,00	1.708.401.552,00	291.598.448,00
	JUMLAH	2.000.000.000,00	1.708.401.552,00	291.598.448,00
III	Dana Kredit Modal Bantuan Usaha Kecil Dan Menengah Di Sektor Koperasi & UKM (Dinas Koperasi & UKM)			
1	Koperasi/UKM	1.500.000.000,00	1.146.027.314,00	353.972.686,00
	JUMLAH	1.500.000.000,00	1.146.027.314,00	353.972.686,00
IV	Program Dakabalarea (Bagian Perekonomian Setda)			
1	Industri & Perdagangan	1.067.400.000,00	334.212.794	733.187.206,00
2	Peternakan	45.100.000,00	25.875.000	19.225.000,00
3	Perikanan	12.500.000,00	6.674.000	5.826.000,00
	JUMLAH	1.125.000.000,00	366.761.794,00	758.238.206,00
	JUMLAH KESELURUHAN	14.075.000.000,00	6.975.780.899,00	7.099.219.101,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Perhitungan nilai bersih dari dana bergulir sebagai berikut:

- Saldo 2019 Rp14.075.000.000,00
- Dana Bergulir Diragukan Tertagih (Rp6.975.780.899,00)
- Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan Rp7.099.219.101,00

7.1.2.1.1 Dana Bergulir

Dana bergulir per 31 Desember 2020 senilai **Rp14.075.000.000,00** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp14.075.000.000,00**. Dana Bergulir sebagai berikut:

Tabel 7.21
Dana Bergulir

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	Kredit Program Bantuan /KPB (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah)	9.450.000.000,00	9.450.000.000,00
2	Program Dakabalarea (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah)	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00
3	Dana Kredit Modal Bantuan Lunak Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
4	Dana Kredit Modal Bantuan Usaha Kecil dan Menengah Di Sektor Koperasi dan UKM (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	JUMLAH	14.075.000.000,00	14.075.000.000,00

Dana bergulir senilai **Rp14.075.000.000,00** merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon berupa :

- Kredit Program Bantuan (KPB) yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
- Program Dakabalarea yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
- Dana kredit modal bantuan lunak pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Dana kredit modal bantuan usaha kecil dan menengah di sektor koperasi & UKM yang dikelola oleh Dinas Koperasi & UKM.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

7.1.2.1.2 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih sampai dengan 31 Desember 2020 senilai **Rp6.975.780.899,00** tersebut pada umumnya disebabkan oleh:

- Omset usaha yang mengalami penurunan;
- Sebagian penerima dana guliran beralih usaha;
- Penggunaan dana guliran yang tidak sesuai dengan peruntukan proposal awal;
- Sistem tanggung renteng yang tidak berjalan sesuai dengan perjanjian;
- Mengalami kerugian dalam usaha usaha yang kolep/bangkrut;
- Kelompok penerima kredit bubar dan tidak ada yang bertanggungjawab untuk pengembalian dana bergulirnya;
- Adanya pemahaman yang salah dari masyarakat/ nasabah tentang dana bergulir, yang beranggapan bahwa dana bergulir bukan merupakan kredit yang harus dikembalikan, akan tetapi merupakan hibah dari pemerintah walaupun sudah diberikan sosialisasi;
- Tidak dapat mengelola usaha dengan baik.

Adapun upaya yang akan dilakukan dalam penanganan dana bergulir/macet sebagai berikut:

- Melakukan monitoring ke nasabah dengan dibuat berita acara kunjungan yang berisi tentang kesanggupan nasabah untuk menyelesaikan dana bergulir (Kredit Macet);
- Memberikan surat teguran ke nasabah;
- Koordinasi dengan pihak BPR.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebagai berikut:

Tabel 7.22
Dana Bergulir Diragukan Tertagih

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	Kredit Program Bantuan/KPB (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah)	3.754.590.239,00	3.758.764.174,00
2	Program Dakabalarea (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah)	366.761.794,00	367.361.794,00
3	Dana Kredit Modal Bantuan Lunak Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	1.708.401.552,00	1.694.703.052,00
4	Dana Kredit Modal Bantuan Usaha Kecil Dan Menengah di Sektor Koperasi dan UKM (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)	1.146.027.314,00	1.182.527.814,00
	JUMLAH	6.975.780.899,00	7.003.356.834,00

7.1.2.2 Investasi Permanen

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2020 senilai **Rp162.000.945.275,17** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp111.309.190.117,37**. Investasi Permanen sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 7.23
Investasi Permanen

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	PT Bank Jabar Banten, Tbk.	18.175.151.700,00	18.175.151.700,00
2	PD BPR	88.551.476.522,17	72.728.107.264,16
3	PDAM Kabupaten Cirebon	55.274.317.053,00	20.405.931.153,21
	JUMLAH	162.000.945.275,17	111.309.190.117,37

7.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah

Penyertaan Modal Pemerintah per 31 Desember 2020 senilai **Rp162.000.945.275,17** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp111.309.190.117,37**. Mutasi Penyertaan Modal sebagai berikut:

Tabel 7.24
Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah

NO	URAIAN	JUMLAH
	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH	
1	PT BANK JABAR BANTEN, TBK	
	Saldo 31 Desember 2019	18.175.151.700,00
	Penambahan Tahun 2020	-
	Saldo 31 Desember 2020	18.175.151.700,00
2	PD BPR	
	Saldo 31 Desember 2019	37.469.674.000,00
	Penambahan Tahun 2020	-
	Saldo 31 Desember 2020	37.469.674.000,00
3	PDAM	
	Saldo 31 Desember 2019	64.473.331.277,00
	Penambahan Tahun 2020	43.427.867.900,47
	Saldo 31 Desember 2020	107.901.199.177,47
	JUMLAH	163.546.024.877,47

Metode penilaian investasi yang digunakan adalah metode biaya (*cost methode*), karena persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Cirebon di PT Bank Jabar Banten, Tbk. kurang dari 20%.

PD BPR terdiri atas PD BPR Astanajapura dan PD BPR Babakan. Saldo penyertaan modal pada PD BPR dan PDAM pada Tahun 2020 dan Tahun 2019 disajikan berdasarkan metode ekuitas yang dihitung dari total ekuitas masing-masing PD BPR dan dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada PD BPR yang bersangkutan. Perhitungan nilai penyertaan modal pemerintah dan Laporan Keuangan PDAM dan PD. BPR terdapat dalam Lampiran 7.8.

5.1.6 Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2020 senilai **Rp3.832.329.871.988,21** per 31 Desember 2019 senilai **Rp3.928.433.010.727,88**. Aset Tetap sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 7.25
Aset Tetap

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	Tanah	517.118.488.387,50	501.381.974.209,50
2	Peralatan dan Mesin	968.951.924.847,90	914.141.459.232,59
3	Gedung dan Bangunan	1.717.013.576.398,14	1.713.774.986.704,72
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.366.679.541.930,50	2.253.204.498.585,58
5	Aset Tetap Lainnya	290.390.555.706,09	354.811.110.032,09
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	287.860.760.869,36	251.362.030.261,36
7	Akumulasi Penyusutan	(2.315.684.976.151,28)	(2.060.243.048.297,96)
	JUMLAH	3.832.329.871.988,21	3.928.433.010.727,88

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel 7.26
Mutasi Aset Tetap

ASET TETAP	SALDO 31 DESEMBER 2019	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO 31 DESEMBER 2020
Tanah	501.381.974.209,50	17.217.384.178,00	(1.480.870.000,00)	517.118.488.387,50
Peralatan dan Mesin	914.141.459.232,59	165.662.134.744,50	(110.851.669.129,19)	968.951.924.847,90
Gedung dan Bangunan	1.713.774.986.704,72	104.576.781.711,00	(101.338.192.017,58)	1.717.013.576.398,14
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.253.204.498.585,58	120.115.097.672,44	(6.640.054.327,52)	2.366.679.541.930,50
Aset Tetap Lainnya	354.811.110.032,09	483.223.906,00	(64.903.778.232,00)	290.390.555.706,09
Konstruksi Dalam Pengerjaan	251.362.030.261,36	36.791.920.508,00	(293.189.900,00)	287.860.760.869,36
Akumulasi Penyusutan	(2.060.243.048.297,96)	(376.247.526.694,32)	120.805.598.841,00	(2.315.684.976.151,28)
JUMLAH	3.928.433.010.727,88	68.599.016.025,62	(164.702.154.765,29)	3.832.329.871.988,21

Penjelasan mutasi masing-masing Aset Tetap sebagai berikut:

7.1.3.1 Tanah

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 senilai **Rp517.118.488.387,50** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp501.381.974.209,50**. Aset Tetap Tanah per jenis sebagai berikut:

Tabel 7.27
Aset Tetap Tanah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	Tanah Perkampungan	10.356.978.300,00	10.356.978.300,00
2	Tanah Pertanian	3.470.400.228,00	2.558.131.050,00
3	Tanah Perkebunan	119.960.000,00	119.960.000,00
4	Kolam Ikan	465.535.500,00	465.535.500,00
5	Tanah Untuk Bangunan Gedung	469.307.709.734,50	464.324.154.734,50
6	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	33.397.904.625,00	23.557.214.625,00
	JUMLAH	517.118.488.387,50	501.381.974.209,50

Mutasi Aset Tetap Tanah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 7.28
Mutasi Aset Tetap Tanah

NO	URAIAN	JUMLAH
	Saldo Per 31 Desember 2019	501.381.974.209,50
	Mutasi Tambah :	17.217.384.178,00
1	Hibah	9.949.508.000,00
2	Koreksi Nilai	7.267.876.178,00
	Mutasi Kurang :	(1.480.870.000,00)
1	Koreksi Nilai	(1.480.870.000,00)
	Saldo Per 31 Desember 2020	517.118.488.387,50

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah terdiri dari :

1. Hibah

Mutasi Aset Tetap Tanah dari hibah tahun 2020 senilai **Rp9.949.508.000,00** berupa penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020. Rincian hibah terdapat dalam Lampiran 7.9.

2. Koreksi

Mutasi Aset Tetap Tanah dari koreksi tahun 2020 senilai **Rp7.267.876.178,00** berupa koreksi nilai pencatatan tanah baru hasil penelusuran senilai **Rp6.329.238.178,00** serta koreksi nilai tanah pada Dinas Pertanian senilai **Rp938.638.000,00**. Rincian pencatatan baru tanah hasil penelusuran terdapat dalam Lampiran 7.9.

Mutasi kurang Aset Tetap Tanah terdiri dari :

1. Koreksi

Mutasi Aset Tetap Tanah dari koreksi nilai tahun 2020 senilai **(Rp1.480.870.000,00)** karena duplikasi pencatatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Mutasi antar unit terdiri dari :

Mutasi antar unit pada Aset Tetap Tanah berupa tranfer masuk senilai **Rp18.874.355.800,00** dan transfer keluar senilai **(Rp18.874.355.800,00)**.

7.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 **Rp968.951.924.847,90** senilai dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp914.141.459.232,59**. Aset Tetap Peralatan dan Mesin per jenis sebagai berikut :

Tabel 7.29
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	Alat-Alat Besar Darat	24.042.853.082,00	27.973.429.595,00
2	Alat-alat Bantu	15.401.580.322,72	14.715.227.283,39
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	194.827.622.060,20	187.239.718.851,15



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
4	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	8.368.719.409,36	8.335.732.583,99
5	Alat Angkut Apung Bermotor	86.785.000,00	86.785.000,00
6	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	547.816.500,00	547.816.500,00
7	Alat Angkut Bermotor Udara	2.400.000,00	4.350.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	1.352.901.443,31	1.559.853.064,42
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	661.969.457,00	605.193.230,00
10	Alat Ukur	4.850.257.244,64	4.336.044.301,82
11	Alat Pengolahan	5.465.336.406,69	5.649.446.311,17
12	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	2.491.916.280,65	2.655.844.887,14
13	Alat Kantor	48.567.468.539,85	48.527.860.113,57
14	Alat Rumah Tangga	125.962.296.929,41	121.353.940.260,62
15	Komputer	107.799.846.523,73	109.729.547.479,86
16	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.274.718.225,62	8.054.933.373,43
17	Alat Studio	15.858.432.944,35	16.221.584.985,10
18	Alat Komunikasi	11.807.218.147,55	5.600.959.361,52
19	Peralatan Pemancar	129.141.882,00	160.338.453,15
20	Alat Kedokteran	326.248.363.978,44	278.435.452.755,26
21	Alat Kesehatan	918.202.634,00	947.161.234,00
22	Unit-Unit Laboratorium	38.438.203.664,38	36.128.352.833,00
23	Alat Peraga/Praktek Sekolah	20.671.795.397,00	28.913.031.542,00
24	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	886.755.334,00	916.715.334,00
25	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	2.073.633.630,00	2.155.750.153,00
26	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	382.100.714,00	388.776.054,00
27	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	615.359.999,00	540.159.999,00
28	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.406.131.102,00	1.359.589.696,00
29	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	486.824.623,00	654.305.864,00
30	Senjata Api	86.449.373,00	90.454.133,00
31	Persenjataan Non Senjata Api	233.344.000,00	247.624.000,00
32	Senjata Sinar	5.480.000,00	5.480.000,00
	JUMLAH	968.951.924.847,90	914.141.459.232,59

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 7.30
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	JUMLAH
	Saldo Per 31 Desember 2019	914.141.459.232,59
	Mutasi Tambah :	165.662.134.744,50
1	Belanja Modal Tahun 2020	133.412.280.354,56
2	Hibah	1.009.000.000,00
3	Reklasifikasi	27.312.750.076,94
4	Koreksi	3.308.887.813,00
5	Utang Belanja Modal	619.216.500,00
	Mutasi Kurang :	(110.851.669.129,19)
1	Reklasifikasi	(92.031.242.950,49)
2	Hibah	(970.960.000,00)
3	Koreksi	(14.305.166.167,20)
4	Penghapusan	(3.326.678.311,50)
5	Pembayaran Utang Belanja Modal	(217.621.700,00)
	Saldo Per 31 Desember 2020	968.951.924.847,90



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari :

1. Belanja Modal

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari pengadaan tahun 2020 senilai **Rp133.412.280.354,56**. Rincian belanja modal per SKPD terdapat dalam Lampiran 7.10.

2. Hibah

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari hibah tahun 2020 senilai **Rp1.009.000.000,00** terdiri dari Hibah senilai **Rp959.000.000,00** yang diterima Dinas Kesehatan berupa alat test *PCR Portable* dari Provinsi Jawa Barat serta senilai **Rp50.000.000,00** berupa hibah personal computer dan kelengkapannya dari Bank BJB kepada BKPSDM.

3. Reklasifikasi

Reklasifikasi belanja modal aset peralatan dan mesin senilai **Rp27.312.750.076,94** dari:

- Belanja Operasional terkapital senilai **Rp12.392.614.085,43**;
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai **Rp 674.339.000,00**;
- Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan senilai **Rp17.298.200,00**;
- Serta reklas masuk hasil sensus senilai **Rp14.228.498.791,51**.

4. Koreksi

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari koreksi tahun 2020 senilai **Rp3.308.887.813,00** berupa koreksi nilai pencatatan aset tetap Peralatan dan Mesin hasil sensus.

5. Utang Belanja Modal

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari utang belanja modal senilai **Rp619.216.500,00** terdapat pada RSUD Waled senilai **Rp55.660.000,00** dan RSUD Arjawinangun senilai **Rp563.556.500,00**. Rincian utang belanja modal Rumah Sakit terdapat dalam lampiran 7.10.

Mutasi kurang aset tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari :

1. Reklasifikasi

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi keluar tahun 2020 senilai (**Rp92.031.242.950,49**) terdiri dari:

- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi senilai (**Rp5.418.126.257,00**);
- Aset Gedung dan Bangunan senilai (**Rp279.437.156,00**);
- Aset Jalan Irigasi dan Jaringan senilai (**Rp771.624.580,00**);
- Aset Tetap Lainnya senilai (**Rp5.850.000,00**);
- Aset Tak Berwujud senilai (**Rp960.404.825,00**);



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- Hasil sensus senilai **(Rp82.664.375.651,49)**;
- Belanja Operasional senilai **(Rp1.931.424.481,00)**.

2. Hibah

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari hibah keluar tahun 2020 senilai **(Rp970.960.000,00)** berupa hibah PPKD kepada desa berupa kendaraan bermotor.

3. Koreksi

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari koreksi keluar tahun 2020 senilai **(Rp14.305.166.167,20)** berupa koreksi nilai pencatatan hasil sensus berupa barang-barang yang nilai perolehannya dibawah kapitalisasi atau barang habis pakai.

4. Penghapusan

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari penghapusan tahun 2020 senilai **(Rp3.326.678.311,50)** berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon. Rincian penghapusan per SKPD terdapat pada lampiran 7.10.

5. Pembayaran Utang Belanja Modal

Merupakan belanja modal yang telah dikapitaliasi ditahun 2019 senilai belanja modal senilai **Rp217.621.700,00** terdapat pada dua Rumah Sakit.

Mutasi antar Unit terdiri dari :

Mutasi antar unit pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa tranfer masuk senilai **Rp14.604.757.395,00** dan transfer keluar senilai **(Rp14.604.757.395,00)**.

7.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 senilai **Rp1.717.013.576.398,14** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp1.713.774.986.704,72**. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per jenis sebagai berikut:

Tabel 7.31
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.677.205.677.984,22	1.676.498.658.923,87
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	25.034.738.222,47	22.933.460.000,47
3	Bangunan Menara	1.133.183.901,10	1.242.824.135,03
4	Bangunan Bersejarah	49.900.000,00	49.900.000,00
5	Tugu Peringatan	2.760.672.953,35	2.760.672.953,35
6	Monumen/Bangunan Bersejarah	1.591.858.080,00	1.591.858.080,00
7	Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.105.542.673,00	1.915.141.478,00
8	Rambu-Rambu	7.132.002.584,00	6.782.471.134,00
	JUMLAH	1.717.013.576.398,14	1.713.774.986.704,72



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 7.32
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	JUMLAH
	Saldo Per 31 Desember 2019	1.713.774.986.704,72
	Mutasi Tambah :	104.576.781.711,00
1	Belanja Modal Tahun 2020	90.175.480.974,00
2	Hibah	1.914.975.000,00
3	Reklasifikasi	8.034.310.530,00
4	Koreksi	4.452.015.207,00
	Mutasi Kurang :	(101.338.192.017,58)
1	Reklasifikasi	(100.397.003.798,58)
2	Koreksi	(57.668.750,00)
3	Penghapusan	(883.519.469,00)
	Saldo Per 31 Desember 2020	1.717.013.576.398,14

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa :

1. Belanja Modal

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari pengadaan tahun 2020 senilai **Rp90.175.480.974,00**. Rincian belanja modal per SKPD terdapat dalam Lampiran 7.11.

2. Hibah

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari hibah tahun 2020 senilai **Rp1.914.975.000,00** berupa penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2020. Rincian hibah terdapat dalam Lampiran 7.11.

3. Reklasifikasi

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi masuk tahun 2020 senilai **Rp8.034.310.530,00** terdiri dari:

- Belanja Operasional terkapital senilai **Rp4.148.037.197,00**;
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai **Rp279.437.156,00**;
- Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai senilai **Rp48.800.000,00**;
- Hasil sensus senilai **Rp3.558.036.177,00**.

4. Koreksi

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari koreksi masuk tahun 2020 senilai **Rp4.452.015.207,00** merupakan koreksi nilai hasil sensus berupa barang-barang yang nilai perolehannya dibawah kapitalisasi, koreksi nilai atau barang habis pakai.

Mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari :



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

1. Reklasifikasi

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi keluar tahun 2020 senilai **(Rp100.397.003.798,58)** terdiri dari:

- Belanja Modal tidak dikapitalisasi senilai **(Rp176.799.070,00)**;
- Terkapitaliasi menjadi Peralatan dan Mesin senilai **(Rp674.339.000,00)**;
- Terkapitaliasi menjadi Jalan Irigasi dan Jaringan senilai **(Rp3.100.159.743,00)**;
- Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai **(Rp33.690.679.208,00)**;
- Hasil sensus senilai **(Rp62.411.753.977,58)** baik berupa aset rusak berat dan aset lain-lain;
- Belanja Operasional senilai **(Rp343.272.800,00)**.

2. Koreksi

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari koreksi kurang tahun 2020 senilai **(Rp57.668.750,00)** berupa koreksi pencatatan aset tetap Gedung dan Bangunan yang nilai perolehannya dibawah batas kapitalisasi.

3. Penghapusan

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari penghapusan tahun 2020 senilai **(Rp883.519.469,00)** terdiri dari:

- Dinas Pendidikan senilai **(Rp647.361.989,00)**;
- RS Waled senilai **(Rp207.766.480,00)**;
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah senilai **(Rp28.391.000,00)**.

Mutasi antar unit pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa tranfer masuk senilai **Rp3.184.151.242,00** dan transfer keluar senilai **(Rp3.184.151.242,00)**.

7.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 senilai **Rp2.366.679.541.930,50** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp2.253.204.498.585,58**. Jalan, Irigasi dan Jaringan per jenis sebagai berikut:

Tabel 7.33
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	Jalan	1.872.480.106.962,00	1.808.609.290.177,00
2	Jembatan	14.270.114.462,00	14.301.360.719,00
3	Bangunan Air Irigasi	377.364.301.475,59	351.018.641.103,59
4	Bangunan Air Pasang Surut	45.685.000,00	45.685.000,00
5	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	7.888.140.866,00	7.122.371.301,00
6	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	282.433.821,00	267.433.821,00
7	Bangunan Air Bersih/Baku	635.582.164,00	635.582.164,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 7.33
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
8	Bangunan Air Kotor	4.803.281.083,00	2.861.037.300,00
10	Instalasi Air Minum Bersih	5.053.792.288,00	4.889.126.288,00
11	Instalasi Air Kotor	8.941.017.277,00	6.022.557.829,00
12	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	760.147.000,00	760.147.000,00
13	Instalasi Pembangkit Listrik	846.255.962,00	846.255.962,00
14	Instalasi Gardu Listrik	1.963.293.111,00	1.991.478.111,00
15	Instalasi Pertahanan	11.784.892.674,58	10.803.723.660,66
16	Instalasi Gas	1.079.969.435,00	884.689.240,00
17	Instalasi Pengaman	198.000.000,00	198.000.000,00
18	Jaringan Air Minum	15.095.366.362,00	20.981.892,00
19	Jaringan Listrik	42.301.246.116,00	41.069.037.146,00
20	Jaringan Telepon	885.915.871,33	857.099.871,33
	JUMLAH	2.366.679.541.930,50	2.253.204.498.585,58

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut :

Tabel 7.34
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	JUMLAH
	Saldo Per 31 Desember 2019	2.253.204.498.585,58
	Mutasi Tambah :	120.115.097.672,44
1	Belanja Modal Tahun 2020	72.994.260.369,44
2	Hibah	20.326.841.655,00
3	Reklasifikasi	25.388.975.648,00
4	Koreksi	1.405.020.000,00
	Mutasi Kurang :	(6.640.054.327,52)
1	Reklasifikasi	(6.049.535.104,52)
2	Koreksi	(590.519.223,00)
	Saldo Per 31 Desember 2020	2.366.679.541.930,50

Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari :

1. Belanja Modal

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari pengadaan tahun 2020 senilai **Rp72.994.260.369,44**. Rincian belanja modal per SKPD terdapat dalam lampiran 7.12.

2. Hibah

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari hibah tahun 2020 senilai **Rp20.326.841.655,00** berupa penyerahan prasarana, sarana dan utilitis perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020. Rincian hibah terdapat dalam Lampiran 7.12.

3. Reklasifikasi

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari reklasifikasi masuk tahun 2020 senilai **Rp25.388.975.648,00** terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- Belanja Operasi terkapital senilai **Rp21.144.077.639,00**;
- Belanja Gedung dan Bangunan senilai **Rp3.844.094.743,00**;
- Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai senilai **Rp173.299.900,00**;
- Hasil sensus senilai **Rp227.503.366,00**.

4. Koreksi

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari koreksi masuk tahun 2020 senilai **Rp1.405.020.000,00** penambahan nilai aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Pertanian .

Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari :

1. Reklasifikasi

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari reklasifikasi keluar tahun 2020 senilai **(Rp6.049.535.104,52)** terdiri dari:

- Belanja Modal tidak dikapitalisasi senilai **(Rp19.212.000,00)**
- Hasil sensus senilai **(Rp3.155.516.072,08)** baik berupa aset rusak berat dan aset lain-lain;
- Belanja Operasional senilai **(Rp2.874.807.032,44)**.

2. Koreksi

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari koreksi keluar tahun 2020 senilai **(Rp590.519.223,00)** merupakan koreksi nilai hasil sensus BMD tahun 2020.

Mutasi antar unit pada aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa tranfer masuk senilai **Rp18.679.922.821,00** dan transfer keluar senilai **(Rp18.679.922.821,00)**.

7.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar **Rp290.390.555.706,09** dan per 31 Desember tahun 2019 senilai **Rp354.811.110.032,09**. Rincian Aset Tetap Lainnya per jenis sebagai berikut:

Tabel 7.35
Aset Tetap Lainnya

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	Buku	102.784.033.783,00	166.524.038.925,00
2	Terbitan	139.539.838,00	293.801.558,00
3	Barang-Barang Perpustakaan	421.512.203,00	865.737.202,00
4	Barang Bercorak Kebudayaan	3.596.090.010,00	3.756.530.151,00
5	Alat Olah Raga Lainnya	12.936.000,00	14.041.000,00
6	Hewan	498.130.000,00	413.980.000,00
7	Tanaman	12.716.500,00	17.383.824,00
8	Aset Tetap Renovasi	182.925.597.372,09	182.925.597.372,09
	JUMLAH	290.390.555.706,09	354.811.110.032,09



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel 7.36
Mutasi Aset Tetap Lainnya

NO	URAIAN	JUMLAH
	Saldo Per 31 Desember 2019	354.811.110.032,09
	Mutasi Tambah :	483.223.906,00
1	Belanja Modal Tahun 2020	370.023.906,00
2	Reklasifikasi	9.750.000,00
3	Koreksi	103.450.000,00
	Mutasi Kurang :	(64.903.778.232,00)
1	Reklasifikasi	(63.544.121.119,00)
2	Koreksi	(1.347.273.013,00)
3	Penghapusan	(12.384.100,00)
	Saldo Per 31 Desember 2020	290.390.555.706,09

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya terdiri dari :

1. Belanja Modal

Mutasi Aset Tetap Lainnya dari pengadaan tahun 2020 senilai **Rp370.023.906,00**. Rincian belanja modal per SKPD terdapat dalam Lampiran 7.13.

2. Reklasifikasi

Mutasi Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi masuk tahun 2020 senilai **Rp9.750.000,00** terdiri dari:

- Belanja Operasi terkapital senilai **Rp3.200.000,00**
- Belanja Peralatan dan Mesin senilai **Rp5.850.000,00**
- Hasil sensus senilai **Rp700.000,00**

3. Koreksi

Mutasi Aset Tetap Lainnya dari koreksi masuk tahun 2020 senilai **Rp103.450.000,00** merupakan koreksi hasil sensus BMD berupa reklas dari BMD non Kapitalisasi dan hibah yang belum tercatat.

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

1. Reklasifikasi

Mutasi Aset Tetap Lainnya dari pengadaan tahun 2020 yang di reklasifikasi senilai **(Rp63.544.121.119,00)** terdiri dari:

- Reklas ke peralatan mesin non kapitalisasi senilai **(Rp272.000,00)**
- BMD peralatan dan mesin senilai **(Rp17.298.200,00)**
- Hasil sensus senilai **(Rp63.526.550.919,00)** baik berupa aset rusak berat dan aset lain-lain.

2. Koreksi

Mutasi Aset Tetap Lainnya dari pengadaan tahun 2020 yang di koreksi senilai **(Rp1.347.273.013,00)** koreksi nilai aset tetap lainnya hasil sensus.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

3. Penghapusan

Mutasi Aset Tetap Lainnya dari penghapusan tahun 2020 senilai **(Rp12.384.100,00)** berdasarkan hasil sensus.

7.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 senilai **Rp287.860.760.869,36** dan per 31 Desember 2019 sebesar **Rp251.362.030.261,36**. Konstruksi dalam Pengerjaan sebagai berikut:

Tabel 7.37
Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	287.860.760.869,36	251.362.030.261,36
	JUMLAH	287.860.760.869,36	251.362.030.261,36

Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan sebagai berikut:

Tabel 7.38
Mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan

NO	URAIAN	JUMLAH
	Saldo Awal Per 31 Desember 2019	251.362.030.261,36
	Mutasi Tambah :	36.791.920.508,00
1	Reklasifikasi	36.791.920.508,00
	Mutasi Kurang :	(293.189.900,00)
1	Reklasifikasi	(293.189.900,00)
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2020	287.860.760.869,36

Mutasi tambah Konstruksi dalam Pengerjaan terdiri dari:

1. Reklasifikasi

Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan dari reklasifikasi masuk tahun 2020 senilai **Rp36.791.920.508,00** terdiri dari:

- Belanja Operasi terkapital senilai **Rp3.101.241.300,00**;
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai **Rp33.690.679.208,00**.

Mutasi kurang Konstruksi dalam Pengerjaan terdiri dari:

1. Reklasifikasi

Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan dari reklasifikasi keluar tahun 2020 senilai **(Rp293.189.900,00)** ke Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan Terdiri dari:

- KDP yang sudah selesai senilai **(Rp222.099.900,00)**;
- Hasil Sensus senilai **(Rp65.340.000,00)**;
- Belanja Operasi senilai **(Rp5.750.000,00)**.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

7.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah **(Rp2.315.684.976.151,28)** dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah senilai **(Rp2.060.243.048.297,96)**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Metode Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel 7.39
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

NO	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU TAHUN 2020
1	Tanah	517.118.488.387,50	-	517.118.488.387,50
2	Peralatan dan Mesin	968.951.924.847,90	(677.280.013.080,64)	291.671.911.767,26
3	Gedung dan Bangunan	1.717.013.576.398,14	(413.629.506.153,50)	1.303.384.070.244,64
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.366.679.541.930,50	(1.224.775.456.917,14)	1.141.904.085.013,36
5	Aset Tetap Lainnya	290.390.555.706,09	-	290.390.555.706,09
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	287.860.760.869,36	-	287.860.760.869,36
	JUMLAH	6.148.014.848.139,49	(2.315.684.976.151,28)	3.832.329.871.988,21

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 7.40
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	JUMLAH
	Saldo Awal Per 31 Desember 2019	(660.850.976.478,19)
	Mutasi Tambah :	(109.331.130.360,86)
1	Reklasifikasi	(1.565.084.909,24)
2	Penyusutan Tahun 2020	(99.431.068.213,45)
3	Koreksi	(8.299.977.238,17)
5	Hibah	(35.000.000,00)
	Mutasi Kurang :	92.902.093.758,41
1	Reklasifikasi	67.964.542.629,53
2	Koreksi	20.683.547.681,67
3	Hibah	970.960.000,00
4	Penghapusan	3.283.043.447,21
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2020	(677.280.013.080,64)

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari:

1. Reklasifikasi Tahun 2020

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi masuk tahun 2020 senilai **(Rp1.565.084.909,24)** akibat reklasifikasi aset.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

2. Penyusutan Tahun 2020

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari perhitungan beban penyusutan tahun 2020 senilai **(Rp99.431.068.213,45)**.

3. Koreksi

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari koreksi terhadap perhitungan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun lalu senilai **(Rp8.299.977.238,17)**.

4. Hibah

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin merupakan hibah dari BJB kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia yang pencatatannya melalui PPKD senilai **(Rp35.000.000,00)**.

Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari:

1. Reklasifikasi

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi keluar tahun 2020 senilai **Rp67.964.542.629,53** akibat reklasifikasi aset.

2. Koreksi

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari koreksi terhadap perhitungan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun lalu senilai **Rp20.683.547.681,67**.

3. Hibah

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin merupakan hibah keluar PPKD senilai **Rp970.960.000,00**.

4. Penghapusan

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari penghapusan aset tetap peralatan dan mesin senilai **Rp3.283.043.447,21**.

Mutasi antar unit akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin berupa tranfer masuk senilai **(Rp3.472.398.048,72)** dan transfer keluar senilai senilai **Rp3.472.398.048,72**.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 7.41
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	JUMLAH
	Saldo Awal Per 31 Desember 2019	(391.834.758.424,49)
	Mutasi Tambah :	(46.746.311.320,25)
1	Penyusutan Tahun 2020	(35.944.175.302,31)
2	Reklasifikasi	(1.134.121.893,76)
3	Koreksi	(9.622.182.874,18)
4	Hibah	(45.831.250,00)



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 7.41
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	JUMLAH
	Mutasi Kurang :	24.951.563.591,24
1	Reklasifikasi	22.177.792.826,89
2	Koreksi	2.446.027.171,91
3	Penghapusan	327.743.592,44
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2020	(413.629.506.153,50)

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Senilai terdiri dari:

1. Penyusutan Tahun 2020

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari perhitungan beban penyusutan tahun 2019 senilai **(Rp35.944.175.302,31)**.

2. Reklasifikasi

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi masuk tahun 2020 senilai **(Rp1.134.121.893,76)** akibat reklasifikasi aset.

3. Koreksi

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari koreksi terhadap perhitungan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun lalu senilai **(Rp9.622.182.874,18)**.

4. Hibah

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan merupakan hibah PPKD senilai **(Rp45.831.250,00)**

Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari:

1. Reklasifikasi

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi keluar tahun 2020 senilai **Rp22.177.792.826,89** akibat reklasifikasi aset.

2. Koreksi

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari koreksi terhadap perhitungan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun lalu senilai **Rp2.446.027.171,91**.

3. Penghapusan

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari penghapusan aset tetap gedung dan bangunan senilai **Rp327.743.592,44**.

Mutasi antar unit akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan berupa tranfer masuk senilai **(Rp115.324.608,76)** dan transfer keluar senilai senilai **Rp115.324.608,76**.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 7.42
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

NO	URAIAN	JUMLAH
	Saldo Awal Per 31 Desember 2019	(1.007.557.313.395,28)
	Mutasi Tambah :	(220.170.085.013,21)
1	Penyusutan Tahun 2020	(98.579.105.826,15)
2	Reklasifikasi	(61.217.366,00)
3	Koreksi	(121.060.114.630,79)
4	Hibah	(469.647.190,27)
	Mutasi Kurang :	2.951.941.491,35
1	Reklasifikasi	842.528.529,12
2	Koreksi	2.109.412.962,23
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2020	(1.224.775.456.917,14)

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai terdiri dari:

1. Penyusutan Tahun 2020

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari perhitungan beban penyusutan tahun 2020 senilai **(Rp98.579.105.826,15)**.

2. Reklasifikasi

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari reklasifikasi masuk tahun 2020 senilai **(Rp61.217.366,00)** akibat reklasifikasi aset.

3. Koreksi

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari koreksi terhadap perhitungan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun lalu senilai **(Rp121.060.114.630,79)**.

4. Hibah

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan hibah dari Pihak Swasta untuk prasarana, sarana, dan utilitas melalui PPKD senilai **(Rp469.647.190,27)**.

Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai terdiri dari:

1. Reklasifikasi

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari reklasifikasi keluar tahun 2020 senilai **Rp842.528.529,12** akibat reklasifikasi aset.

2. Koreksi

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari koreksi terhadap perhitungan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun lalu senilai **Rp2.109.412.962,23**.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Mutasi antar unit akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa tranfer masuk senilai **(Rp637.702.404,32)** dan transfer keluar senilai senilai **Rp637.702.404,32**.

5.1.7 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 senilai **Rp133.694.405.944,32** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp31.978.451.895,40**. Aset Lainnya sebagai berikut:

Tabel 7.43
Aset Lainnya

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	Aset Tidak Berwujud	37.118.809.394,69	34.855.300.394,69
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(27.405.875.545,04)	(23.141.814.158,74)
3	Aset Lain-lain	219.802.995.625,42	30.374.787.929,80
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(95.821.523.530,75)	(10.109.822.270,35)
	JUMLAH	133.694.405.944,32	31.978.451.895,40

Penjelasan mutasi masing-masing Aset Lainnya sebagai berikut:

7.1.4.1 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 senilai **Rp9.712.933.849,65** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp11.713.486.235,95**. Aset Tidak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 7.44
Aset Tidak Berwujud

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	Aset Tidak Berwujud Lainnya	37.118.809.394,69	34.855.300.394,69
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(27.405.875.545,04)	(23.141.814.158,74)
	JUMLAH	9.712.933.849,65	11.713.486.235,95

Mutasi Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 7.45
Mutasi Aset Tidak Berwujud

NO	URAIAN	JUMLAH
	Saldo Awal Per 31 Desember 2019	34.855.300.394,69
	Mutasi Tambah :	2.545.283.825,00
1	Reklasifikasi	2.545.283.825,00
	Mutasi Kurang :	(281.774.825,00)
1	Reklasifikasi	(281.774.825,00)
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2020	37.118.809.394,69

Mutasi Aset Tidak Berwujud dari reklasifikasi masuk Tahun 2020 senilai **Rp2.545.283.825,00** terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai **Rp1.248.564.825,00**;
- Belanja Operasional senilai **Rp1.296.719.000,00**.

Mutasi Aset Tidak Berwujud dari reklasifikasi keluar Tahun 2020 senilai **(Rp281.774.825,00)** merupakan reklasifikasi ke Belanja Operasional.

7.1.4.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 senilai **(Rp27.405.875.545,04)** dan per 31 Desember 2019 senilai **(Rp23.141.814.158,74)**.

Metode Amortisasi Aset tak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 7.46
Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

NO	URAIAN	JUMLAH
	Saldo Awal Per 31 Desember 2019	(23.141.814.158,74)
	Mutasi Tambah :	(4.566.794.657,70)
1	Amortisasi Tahun 2020	(4.561.894.657,70)
2	Koreksi	(4.900.000,00)
	Mutasi Kurang :	302.733.271,40
1	Koreksi	302.733.271,40
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2020	(27.405.875.545,04)

Mutasi tambah Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud terdiri dari:

1. Amortisasi Tahun 2020

Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari perhitungan beban amortisasi tahun 2020 senilai **(Rp4.561.894.657,70)**.

2. Koreksi

Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari koreksi terhadap perhitungan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun lalu senilai **(Rp4.900.000,00)**.

Mutasi kurang Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud terdiri dari:

1. Koreksi

Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari koreksi terhadap perhitungan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun lalu senilai **Rp302.733.271,40**.

7.1.4.3 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 senilai **Rp219.802.995.625,42** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp25.897.160.499,47**.

Mutasi Aset Lain-lain sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 7.47
Mutasi Aset Lain-lain

NO	URAIAN	JUMLAH
	Saldo Awal Per 31 Desember 2019	30.374.787.929,80
	Mutasi Tambah :	197.017.979.442,66
1	Reklasifikasi	196.984.252.458,66
2	Koreksi	33.726.984,00
	Mutasi Kurang :	(7.589.771.747,04)
1	Reklasifikasi	(4.374.304.666,02)
2	Koreksi	(1.143.599.199,41)
3	Penghapusan	(2.071.867.881,61)
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2020	219.802.995.625,42

Mutasi tambah Aset Lain-lain senilai terdiri dari:

1. Reklasifikasi

Mutasi Aset Lain-lain dari reklasifikasi masuk tahun 2020 senilai **Rp196.984.252.458,66** akibat reklasifikasi aset dari peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, serta aset tetap lainnya hasil sensus.

2. Koreksi

Mutasi Aset Lain-lain dari koreksi nilai aset senilai **Rp33.726.984,00** berupa koreksi duplikasi pencatatan kendaraan hilang yang sudah tercantum di Piutang Tuntutan Ganti Rugi .

Mutasi kurang Aset Lain-lain terdiri dari:

1. Reklasifikasi

Mutasi Aset Lain-lain dari reklasifikasi keluar tahun 2020 senilai **(Rp4.374.304.666,02)** ke Piutang Tuntutan Ganti Rugi.

2. Koreksi

Mutasi Aset Lain-lain dari koreksi nilai aset senilai **(Rp1.143.599.199,41)** berupa koreksi duplikasi pencatatan kendaraan hilang yang sudah tercantum di Piutang Tuntutan Ganti Rugi.

3. Penghapusan

Mutasi Aset Lain-lain dari penghapusan tahun 2020 senilai **(Rp2.071.867.881,61)**.

7.1.4.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 senilai **(Rp95.821.523.530,75)** dan per 31 Desember 2019 senilai **(Rp10.109.822.270,35)**.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 7.48
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

NO	URAIAN	JUMLAH
	Saldo Awal Per 31 Desember 2019	(10.109.822.270,35)
	Mutasi Tambah :	(89.690.877.787,45)
1	Reklasifikasi	(89.598.074.803,45)
2	Koreksi	(92.802.984,00)
	Mutasi Kurang :	3.979.176.527,05
1	Reklasifikasi	1.564.621.307,74
2	Koreksi	357.966.623,41
3	Penghapusan	2.056.588.595,90
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2020	(95.821.523.530,75)

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain senilai terdiri dari:

1. Reklasifikasi

Mutasi Penyusutan Aset Lain-lain dari reklasifikasi masuk tahun 2020 senilai **(Rp89.598.074.803,45)** akibat reklasifikasi aset dari peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi jaringan, serta aset tetap lainnya hasil sensus.

2. Koreksi

Mutasi Penyusutan Aset Lain-lain dari koreksi nilai aset senilai **(Rp92.802.984,00)** berupa koreksi duplikasi pencatatan kendaraan hilang yang sudah tercantum di Piutang Tuntutan Ganti Rugi.

Mutasi kurang Aset Lain-lain terdiri dari:

1. Reklasifikasi

Mutasi Penyusutan Aset Lain-lain dari reklasifikasi keluar tahun 2020 senilai **Rp1.564.621.307,74** ke Piutang Tuntutan Ganti Rugi.

2. Koreksi

Mutasi Penyusutan Aset Lain-lain dari koreksi nilai aset senilai **Rp357.966.623,41**.

3. Penghapusan

Mutasi Penyusutan Aset Lain-lain dari penghapusan tahun 2020 senilai **Rp2.056.588.595,90**.

7.2 Kewajiban

7.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 senilai **Rp71.854.043.687,75** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp57.124.263.938,59**.

7.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 senilai **Rp616.045.039,00** dan saldo per 31 Desember 2019 senilai **Rp216.754.177,00**. Utang Pihak Ketiga (PFK) sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 7.49
 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
	PENERIMAAN PFK	-	236.403.377.716,75
	Potongan Gaji	-	88.718.277.708,00
1	TAPERUM	-	1.244.826.000,00
2	PPH Pasal 21 (Gaji dan LS)	-	2.114.454.531,00
3	ASKES	-	19.804.093.955,00
4	IWP 2%	-	47.289.638,00
5	IWP 8%	-	52.405.626.641,00
6	IWP 2% BPJS	-	13.101.986.943,00
	Pajak SP2D	-	133.191.665.594,00
1	PPH 21	-	64.971.331.222,00
2	PPH 22	-	2.067.072.233,00
3	PPH 23	-	820.224.970,00
4	PPH 4 (2)	-	9.131.265.451,00
5	PPN	-	56.201.771.718,00
	Pajak UP/TU	-	14.493.434.414,75
1	PPH 21	-	4.712.594.060,00
2	PPH 22	-	919.647.603,00
3	PPH 23	-	1.548.341.500,84
4	PPH 26	-	105.000,00
5	PPH 4 (2)	-	373.653.123,00
6	PPN	-	6.939.093.127,91
	PENYETORAN PFK	-	236.186.623.539,75
	Potongan Gaji	-	88.718.277.708,00
1	TAPERUM	-	1.244.826.000,00
2	PPH Pasal 21 (Gaji dan LS)	-	2.114.454.531,00
3	ASKES	-	19.804.093.955,00
4	IWP 2%	-	47.289.638,00
5	IWP 8%	-	52.405.626.641,00
6	IWP 2% BPJS	-	13.101.986.943,00
	Pajak SP2D	-	133.191.665.594,00
1	PPH 21	-	64.971.331.222,00
2	PPH 22	-	2.067.072.233,00
3	PPH 23	-	820.224.970,00
4	PPH 4 (2)	-	9.131.265.451,00
5	PPN	-	56.201.771.718,00
	Pajak UP/TU	-	14.276.680.237,75
1	PPH 21	-	4.620.029.430,00
2	PPH 22	-	912.478.024,00
3	PPH 23	-	1.529.144.256,84
4	PPH 26	-	105.000,00
5	PPH 4 (2)	-	358.212.308,00
6	PPN	-	6.856.711.218,91
	Hutang Pajak	-	216.754.177,00
	Pajak UP/TU	-	216.754.177,00
1	PPH 21	-	92.564.630,00
2	PPH 22	-	7.169.579,00
3	PPH 23	-	19.197.244,00
4	PPH 4 (2)	-	15.440.815,00
5	PPN	-	82.381.909,00
	Hutang Pajak BOS	616.045.039,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	PPh 21	95.131.053,00	-
2	PPh 23	47.900.098,00	-
3	PPh 4 (2)	305.362,00	-
4	PPN	432.126.649,00	-
5	Pihak Ketiga Lainnya	40.581.877,00	-
	JUMLAH	616.045.039,00	216.754.177,00

7.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 senilai **Rp2.672.256.716,42** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp2.378.629.542,21**. Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut:

Tabel 7.50
Pendapatan Diterima Dimuka

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
I	RSUD WALED	3.937.500,00	22.389.500,00
	Sewa Sarana	3.937.500,00	22.389.500,00
	ATM BJB	-	22.389.500,00
	ATM Mandiri	3.937.500,00	-
II	RSUD ARJAWINANGUN	20.000.000,00	80.833.333,34
	Sewa Gedung	20.000.000,00	80.833.333,34
	BJB	-	20.833.333,34
	Mini Market	20.000.000,00	60.000.000,00
III	DINAS PERHUBUNGAN	408.422.516,67	455.032.366,67
	Kendaraan Bermotor	408.422.516,67	455.032.366,67
IV	PPKD	601.939.166,67	130.156.486,83
	Sewa Tanah	601.939.166,67	130.156.486,83
V	BADAN PENGELOLAAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1.637.957.533,08	1.690.217.855,37
	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.555.262.699,75	1.556.967.647,04
	Reklame Kain	1.696.500,00	16.702.500,00
	Reklame Berjalan	80.998.333,33	116.547.708,33
	JUMLAH	2.672.256.716,42	2.378.629.542,21

7.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 senilai **Rp68.565.741.932,33** dan per 31 Desember 2019 senilai **Rp54.528.880.219,38**. Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:

Tabel 7.51
Utang Jangka Pendek Lainnya

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	Utang Belanja Pegawai	26.405.042.971,20	29.462.999.134,60
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	41.061.750.061,13	24.507.386.743,78
3	Utang Belanja Modal	619.216.500,00	217.621.700,00
4	Utang Belanja Lain-lain	81.200.000,00	-
5	Utang Kelebihan Transfer Pusat	148.544.664,00	340.872.641
6	Utang Jangka Pendek Lainnya.....	249.987.736,00	-
	JUMLAH	68.565.741.932,33	54.528.880.219,38



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Saldo Utang Belanja Pegawai merupakan:

1. Utang atas kekurangan gaji dan tunjangan pada SKPD;
2. Utang jasa pelayanan Kesehatan pada RSUD.

Rincian Utang Belanja per SKPD terdapat dalam Lampiran 7.14.

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan kewajiban untuk membayar tagihan atas pemakaian listrik, telepon, air dan internet per 31 Desember 2020. Utang Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 7.52
Utang Belanja Barang dan Jasa

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Telepon	32.883.622,00
2	Air	182.692.090,00
3	Listrik	860.466.908,00
4	Surat Kabar/Majalah	9.720.000,00
5	Kawat/Faksimili/Internet	48.026.170,00
6	Jasa Publikasi	2.750.000,00
7	Jasa Kesehatan	10.178.097.997,00
8	Jasa Uji Laboratorium	6.600.000,00
9	Pengolahan Limbah Medis	413.651.986,00
10	Kebersihan	527.000.000,00
11	Penggandaan	2.758.200,00
12	Makanan dan Minuman Harian Pegawai	6.605.200,00
13	Konsultasi Perencanaan	121.084.700,00
14	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	176.160.572,00
15	Belanja Barang/Persediaan	27.687.189.878,13
16	Belanja Pemeliharaan	806.062.738,00
	JUMLAH	41.061.750.061,13

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD terdapat dalam Lampiran 7.14.

Utang Belanja Modal merupakan kewajiban atas pengadaan aset peralatan dan mesin dan aset gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.53
Utang Belanja Modal

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	Peralatan dan Mesin	619.216.500,00	217.621.700,00
	JUMLAH	619.216.500,00	217.621.700,00

Rincian Utang Belanja Modal per SKPD terdapat dalam Lampiran 7.14.

Mutasi Utang Kelebihan Pembayaran Transfer sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 7.54
Mutasi Utang Kelebihan Transfer Pusat

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Utang Kelebihan Transfer Pusat	
	Saldo 31 Desember 2019	340.872.641,00
	Koreksi	(340.872.641,00)
	Utang Kelebihan Transfer Pusat sesuai PMK No.25/PMK.07/2021	148.544.664,00
	Saldo 31 Desember 2020	148.544.664,00

Utang Jamkesda merupakan tagihan dari RSUD atas jasa pelayanan pada Dinas Kesehatan. Pada laporan keuangan konsolidasi tidak disajikan, dengan mengeliminasi Piutang pada RSUD dengan nilai yang sama. Utang Jamkesda sebagai berikut:

Tabel 7.55
Utang Jamkesda

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
1	Utang Jamkesda	3.188.080.614,00	1.972.783.056,00
	JUMLAH	3.188.080.614,00	1.972.783.056,00

7.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Tidak terdapat Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Cirebon.

7.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 senilai **Rp4.599.846.381.798,82** dan saldo ekuitas per 31 Desember 2019 senilai **Rp4.517.366.152.410,53**.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

BAB VIII

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN OPERASIONAL

7.4 Pendapatan

Pada tahun 2020 dan 2019 Pendapatan senilai **Rp3.346.154.835.631,61** dan **Rp3.659.360.043.395,24**. Pendapatan yang diakui sebagai Pendapatan tahun 2020 pada Laporan Operasional sebagai berikut:

Tabel 8.1
Pendapatan Daerah

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Asli Daerah- LO	608.217.925.112,88	638.560.270.792,81	(30.342.345.679,93)	(4,75)
2	Pendapatan Transfer - LO	2.337.754.773.197,00	2.561.051.165.464,00	(223.296.392.267,00)	(8,72)
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah- LO	400.182.137.321,73	459.748.607.138,43	(59.566.469.816,70)	(12,96)
	JUMLAH	3.346.154.835.631,61	3.659.360.043.395,24	(313.205.207.763,63)	(8,56)

Rincian Pendapatan Daerah per SKPD sebagai berikut:

Tabel 8.2
Rincian Pendapatan Daerah Per SKPD

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Dinas Kesehatan	124.287.522.538,00	145.763.851.701,00	(21.476.329.163,00)	(14,73)
2	RSUD Waled	108.583.687.367,00	115.755.231.099,00	(7.171.543.732,00)	(6,20)
3	RSUD Arjawinangun	104.986.674.438,35	112.630.690.942,18	(7.644.016.503,83)	(6,79)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	402.855.922,00	966.837.360,00	(563.981.438,00)	(58,33)
5	Dinas Pemadam Kebakaran	83.815.000,00	105.985.000,00	(22.170.000,00)	(20,92)
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	668.838.000,00	375.081.600,00	293.756.400,00	78,32
7	Dinas Lingkungan Hidup	2.324.392.500,00	2.197.326.150,00	127.066.350,00	5,78
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.159.464.310,00	3.939.700.553,00	(780.236.243,00)	(19,80)
9	Dinas Perhubungan	2.463.661.950,00	2.651.586.716,66	(187.924.766,66)	(7,09)
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.401.254.375,00	2.204.872.250,00	196.382.125,00	8,91
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.763.883.146,00	4.071.860.039,00	(307.976.893,00)	(7,56)
12	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaandan Olahraga	5.800.000,00	37.550.000,00	(31.750.000,00)	(84,55)
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	168.324.846,00	149.178.500,00	19.146.346,00	12,83



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
14	Dinas Pertanian	467.259.100,00	493.622.900,00	(26.363.800,00)	(5,34)
15	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.827.399.000,00	2.394.820.800,00	(567.421.800,00)	(23,69)
16	PPKD	2.763.231.415.038,97	3.044.023.749.665,60	(280.792.334.626,63)	(9,22)
17	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	226.771.542.045,29	221.449.133.579,80	5.322.408.465,49	2,40
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.000.000,00	-	15.000.000,00	100,00
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	542.046.055,00	148.964.539,00	393.081.516,00	263,88
	JUMLAH	3.346.154.835.631,61	3.659.360.043.395,24	(313.205.207.763,63)	(8,56)

5.1.8 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp608.217.925.112,88** dan **Rp638.560.270.792,81**. Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

Tabel 8.3
Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Pajak Daerah- LO	226.771.542.045,29	221.449.133.579,80	5.322.408.465,49	2,40
2	Pendapatan Retribusi Daerah- LO	32.141.030.779,00	40.949.092.721,66	(8.808.061.942,66)	(21,51)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO	9.312.545.336,00	12.990.615.843,00	(3.678.070.507,00)	(28,31)
4	Lain-lain PAD yang sah- LO	339.992.806.952,59	363.171.428.648,35	(23.178.621.695,76)	(6,38)
	JUMLAH	608.217.925.112,88	638.560.270.792,81	(30.342.345.679,93)	(4,75)

7.1.1.18 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp226.771.542.045,29** dan **Rp221.449.133.579,80**. Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 8.4
Pendapatan Pajak Daerah

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pajak Hotel	5.178.805.227,00	7.337.719.958,00	(2.158.914.731,00)	(29,42)
2	Pajak Restoran – LO	14.750.301.576,00	18.442.286.185,00	(3.691.984.609,00)	(20,02)
3	Pajak Hiburan – LO	769.049.251,00	1.601.211.323,00	(832.162.072,00)	(51,97)
4	Pajak Reklame – LO	4.992.179.007,29	4.394.821.605,80	597.357.401,49	13,59
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	71.963.426.458,00	74.039.490.635,00	(2.076.064.177,00)	(2,80)
6	Pajak Parkir – LO	527.959.151,00	601.826.704,00	(73.867.553,00)	(12,27)
7	Pajak Air Tanah – LO	1.229.971.045,00	1.161.431.550,00	68.539.495,00	5,90
8	Pajak Sarang Burung Walet – LO	61.016.000,00	61.221.000,00	(205.000,00)	(0,33)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	13.908.040.815,00	11.372.506.304,00	2.535.534.511,00	22,30



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	51.382.148.293,00	55.389.632.757,00	(4.007.484.464,00)	(7,24)
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	62.008.645.222,00	47.046.985.558,00	14.961.659.664,00	31,80
	JUMLAH	226.771.542.045,29	221.449.133.579,80	5.322.408.465,49	2,40

Pendapatan Pajak Daerah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp5.178.805.227,00** dan **Rp7.337.721.958,00**. Pajak Hotel sebagai berikut:

Tabel 8.5
Pajak Hotel

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Hotel – LO	4.955.757.209,00	7.077.764.797,00	(2.122.007.588,00)	(29,98)
2	Losmen/Rumah Penginapan- LO	223.048.018,00	259.955.161,00	(36.907.143,00)	(14,20)
	JUMLAH	5.178.805.227,00	7.337.719.958,00	(2.158.914.731,00)	(29,42)

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp14.750.301.576,00** dan **Rp18.442.286.185,00**. Pajak Restoran sebagai berikut:

Tabel 8.6
Pajak Restoran

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Restoran- LO	8.159.437.840,00	8.971.481.516,00	(812.043.676,00)	(9,05)
2	Rumah Makan- LO	2.742.162.931,00	3.766.566.922,00	(1.024.403.991,00)	(27,20)
3	Café- LO	436.136.944,00	613.633.655,00	(177.496.711,00)	(28,93)
4	Kantin- LO	91.136.806,00	111.181.974,00	(20.045.168,00)	(18,03)
5	Jasa Boga/ Katering- LO	3.321.427.055,00	4.979.422.118,00	(1.657.995.063,00)	(33,30)
	JUMLAH	14.750.301.576,00	18.442.286.185,00	(3.691.984.609,00)	(20,02)

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp769.049.251,00** dan **Rp1.601.211.323,00**. Pajak Hiburan sebagai berikut :

Tabel 8.7
Pajak Hiburan

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Tontonan Film/Bioskop - LO	251.331.819,00	550.378.456,00	(299.046.637,00)	(54,33)
2	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana- LO	-	15.927.000,00	(15.927.000,00)	(100,00)
3	Pameran - LO	2.180.412,00	12.577.022,00	(10.396.610,00)	(82,66)
4	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya - LO	205.558.090,00	413.189.911,00	(207.631.821,00)	(50,25)



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 8.7
Pajak Hiburan

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
5	Sirkus/Akrobat/Sulap- LO	1.600.000,00	4.250.000,00	(2.650.000,00)	(62,35)
6	Permainan Bilyar, Golf, Bowling- LO	1.225.000,00	1.925.000,00	(700.000,00)	(36,36)
7	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan- LO	255.379.769,00	555.232.833,00	(299.853.064,00)	(54,00)
8	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitness center) – LO	51.774.161,00	47.731.101,00	4.043.060,00	8,47
	JUMLAH	769.049.251,00	1.601.211.323,00	(832.162.072,00)	(51,97)

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp4.992.179.007,29** dan **Rp4.394.821.605,80**. Pajak Reklame sebagai berikut :

Tabel 8.8
Pajak Reklame

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron – LO	4.063.188.418,28	3.607.998.719,20	455.189.699,08	12,62
2	Pajak Reklame Kain – LO	689.707.339,00	702.005.595,00	(12.298.256,00)	(1,75)
3	Pajak Reklame Berjalan- LO	210.521.875,01	84.817.291,60	125.704.583,41	148,21
4	Pajak Reklame Udara - LO	721.875,00	-	721.875,00	100,00
5	Pajak Reklame Film/Slide - LO	28.039.500,00	-	28.039.500,00	100,00
	JUMLAH	4.992.179.007,29	4.394.821.605,80	597.357.401,49	13,59

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp71.963.426.458,00** dan **Rp74.039.490.635,00**. Pajak Penerangan Jalan sebagai berikut:

Tabel 8.9
Pajak Penerangan Jalan

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri – LO	71.677.783.401,00	73.843.621.819,00	(2.165.838.418,00)	(2,93)
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain – LO	285.643.057,00	195.868.816,00	89.774.241,00	45,83
	JUMAH	71.963.426.458,00	74.039.490.635,00	(2.076.064.177,00)	(2,80)

6. Pajak Parkir

Pajak Parkir tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp527.959.151,00** dan **Rp601.826.704,00**. Pajak Parkir sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 8.10
Pajak Parkir

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pajak Parkir- LO	527.959.151,00	601.826.704,00	(73.867.553,00)	(12,27)
	JUMLAH	527.959.151,00	601.826.704,00	(73.867.553,00)	(12,27)

7. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp1.229.971.045,00** dan **Rp1.161.431.550,00**. Pajak Air Tanah sebagai berikut:

Tabel 8.11
Pajak Air Tanah

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pajak Air Tanah- LO	1.229.971.045,00	1.161.431.550,00	68.539.495,00	5,90
	JUMLAH	1.229.971.045,00	1.161.431.550,00	68.539.495,00	5,90

8. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp61.016.000,00** dan **Rp61.221.000,00**. Pajak Sarang Burung Walet sebagai berikut:

Tabel 8.12
Pajak Sarang Burung Walet

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pajak Sarang Burung Walet- LO	61.016.000,00	61.221.000,00	(205.000,00)	(0,33)
	JUMLAH	61.016.000,00	61.221.000,00	(205.000,00)	(0,33)

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Bukan Logam dan Batuan tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp13.908.040.815,00** dan **Rp11.372.506.304,00**. Pajak Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut :

Tabel 8.13
Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Batu Kapur- LO	11.652.052.875,00	9.300.258.675,00	2.351.794.200,00	25,29
2	Granit/Andesit – LO	56.583.000,00	61.668.000,00	(5.085.000,00)	(8,25)
3	Pasir dan Kerikil- LO	310.900.000,00	73.194.943,00	237.705.057,00	324,76
4	Tanah Liat- LO	91.641.900,00	278.777.050,00	(187.135.150,00)	(67,13)
5	Tanah Urug- LO	1.796.863.040,00	1.658.607.636,00	138.255.404,00	8,34
	JUMLAH	13.908.040.815,00	11.372.506.304,00	2.535.534.511,00	22,30

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp51.382.148.293,00** dan



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rp55.389.632.757,00. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai berikut :

Tabel 8.14
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	51.382.148.293,00	55.389.632.757,00	(4.007.484.464,00)	(7,24)
	JUMLAH	51.382.148.293,00	55.389.632.757,00	(4.007.484.464,00)	(7,24)

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp62.008.645.222,00** dan **Rp47.046.985.558,00**.
 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 8.15
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan- LO	62.008.645.222,00	47.046.985.558,00	14.961.659.664,00	31,80
	JUMLAH	62.008.645.222,00	47.046.985.558,00	14.961.659.664,00	31,80

7.1.1.19 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp32.141.030.779,00** dan **Rp40.949.092.721,66**. Retribusi Daerah sebagai berikut:

Tabel 8.16
Retribusi Daerah

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	17.709.615.000,00	25.543.997.500,00	(7.834.382.500,00)	(30,67)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	2.324.392.500,00	2.197.326.150,00	127.066.350,00	5,78
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	331.543.000,00	270.744.000,00	60.799.000,00	22,46
4	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	1.693.206.000,00	2.336.865.800,00	(643.659.800,00)	(27,54)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	2.010.076.950,00	2.225.698.216,66	(215.621.266,66)	(9,69)
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	83.815.000,00	105.985.000,00	(22.170.000,00)	(20,92)
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	207.608.000,00	133.772.000,00	73.836.000,00	55,20
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	357.787.862,00	801.131.266,00	(443.343.404,00)	(55,34)
9	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	67.324.846,00	71.258.500,00	(3.933.654,00)	(5,52)
10	Retribusi Terminal – LO	122.042.000,00	155.144.500,00	(33.102.500,00)	(21,34)
11	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	196.941.100,00	213.623.400,00	(16.682.300,00)	(7,81)
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LO	5.800.000,00	37.550.000,00	(31.750.000,00)	(84,55)



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 8.16
Retribusi Daerah

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	196.903.000,00	204.182.500,00	(7.279.500,00)	(3,57)
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	3.758.953.471,00	4.068.220.039,00	(309.266.568,00)	(7,60)
15	Retribusi Izin Trayek - LO	4.680.000,00	3.640.000,00	1.040.000,00	28,57
16	Retribusi Izin Perikanan - LO	249.675,00	-	249.675,00	100,00
17	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	668.838.000,00	375.081.600,00	293.756.400,00	78,32
18	Retribusi Menara Telekomunikasi	2.401.254.375,00	2.204.872.250,00	196.382.125,00	8,91
	JUMLAH	32.141.030.779,00	40.949.092.721,66	(8.808.061.942,66)	(21,51)

Rincian Retribusi Daerah per SKPD sebagai berikut:

Tabel 8.17
Rincian Retribusi Daerah Per SKPD

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Dinas Kesehatan	17.709.615.000,00	25.543.997.500,00	(7.834.382.500,00)	(30,67)
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	357.787.862,00	801.131.266,00	(443.343.404,00)	(55,34)
3	Dinas Pemadam Kebakaran	83.815.000,00	105.985.000,00	(22.170.000,00)	(20,92)
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	668.838.000,00	375.081.600,00	293.756.400,00	78,32
5	Dinas Lingkungan Hidup	2.324.392.500,00	2.197.326.150,00	127.066.350,00	5,78
6	Dinas Perhubungan	2.463.661.950,00	2.651.586.716,66	(187.924.766,66)	(7,09)
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.401.254.375,00	2.204.872.250,00	196.382.125,00	8,91
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.763.883.146,00	4.071.860.039,00	(307.976.893,00)	(7,56)
9	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	5.800.000,00	37.550.000,00	(31.750.000,00)	(84,55)
10	Dinas Kelautan Dan Perikanan	67.324.846,00	71.258.500,00	(3.933.654,00)	(5,52)
11	Dinas Pertanian	467.259.100,00	493.622.900,00	(26.363.800,00)	(5,34)
12	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	1.827.399.000,00	2.394.820.800,00	(567.421.800,00)	(23,69)
	JUMLAH	32.141.030.779,00	40.949.092.721,66	(8.808.061.942,66)	(21,51)

7.1.1.20 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2020 dan tahun 2019 senilai **Rp9.312.545.336,00** dan **Rp12.990.615.843,00**. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 8.18
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD – LO	9.312.545.336,00	12.990.615.843,00	(3.678.070.507,00)	(28,31)
	JUMLAH	9.312.545.336,00	12.990.615.843,00	(3.678.070.507,00)	(28,31)

7.1.1.21 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp339.992.806.952,59** dan **Rp363.171.428.648,35**. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagai berikut:

Tabel 8.19
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Hasil Penjualan Aset Lainnya – LO	146.068.060,00	243.626.094,00	(97.558.034,00)	(40,04)
2	Penerimaan Jasa Giro - LO	9.437.287.871,00	8.792.001.720,00	645.286.151,00	7,34
3	Pendapatan Bunga - LO	9.884.397.396,00	21.610.714.869,00	(11.726.317.473,00)	(54,26)
4	Pendapatan dari Pengembalian - LO	388.943.979,00	371.382.742,00	17.561.237,00	4,73
5	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah- LO	649.010.720,16	255.992.695,17	393.018.024,99	153,53
6	Pendapatan BLUD - LO	213.570.361.805,35	228.385.922.041,18	(14.815.560.235,83)	(6,49)
7	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas	86.326.995.000,00	97.377.918.425,00	(11.050.923.425,00)	(11,35)
8	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	19.589.742.121,08	6.133.870.062,00	13.455.872.059,08	219,37
	JUMLAH	339.992.806.952,59	363.171.428.648,35	(23.178.621.695,76)	(6,38)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2020 sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Aset Lainnya

Hasil Penjualan Aset Lainnya tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp146.068.060,00** dan **Rp243.626.094,00**. Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagai berikut:

Tabel 8.20
Hasil Penjualan Aset Lainnya

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Hasil Penjualan Aset Lainnya- LO	146.068.060,00	243.626.094,00	(97.558.034,00)	(40,04)
	JUMLAH	146.068.060,00	243.626.094,00	(97.558.034,00)	(40,04)



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

2. Penerimaan Hasil Jasa Giro

Penerimaan Hasil Jasa Giro tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp9.437.287.871,00** dan **Rp8.792.001.720,00**. Penerimaan Hasil Jasa Giro sebagai berikut:

Tabel 8.21
Penerimaan Hasil Jasa Giro

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Jasa Giro Kas Daerah-LO	8.045.217.486,00	7.624.245.735,00	420.971.751,00	5,52
2	Jasa Giro Kas Bendahara- LO	1.392.070.385,00	1.167.755.985,00	224.314.400,00	19,21
	JUMLAH	9.437.287.871,00	8.792.001.720,00	645.286.151,00	7,34

3. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp9.884.397.396,00** dan **Rp21.610.714.869,00**. Pendapatan Bunga sebagai berikut:

Tabel 8.22
Pendapatan Bunga Deposito

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Bunga Deposito- LO	9.884.397.396,00	21.610.714.869,00	(11.726.317.473,00)	(54,26)
	JUMLAH	9.884.397.396,00	21.610.714.869,00	(11.726.317.473,00)	(54,26)

4. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp 388.943.979,00** dan **Rp371.382.742,00**. Pendapatan dari Pengembalian sebagai berikut:

Tabel 8.23
Pendapatan Dari Pengembalian

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan – LO	388.943.979,00	371.382.742,00	17.561.237,00	4,73
	JUMLAH	388.943.979,00	371.382.742,00	17.561.237,00	4,73

5. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp649.010.720,16** dan **Rp255.992.695,17**. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 8.24
 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa – LO	649.010.720,16	255.992.695,17	393.018.024,99	153,53
	JUMLAH	649.010.720,16	255.992.695,17	393.018.024,99	153,53

6. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp213.570.361.805,35** dan **Rp228.385.922.041,18**. Pendapatan BLUD sebagai berikut:

Tabel 8.25
 Pendapatan BLUD

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan BLUD- LO	213.570.361.805,35	228.385.922.041,18	(14.815.560.235,83)	(6,49)
	JUMLAH	213.570.361.805,35	228.385.922.041,18	(14.815.560.235,83)	(6,49)

Pendapatan BLUD senilai **Rp213.570.361.805,35** merupakan pendapatan BLUD dari Rumah Sakit Arjawinangun senilai **Rp104.986.674.438,35** dan Rumah Sakit Waled senilai **Rp108.583.687.367,00**.

7. Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas

Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp86.326.995.000,00** dan **Rp97.377.918.425,00**. Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 8.26
 Dana Kapitasi JKN pada FKTP

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas.	86.326.995.000,00	97.377.918.425,00	(11.050.923.425,00)	(11,35)
	JUMLAH	86.326.995.000,00	97.377.918.425,00	(11.050.923.425,00)	(11,35)

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan dimuka kepada FKTP oleh BPJS berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

8. Lain- Lain PAD yang Sah Lainnya

Lain-lain PAD yang Sah Lainnya tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp19.589.742.121,08** dan **Rp6.133.870.062,00**. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 8.27
Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO.	15.600.135.703,08	1.416.076.522,00	14.184.059.181,08	1.001,64
2	Pendapatan Denda Keterlambatan Pengurusan Administrasi Kependudukan	545.880.000,00	844.575.000,00	(298.695.000,00)	(35,37)
3	Pendapatan Pengembalian Kerugian Daerah Atas Pemeriksaan	3.402.093.758,00	3.821.827.650,00	(419.733.892,00)	(10,98)
4	Pendapatan Jasa Bunga Selain Pemegang Kas	41.632.660,00	51.390.890,00	(9.758.230,00)	(18,99)
	JUMLAH	19.589.742.121,08	6.133.870.062,00	13.455.872.059,08	219,37

8.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2020 dan 2019 adalah senilai **Rp2.337.754.773.197,00** dan **Rp2.561.051.165.464,00**. Pendapatan Transfer sebagai berikut:

Tabel 8.28
Pendapatan Transfer

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.998.568.408.901,00	2.238.919.527.892,00	(240.351.118.991,00)	(10,74)
2	Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat - Lainnya	52.144.593.000,00	24.827.028.000,00	27.317.565.000,00	110,03
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	287.041.771.296,00	297.304.609.572,00	(10.262.838.276,00)	(3,45)
	JUMLAH	2.337.754.773.197,00	2.561.051.165.464,00	(223.296.392.267,00)	(8,72)

Pendapatan Transfer merupakan transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan. Pendapatan Transfer sebagai berikut:

8.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp1.998.568.408.901,00** dan **Rp2.238.919.527.892,00**. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut:

Tabel 8.29
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Bagi Hasil Pajak	63.504.006.150,00	58.262.919.351,00	5.241.086.799,00	9,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	21.185.872.350,00	41.725.401.658,00	(20.539.529.308,00)	(49,23)
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.417.094.602.000,00	1.591.291.632.000,00	(174.197.030.000,00)	(10,95)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	496.783.928.401,00	547.639.574.883,00	(50.855.646.482,00)	(9,29)
	JUMLAH	1.998.568.408.901,00	2.238.919.527.892,00	(240.351.118.991,00)	(10,74)



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp63.504.006.150,00** dan **Rp58.262.919.351,00**. Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

Tabel 8.30
Bagi Hasil Pajak

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LO	3.721.426.160,00	1.695.789.213,00	2.025.636.947,00	119,45
2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LO	76.643.100,00	207.812.203,00	(131.169.103,00)	(63,12)
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21- LO	43.012.327.190,00	37.588.494.706,00	5.423.832.484,00	14,43
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	5.285.942.000,00	4.159.287.560,00	1.126.654.440,00	27,09
5	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Umum- LO	11.407.667.700,00	14.611.535.669,00	(3.203.867.969,00)	(21,93)
	JUMLAH	63.504.006.150,00	58.262.919.351,00	5.241.086.799,00	9,00

2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam pada tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp21.185.872.350,00** dan **Rp41.725.401.658,00**. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebagai berikut:

Tabel 8.31
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan- LO	82.978.575,00	86.395.865,00	(3.417.290,00)	(3,96)
2	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan- LO	1.101.480.000,00	764.460.992,00	337.019.008,00	44,09
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi- LO	3.579.865.100,00	7.501.544.108,00	(3.921.679.008,00)	(52,28)
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi- LO	2.326.375.900,00	4.832.741.320,00	(2.506.365.420,00)	(51,86)
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi- LO	13.698.599.875,00	28.117.336.399,00	(14.418.736.524,00)	(51,28)
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum – LO	396.572.900,00	422.922.974,00	(26.350.074,00)	(6,23)
	JUMLAH	21.185.872.350,00	41.725.401.658,00	(20.539.529.308,00)	(49,23)



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp1.417.094.602.000,00** dan **Rp1.591.291.632.000,00**. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai berikut:

Tabel 8.32
Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Dana Alokasi Umum – LO	1.417.094.602.000,00	1.591.291.632.000,00	(174.197.030.000,00)	(10,95)
	JUMLAH	1.417.094.602.000,00	1.591.291.632.000,00	(174.197.030.000,00)	(10,95)

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp496.783.928.401,00** dan **Rp547.639.574.883,00**. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut:

Tabel 8.33
Dana Alokasi Khusus (DAK)

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO	7.222.836.000,00	8.646.906.000,00	(1.424.070.000,00)	(16,47)
2	DAK Bidang Kesehatan – LO	63.029.414.675,00	64.255.334.169,00	(1.225.919.494,00)	(1,91)
3	DAK Bidang Pendidikan – LO	333.518.974.000,00	340.241.469.170,00	(6.722.495.170,00)	(1,98)
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	89.126.475.112,00	129.956.111.056,00	(40.829.635.944,00)	(31,42)
5	Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	417.358.000,00	-	417.358.000,00	100,00
6	Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.468.870.614,00	4.539.754.488,00	(1.070.883.874,00)	(23,59)
	JUMLAH	496.783.928.401,00	547.639.574.883,00	(50.855.646.482,00)	(9,29)

Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2020 terdiri dari DAK Fisik senilai **Rp89.126.475.112,00** dan DAK Non Fisik senilai **Rp407.657.453.289,00**.

8.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp52.144.593.000,00** dan **Rp24.827.028.000,00**. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebagai berikut:

Tabel 8.34
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Dana Penyesuaian, yaitu Dana Insentif Daerah- LO	52.144.593.000,00	24.827.028.000,00	27.317.565.000,00	110,03
	JUMLAH	52.144.593.000,00	24.827.028.000,00	27.317.565.000,00	110,03



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

8.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp287.041.771.296,00** dan **Rp297.304.609.572,00**. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebagai berikut:

Tabel 8.35
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak- LO	287.041.771.296,00	297.304.609.572,00	(10.262.838.276,00)	(3,45)
	JUMLAH	287.041.771.296,00	297.304.609.572,00	(10.262.838.276,00)	(3,45)

8.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp400.182.137.321,73** dan **Rp459.748.607.138,43**. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebagai berikut:

Tabel 8.36
Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO	23.928.868.924,00	35.331.669.939,00	(11.402.801.015,00)	(32,27)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	-	359.057.003,43	(359.057.003,43)	(100,00)
3	Hibah Dana Bos – LO	233.724.450.000,00	221.895.600.000,00	11.828.850.000,00	5,33
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO	31.690.846.214,73	18.926.764.593,00	12.764.081.621,73	67,44
5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	110.837.972.183,00	183.235.515.603,00	(72.397.543.420,00)	(39,51)
	JUMLAH	400.182.137.321,73	459.748.607.138,43	(59.566.469.816,70)	(12,96)

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah merupakan Pendapatan Hibah, Bantuan Keuangan Provinsi dan Pendapatan Lainnya.

8.2. Beban

Beban merupakan belanja atau beban yang telah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Beban disajikan dengan basis akrual, dimana pengakuan beban terjadi pada saat timbulnya kewajiban. Beban tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp3.136.057.437.895,91** dan **Rp3.187.144.256.618,16**. Beban sebagai berikut:

Tabel 8.37
Beban

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Pegawai	1.775.912.733.665,60	1.772.736.783.276,60	3.175.950.389,00	0,18
2	Beban Persediaan	303.472.202.288,88	316.262.236.621,40	(12.790.034.332,52)	(4,04)
3	Beban Jasa	468.288.916.933,82	526.704.321.196,75	(58.415.404.262,93)	(11,09)
4	Beban Pemeliharaan	41.177.714.812,00	49.150.951.622,00	(7.973.236.810,00)	(16,22)
5	Beban Perjalanan	42.139.717.957,00	60.647.168.973,00	(18.507.451.016,00)	(30,52)



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Dinas				
6	Beban Hibah	46.647.871.400,00	67.158.496.000,00	(20.510.624.600,00)	(30,54)
7	Beban Bantuan Sosial	924.844.000,00	1.389.260.143,00	(464.416.143,00)	(33,43)
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	238.516.243.999,61	175.281.715.407,31	63.234.528.592,30	36,08
9	Beban Penyisihan Piutang	1.777.619.931,00	2.320.447.957,10	(542.828.026,10)	(23,39)
10	Beban Transfer	217.199.572.908,00	215.492.875.421,00	1.706.697.487,00	0,79
	JUMLAH	3.136.057.437.895,91	3.187.144.256.618,16	(51.086.818.722,25)	(1,60)

8.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp1.775.912.733.665,60** dan **Rp1.772.736.783.276,60**. Beban Pegawai sebagai berikut:

Tabel 8.38
Beban Pegawai

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Gaji dan Tunjangan	897.608.645.424,00	914.291.820.772,00	(16.683.175.348,00)	(1,82)
2	Tambahan Penghasilan PNS	607.154.627.780,00	585.037.372.070,00	22.117.255.710,00	3,78
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.586.500.000,00	9.511.200.000,00	75.300.000,00	0,79
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	10.000.000.000,00	9.747.692.667,00	252.307.333,00	2,59
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	769.696.215,00	1.151.723.399,00	(382.027.184,00)	(33,17)
6	Uang Lembur	12.753.357.050,00	10.552.278.349,00	2.201.078.701,00	20,86
7	Honorarium PNS	96.381.859.989,60	104.203.685.356,60	(7.821.825.367,00)	(7,51)
8	Honorarium Non PNS	140.526.447.207,00	135.894.310.663,00	4.632.136.544,00	3,41
9	Beban Pegawai BLUD	1.131.600.000,00	2.346.700.000,00	(1.215.100.000,00)	(51,78)
	JUMLAH	1.775.912.733.665,60	1.772.736.783.276,60	3.175.950.389,00	0,18

8.2.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Gaji dan Tunjangan tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp897.608.645.424,00** dan **Rp914.291.820.772,00**. Beban Gaji dan Tunjangan sebagai berikut:

Tabel 8.39
Beban Gaji dan Tunjangan

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi – LO	674.707.602.003,00	704.093.449.447,00	(29.385.847.444,00)	(4,17)
2	Tunjangan Keluarga – LO	60.408.702.821,00	63.816.872.131,00	(3.408.169.310,00)	(5,34)
3	Tunjangan Jabatan – LO	11.464.868.250,00	11.786.663.728,00	(321.795.478,00)	(2,73)
4	Tunjangan Fungsional – LO	53.154.126.650,00	54.178.553.750,00	(1.024.427.100,00)	(1,89)
5	Tunjangan Fungsional Umum – LO	5.603.270.000,00	6.430.616.000,00	(827.346.000,00)	(12,87)
6	Tunjangan Beras – LO	28.660.853.940,00	30.472.323.011,00	(1.811.469.071,00)	(5,94)



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus – LO	2.420.236.006,00	2.114.176.243,00	306.059.763,00	14,48
8	Pembulatan Gaji – LO	8.123.443,00	8.845.115,00	(721.672,00)	(8,16)
9	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	37.738.538.924,00	19.809.750.002,00	17.928.788.922,00	90,50
10	Uang Paket – LO	94.720.500,00	94.783.500,00	(63.000,00)	(0,07)
11	Tunjangan Badan Musyawarah – LO	32.429.250,00	27.222.300,00	5.206.950,00	19,13
12	Tunjangan Komisi – LO	59.535.375,00	50.799.950,00	8.735.425,00	17,20
13	Tunjangan Badan Anggaran – LO	24.481.800,00	27.085.275,00	(2.603.475,00)	(9,61)
14	Tunjangan Badan Kehormatan – LO	8.860.950,00	7.612.500,00	1.248.450,00	16,40
15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya – LO	60.930.450,00	50.821.050,00	10.109.400,00	19,89
16	Tunjangan Perumahan – LO	9.400.000.000,00	7.637.000.000,00	1.763.000.000,00	23,08
17	Uang Duka Wafat/Tewas – LO	1.575.000,00	-	1.575.000,00	100,00
18	Uang Jasa Pengabdian – LO	-	419.265.000,00	(419.265.000,00)	(100,00)
19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD – LO	393.120.000,00	353.640.000,00	39.480.000,00	11,16
20	Tunjangan Badan Legislasi Daerah – LO	25.212.600,00	14.844.375,00	10.368.225,00	69,85
21	BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) – LO	1.382.940.244,00	1.440.249.349,00	(57.309.105,00)	(3,98)
22	BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian (JKM)	4.148.817.218,00	4.320.748.046,00	(171.930.828,00)	(3,98)
23	Tunjangan Transportasi – LO	5.634.100.000,00	5.695.900.000,00	(61.800.000,00)	(1,08)
24	Tunjangan Reses – LO	2.175.600.000,00	1.440.600.000,00	735.000.000,00	51,02
	JUMLAH	897.608.645.424,00	914.291.820.772,00	(16.683.175.348,00)	(1,82)

8.2.1.2 Beban Tambahan Penghasilan PNS

Beban Tambahan Penghasilan PNS tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp607.154.627.780,00** dan **Rp585.037.372.070,00**. Beban Tambahan Penghasilan PNS sebagai berikut:

Tabel 8.40
Beban Tambahan Penghasilan PNS

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	294.155.780.400,00	242.815.348.150,00	51.340.432.250,00	21,14
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	857.549.100,00	750.254.400,00	107.294.700,00	14,30
3	Tunjangan Profesi Guru PNSD	310.950.048.280,00	340.906.269.520,00	(29.956.221.240,00)	(8,79)
4	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.191.250.000,00	565.500.000,00	625.750.000,00	110,65
	JUMLAH	607.154.627.780,00	585.037.372.070,00	22.117.255.710,00	3,78



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

8.2.1.3 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp9.586.500.000,00** dan **Rp9.511.200.000,00**. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH sebagai berikut:

Tabel 8.41
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.746.500.000,00	8.761.200.000,00	(14.700.000,00)	(0,17)
2	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH	840.000.000,00	750.000.000,00	90.000.000,00	12,00
	JUMLAH	9.586.500.000,00	9.511.200.000,00	75.300.000,00	0,79

8.2.1.4 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Insentif Pemungutan Pajak Daerah tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp10.000.000.000,00** dan **Rp9.747.692.667,00**. Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 8.42
Insentif Pemungutan Pajak Daerah

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	10.000.000.000,00	9.747.692.667,00	252.307.333,00	2,59
	JUMLAH	10.000.000.000,00	9.747.692.667,00	252.307.333,00	2,59

Insentif pemungutan pajak daerah dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

8.2.1.5 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp769.696.215,00** dan **Rp1.151.723.399,00**. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Tabel 8.43
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	769.696.215,00	1.151.723.399,00	(382.027.184,00)	(33,17)
	JUMLAH	769.696.215,00	1.151.723.399,00	(382.027.184,00)	(33,17)

Rincian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah per SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan senilai **Rp254.716.747,00**
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi **Rp15.000.000,00**



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

3. Dinas Lingkungan Hidup senilai **Rp77.775.371,00**
4. Dinas Perhubungan senilai **Rp109.176.095,00**
5. Dinas Komunikasi dan Informatika senilai **Rp86.021.727,00**
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai **Rp147.775.000,00**
7. Dinas Pertanian senilai **Rp17.496.340,00**
8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian senilai **Rp61.734.935,00**

8.2.1.6 Uang Lembur

Uang Lembur tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp12.753.357.050,00** dan **Rp10.552.278.349,00** . Uang Lembur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8.44
Uang Lembur

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Uang Lembur PNS	7.658.329.465,00	6.740.398.850,00	917.930.615,00	13,62
2	Uang Lembur Non PNS	5.095.027.585,00	3.811.879.499,00	1.283.148.086,00	33,66
	JUMLAH	12.753.357.050,00	10.552.278.349,00	2.201.078.701,00	20,86

8.2.1.7 Honorarium PNS

Honorarium PNS tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp96.381.859.989,60** dan **Rp104.203.685.356,60**. Honorarium PNS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8.45
Honorarium PNS

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.774.576.000,00	6.237.780.400,00	536.795.600,00	8,61
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	1.910.350.000,00	3.705.340.000,00	(1.794.990.000,00)	(48,44)
3	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	-	12.720.000,00	(12.720.000,00)	(100,00)
4	Honorarium Jasa Pelayanan Kesehatan	82.889.882.989,60	85.408.478.456,60	(2.518.595.467,00)	(2,95)
5	Honorarium/Uang Saku Peserta Kegiatan	653.240.000,00	1.563.481.500,00	(910.241.500,00)	(58,22)
6	Uang Saku Pengawasan	3.744.741.000,00	3.224.335.000,00	520.406.000,00	16,14
7	Uang Saku Pengamanan	409.070.000,00	4.051.550.000,00	(3.642.480.000,00)	(89,90)
	JUMLAH	96.381.859.989,60	104.203.685.356,60	(7.821.825.367,00)	(7,51)

8.2.1.8 Honorarium Non PNS

Honorarium PNS tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp140.526.447.207,00** dan **Rp135.894.310.663,00**. Honorarium Non PNS dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 8.46
Honorarium Non PNS

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	-	28.000.000,00	(28.000.000,00)	(100,00)
2	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	124.209.178.807,00	109.310.855.163,00	14.898.323.644,00	13,63
3	Honorarium/Uang Saku/Pengganti Transport Peserta Kegiatan	16.317.268.400,00	26.555.455.500,00	(10.238.187.100,00)	(38,55)
	JUMLAH	140.526.447.207,00	135.894.310.663,00	4.632.136.544,00	3,41

8.2.1.9 Beban Pegawai BLUD

Beban Pegawai BLUD tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp1.131.600.000,00** dan **Rp2.346.700.000,00**. Beban Pegawai BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8.47
Beban Pegawai BLUD

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Pegawai BLUD	1.131.600.000,00	2.346.700.000,00	(1.215.100.000,00)	(51,78)
	JUMLAH	1.131.600.000,00	2.346.700.000,00	(1.215.100.000,00)	(51,78)

8.2.2 Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp303.472.202.288,88** dan **Rp316.262.236.621,40**. Beban Persediaan sebagai berikut:

Tabel 8.48
Beban Persediaan

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	96.964.796.366,43	122.525.707.958,36	(25.560.911.591,93)	(20,86)
2	Beban Persediaan Bahan/Material	177.459.257.114,45	158.807.728.561,04	18.651.528.553,41	11,74
3	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	29.011.788.808,00	33.795.724.102,00	(4.783.935.294,00)	(14,16)
4	Beban Hadiah Lomba dan/atau Penghargaan	36.360.000,00	1.133.076.000,00	(1.096.716.000,00)	(96,79)
	JUMLAH	303.472.202.288,88	316.262.236.621,40	(12.790.034.332,52)	(4,04)

Rincian Beban Persediaan terdapat dalam Lampiran 8.1.

8.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp468.288.916.933,82** dan **Rp526.704.321.196,75**. Beban Jasa sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 8.49
Beban Jasa

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Jasa Kantor	286.048.520.646,00	312.002.854.451,00	(25.954.333.805,00)	(8,32)
2	Beban Premi Asuransi	3.400.704.509,81	2.026.000.922,84	1.374.703.586,97	67,85
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	20.813.493.782,02	22.701.689.808,28	(1.888.196.026,26)	(8,32)
4	Beban Cetak dan Penggandaan	55.566.352.976,73	23.102.320.700,02	32.464.032.276,71	140,52
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir	7.318.950.438,26	20.777.079.075,61	(13.458.128.637,35)	(64,77)
6	Beban Sewa Sarana Mobilitas	785.815.000,00	3.012.446.500,00	(2.226.631.500,00)	(73,91)
7	Beban Sewa Alat Berat	6.984.000,00	196.022.700,00	(189.038.700,00)	(96,44)
8	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.273.719.700,00	4.934.579.700,00	(1.660.860.000,00)	(33,66)
9	Beban Makanan dan Minuman	46.671.331.454,00	76.004.975.385,00	(29.333.643.931,00)	(38,59)
10	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	581.929.200,00	2.474.534.750,00	(1.892.605.550,00)	(76,48)
11	Beban Pakaian Kerja	1.371.154.780,00	2.386.414.200,00	(1.015.259.420,00)	(42,54)
12	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	5.622.482.187,00	4.082.191.740,00	1.540.290.447,00	37,73
13	Beban Jasa Konsultasi	14.312.226.220,00	14.870.744.400,00	(558.518.180,00)	(3,76)
14	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	456.500.000,00	(456.500.000,00)	(100,00)
15	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	4.277.805.776,00	6.557.181.985,00	(2.279.376.209,00)	(34,76)
16	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber	18.237.446.264,00	31.118.784.879,00	(12.881.338.615,00)	(41,39)
	JUMLAH	468.288.916.933,82	526.704.321.196,75	(58.415.404.262,93)	(11,09)

Rincian Beban Jasa terdapat dalam Lampiran 8.2.

8.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp41.177.714.812,00** dan **Rp49.150.951.622,00**. Beban Pemeliharaan sebagai berikut:

Tabel 8.50
Beban Pemeliharaan

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.849.997.480,00	13.778.556.371,00	2.071.441.109,00	15,03
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.089.046.807,00	16.566.531.651,00	(1.477.484.844,00)	(8,92)
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigrasi dan Jaringan	10.238.670.525,00	18.805.863.600,00	(8.567.193.075,00)	(45,56)
	JUMLAH	41.177.714.812,00	49.150.951.622,00	(7.973.236.810,00)	(16,22)

8.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp42.139.717.957,00** dan **Rp60.647.168.973,00**. Beban Perjalanan Dinas sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 8.51
Beban Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.798.736.455,00	30.611.190.615,00	(6.812.454.160,00)	(22,25)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.340.981.502,00	30.035.978.358,00	(11.694.996.856,00)	(38,94)
	JUMLAH	42.139.717.957,00	60.647.168.973,00	(18.507.451.016,00)	(30,52)

8.2.6 Beban Hibah

Beban Hibah tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp46.647.871.400,00** dan **Rp67.158.496.000,00**. Beban Hibah sebagai berikut:

Tabel 8.52
Beban Hibah

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah	4.937.188.500,00	-	4.937.188.500,00	100,00
2	Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	33.900.275.400,00	(33.900.275.400,00)	(100,00)
3	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	-	1.797.588.000,00	(1.797.588.000,00)	(100,00)
4	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	40.545.977.400,00	31.223.382.600,00	9.322.594.800,00	29,86
5	Beban Hibah Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	1.164.705.500,00	237.250.000,00	927.455.500,00	390,92
	JUMLAH	46.647.871.400,00	67.158.496.000,00	(20.510.624.600,00)	(30,54)

Rincian Beban Hibah per SKPD sebagai berikut:

Tabel 8.53
Rincian Beban Hibah Per SKPD

NO	URAIAN	2020
1	Dinas Pendidikan	28.000.000,00
2	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	140.750.000,00
3	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.500.000,00
4	PPKD	45.483.165.900,00
5	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	864.455.500,00
6	Sekretariat Daerah	120.000.000,00
	JUMLAH	46.647.871.400,00

Beban Hibah Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat senilai **Rp1.164.705.500,00** merupakan hibah dalam bentuk uang pada tahun 2020 yang terdapat pada :

1. Dinas Pendidikan senilai **Rp28.000.000,00** berupa hadiah lomba untuk apresiasi lembaga dan gugus.
2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga senilai **Rp140.750.000,00** berupa penghargaan untuk kegiatan kirab budaya dan kegiatan turnamen olahraga.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan senilai **Rp11.500.000,00** berupa hadiah lomba kegiatan minat budaya baca.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah senilai **Rp864.455.500,00** berupa pemberian Stimulan Percepatan Penerimaan PBB bagi kolektor desa Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah.
5. Sekretariat Daerah senilai **Rp120.000.000,00** berupa hadiah untuk pemenang Lomba MTQ.

8.2.7 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp924.844.000,00** dan **Rp1.389.260.143,00**. Beban Bantuan Sosial sebagai berikut:

Tabel 8.54
Beban Bantuan Sosial

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu dan atau Keluarga	924.844.000,00	1.389.260.143,00	(464.416.143,00)	(33,43)
	JUMLAH	924.844.000,00	1.389.260.143,00	(464.416.143,00)	(33,43)

8.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp238.516.243.999,61** dan **Rp175.281.715.407,31**. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebagai berikut:

Tabel 8.55
Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	99.431.068.213,45	85.756.232.700,05	13.674.835.513,40	15,95
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	35.944.175.302,31	34.381.005.415,49	1.563.169.886,82	4,55
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	98.579.105.826,15	50.548.081.727,67	48.031.024.098,48	95,02
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.561.894.657,70	4.596.395.564,10	(34.500.906,40)	(0,75)
	JUMLAH	238.516.243.999,61	175.281.715.407,31	63.234.528.592,30	36,08

8.2.8.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp99.431.068.213,45** dan **Rp85.756.232.700,05**. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin dalam Lampiran 8.3.

8.2.8.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp35.944.175.302,31** dan **Rp34.381.005.415,49**. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 8.56
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.039.812.675,10	33.778.679.608,61	1.261.133.066,49	3,73
2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	606.199.553,69	313.462.938,70	292.736.614,99	93,39
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	31.070.603,38	30.204.724,50	865.878,88	2,87
4	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	998.000,00	998.000,00	-	-
5	Beban Penyusutan Tugu Peringatan	54.905.729,85	54.905.729,84	0,01	-
6	Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah	31.837.161,60	31.837.161,60	-	-
7	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	40.206.841,51	35.267.829,56	4.939.011,95	14,00
8	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	139.144.737,18	135.649.422,68	3.495.314,50	2,58
	JUMLAH	35.944.175.302,31	34.381.005.415,49	1.563.169.886,82	4,55

8.2.8.3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp98.579.105.826,15** dan **Rp50.548.081.727,67**. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 8.57
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Penyusutan Jalan	84.473.506.387,07	43.666.975.500,76	40.806.530.886,31	93,45
2	Beban Penyusutan Jembatan	286.223.214,28	228.949.744,38	57.273.469,90	25,02
3	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	10.488.035.213,51	4.111.242.632,36	6.376.792.581,15	155,11
4	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	913.700,00	913.700,00	-	-
5	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	620.243.360,65	614.493.581,77	5.749.778,88	0,94
6	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	9.164.460,71	12.095.263,88	(2.930.803,17)	(24,23)
7	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	14.859.840,37	12.331.228,48	2.528.611,89	20,51
8	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	98.438.606,83	59.192.675,00	39.245.931,83	66,30
9	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	165.326.724,05	158.595.209,61	6.731.514,44	4,24
10	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	245.682.178,44	180.900.770,97	64.781.407,47	35,81
11	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan	76.014.700,00	76.014.700,00	-	-



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 8.57
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Sampah				
12	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	21.042.610,30	21.042.610,30	-	-
14	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	48.395.529,08	45.703.064,32	2.692.464,76	5,89
15	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan	385.712.932,31	370.020.768,07	15.692.164,24	4,24
16	Beban Penyusutan Instalasi Gas	34.683.874,80	28.174.804,01	6.509.070,79	23,10
17	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-
18	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	503.178.878,73	699.396,40	502.479.482,33	71.844,73
19	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	1.053.919.779,59	908.142.641,93	145.777.137,66	16,05
20	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	43.863.835,43	42.693.435,43	1.170.400,00	2,74
	JUMLAH	98.579.105.826,15	50.548.081.727,67	48.031.024.098,48	95,02

8.2.8.4 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp4.561.894.657,70** dan **Rp4.596.395.564,10**. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 8.58
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Amortisasi Lisensi dan Franchise	40.297.142,80	44.225.714,20	(3.928.571,40)	(8,88)
2	Beban Amortisasi Hak Cipta	19.667.000,00	24.573.000,00	(4.906.000,00)	(19,97)
3	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	4.501.930.514,90	4.527.596.849,90	(25.666.335,00)	(0,57)
	JUMLAH	4.561.894.657,70	4.596.395.564,10	(34.500.906,40)	(0,75)

Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per SKPD terdapat dalam Lampiran 8.4.

8.2.9 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2020 dan 2019 senilai **Rp1.777.619.931,00** dan **Rp2.320.447.957,10**. Beban Penyisihan Piutang sebagai berikut:

Tabel 8.59
Beban Penyisihan Piutang

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	29.359.270,60	4.018.462,39	25.340.808,21	630,61
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	3.974.845,00	242.880.525,00	(238.905.680,00)	(98,36)
3	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah	74.044.183,57	204.329.869,04	(130.285.685,47)	(63,76)



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 8.59
Beban Penyisihan Piutang

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Pusat Lainnya				
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	93.545.520,08	74.006.299,70	19.539.220,38	26,40
5	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	1.576.696.111,75	1.795.212.800,97	(218.516.689,22)	(12,17)
	JUMLAH	1.777.619.931,00	2.320.447.957,10	(542.828.026,10)	(23,39)

8.2.10 Beban Transfer

Beban Transfer tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing senilai **Rp217.199.572.908,00** dan **Rp215.492.875.421,00**. Beban Transfer sebagai berikut:

Tabel 8.60
Beban Transfer

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	23.138.396.000,00	17.562.112.671,00	5.576.283.329,00	31,75
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.729.108.952,00	2.871.420.000,00	857.688.952,00	29,87
3	Beban Transfer Bagi Bantuan Keuangan Ke Desa	188.779.837.956,00	194.062.590.750,00	(5.282.752.794,00)	(2,72)
4	Beban Transfer Bagi Bantuan Keuangan Lainnya	1.552.230.000,00	996.752.000,00	555.478.000,00	55,73
	JUMLAH	217.199.572.908,00	215.492.875.421,00	1.706.697.487,00	0,79

Rincian Beban Transfer terdapat dalam Lampiran 8.5.

9. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai **(Rp902.445.580,15)** terdiri Surplus Penjualan Aset Non lancar senilai **Rp724.736.350,00**, Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya senilai **Rp153.356.250,00**, serta Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai **(Rp1.780.538.180,15)**. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tersebut diperoleh dari Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

10. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari Beban Luar Biasa tahun 2020 senilai **Rp39.142.531.891,01**.

11. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO tahun 2020 senilai **Rp170.052.420.264,54** merupakan selisih nilai Pendapatan dan Beban. Pendapatan Operasional tahun 2020 senilai **Rp3.346.154.835.631,61**; Beban Operasional senilai **Rp3.136.057.437.895,91** sehingga diperoleh Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp210.097.397.735,70**. Surplus Penjualan Aset Non Lancar senilai **Rp724.736.350,00**; Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai **Rp153.356.250,00**; Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai **(Rp1.780.538.180,15)** sehingga diperoleh Surplus/Defisit



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

dari Kegiatan Non Operasional senilai **(Rp902.445.580,15)** dan Beban Luar Biasa senilai **Rp39.142.531.891,01** sehingga Surplus/Defisit LO tahun 2020 senilai **Rp170.052.420.264,54**.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

BAB IX

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN ARUS KAS

12. Penjelasan Laporan Arus Kas

13. Definisi Aktivitas Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintahan selama satu periode akuntansi.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi antara lain berupa penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba BUMD, investasi lainnya dan penerimaan transfer. Sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi antara lain berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga dan transfer keluar.

Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan antara lain bersumber dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan antara lain penggunaan kas untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya.

Aktivitas Pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan antara lain pencairan dana cadangan, hasil penjualan aset/ kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan dari pinjaman, penjualan surat utang, penerimaan kembali pinjaman dan penerimaan piutang. Sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan antara lain pembentukan dana cadangan, pembayaran penyertaan modal, pembayaran pokok pinjaman dan pemberian pinjaman jangka panjang. Aktivitas Non

anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non anggaran merupakan penerimaan dan pengeluaran dengan jumlah yang sama dari perhitungan pihak ketiga dan/atau kiriman uang masuk dan kiriman uang keluar.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

14. Posisi Kas

Posisi Kas per 31 Desember 2020 senilai **Rp365.945.713.213,07** sebagai berikut:

Tabel 9.1
Posisi Kas

NO	URAIAN	2020	2019
1	Kas di Kas Daerah	300.461.473.382,00	215.722.795.407,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	196.855.282,00	240.283.177,00
4	Kas di Bendahara BLUD	33.201.262.064,07	21.514.650.258,06
5	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP	30.681.432.863,00	41.143.356.251,00
6	Saldo Akhir Kas di BOS	1.404.689.622,00	10.435.770.914,00
	JUMLAH	365.945.713.213,07	289.056.856.007,06

Posisi kas per 31 Desember 2020 senilai **Rp365.945.713.213,07** mengalami kenaikan senilai **Rp 76.888.857.206,01** atau **26,60%** jika dibandingkan dengan posisi kas per 31 Desember 2019 senilai **Rp 289.056.856.007,06**. penurunan tersebut disebabkan oleh:

Tabel 9.2
Aktivitas Kas

NO	URAIAN	2020
1	Aktivitas Operasi	371.483.101.538,01
2	Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(294.993.535.194,00)
3	Aktivitas Pembiayaan	-
4	Aktivitas Non anggaran	399.290.862,00
	Kenaikan Kas	76.888.857.206,01

9.1.2.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2020 senilai **Rp 371.483.101.538,01** mengalami penurunan senilai **Rp204.654.192.228,32** atau **35,52%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 senilai **Rp576.137.293.766,33**. Arus Kas Bersih merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas.

Tabel 9.3
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

NO	URAIAN	2020	2019
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	3.768.745.556.191,01	4.014.059.450.475,19
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	3.397.262.454.653,00	3.437.922.156.708,86
	ARUS KAS BERSIH	371.483.101.538,01	576.137.293.766,33



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut :

12. Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2020 senilai **Rp 3.768.745.556.191,01** mengalami penurunan senilai **Rp245.313.894.284,18** atau **6,11%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 senilai **Rp4.014.059.450.475,19**. Arus Masuk Kas sebagai berikut:

Tabel 9.4
Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi

NO	URAIAN	2020	2019
1	Pendapatan Pajak Daerah	223.610.292.769,00	213.572.238.616,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	31.122.706.929,00	42.841.103.005,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.312.545.336,00	12.990.615.843,00
4	Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah	350.569.061.512,01	370.026.903.653,19
5	Dana Bagi Hasil Pajak	69.558.515.675,00	50.507.005.280,00
6	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	38.477.796.167,00	24.351.064.800,00
7	Dana Alokasi Umum	1.417.094.602.000,00	1.591.291.632.000,00
8	Dana Alokasi Khusus	496.783.928.401,00	547.639.574.883,00
9	Dana Penyesuaian	504.519.758.000,00	461.115.736.000,00
10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	283.133.927.219,00	294.592.460.792,00
11	Pendapatan Hibah	233.724.450.000,00	221.895.600.000,00
12	Pendapatan Lainnya	110.837.972.183,00	183.235.515.603,00
	JUMLAH	3.768.745.556.191,01	4.014.059.450.475,19

13. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2020 senilai **Rp 3.397.262.454.653,00** mengalami penurunan senilai **Rp40.659.702.055,86** atau **1,18 %** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 senilai **Rp3.437.922.156.708,86**. Arus Keluar Kas sebagai berikut:

Tabel 9.5
Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Operasi

NO	URAIAN	2020	2019
1	Belanja Pegawai	1.779.497.848.207,00	1.776.844.553.989,00
2	Belanja Barang dan Jasa	847.795.538.818,00	976.683.376.555,86
3	Belanja Hibah	45.483.165.900,00	31.223.382.600,00
4	Belanja Bantuan Sosial	924.844.000,00	1.389.260.143,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 9.5
Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Operasi

NO	URAIAN	2020	2019
5	Belanja Tidak Terduga	53.986.319.820,00	-
6	Bagi Hasil Pajak	23.138.396.000,00	17.562.112.671,00
7	Bagi Hasil Retribusi	3.729.108.952,00	2.871.420.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	641.155.002.956,00	630.351.298.750,00
9	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.552.230.000,00	996.752.000,00
	JUMLAH	3.397.262.454.653,00	3.437.922.156.708,86

9.1.2.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan per 31 Desember 2020 senilai **Rp(294.993.535.194,00)** mengalami kenaikan senilai **Rp292.429.763.718,00** atau **49,78%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 senilai **Rp(587.423.298.912,00)** Arus Kas Bersih merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas.

Tabel 9.6
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

NO	URAIAN	2020	2019
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Aset Non Keuangan	1.958.510.410,00	410.480.241,00
2	Arus keluar Kas dari Aktivitas Aset Non Keuangan	296.952.045.604,00	587.833.779.153,00
	ARUS KAS BERSIH	(294.993.535.194,00)	(587.423.298.912,00)

Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Keuangan sebagai berikut :

1. Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan per 31 Desember 2020 senilai **Rp1.958.510.410,00** mengalami kenaikan senilai **Rp 1.548.030.169,00** atau **377,13%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 senilai **Rp410.480.241,00**. Arus Masuk Kas sebagai berikut:

Tabel 9.7
Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

NO	URAIAN	2020	2019
1	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	724.736.350,00	45.372.840,00
2	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	1.233.774.060,00	365.107.401,00
	JUMLAH	1.958.510.410,00	410.480.241,00



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan per 31 Desember 2020 senilai **Rp296.952.045.604,00** mengalami penurunan senilai **Rp290.881.733.549,00** atau **49,48%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 senilai **Rp587.833.779.153,00**. Arus Keluar Kas sebagai berikut :

Tabel 9.8
Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

NO	URAIAN	2020	2019
1	Belanja Tanah	-	7.355.693.793,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	133.412.280.354,56	123.053.357.908,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	90.175.480.974,00	193.588.871.113,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	72.994.260.369,44	235.134.118.886,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	370.023.906,00	28.701.737.453,00
	JUMLAH ARUS KELUAR KAS	296.952.045.604,00	587.833.779.153,00

9.1.2.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2020 senilai **Rp0,00** mengalami kenaikan senilai **Rp0,00** atau **0,00%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 senilai **Rp0,00** Arus Kas Bersih merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar.

Tabel 9.9
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan

NO	URAIAN	2020	2019
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan	-	21.500.000.000,00
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan	-	21.500.000.000,00
	ARUS KAS BERSIH	-	-

Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan sebagai berikut :

1. Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2020 senilai **Rp0,00** mengalami penurunan senilai **Rp21.500.000.000,00** atau **100,00%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 senilai **Rp21.500.000.000,00**. Arus Masuk Kas sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 9.10
Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pembiayaan

NO	URAIAN	2020	2019
1	Pencairan Dana Cadangan	-	-
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	21.500.000.000,00
	JUMLAH	-	21.500.000.000,00

2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2020 senilai **Rp0,00** mengalami penurunan senilai **Rp21.500.000.000,00** atau **100,00%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 senilai **Rp21.500.000.000,00**. Arus Keluar Kas sebagai berikut:

Tabel 9.11
Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pembiayaan

NO	URAIAN	2020	2019
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	-	21.500.000.000,00
	JUMLAH	-	21.500.000.000,00

9.1.2.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2020 senilai **Rp211.220.099.323,00** mengalami penurunan senilai **Rp24.749.770.039,75** atau **10,48%** jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih per 31 Desember 2019 senilai **Rp239.908.308,00** Arus Kas Bersih merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar.

Tabel 9.12
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran

NO	URAIAN	2020	2019
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Keuangan	211.836.144.362,00	236.403.377.716,75
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Keuangan	211.436.853.500,00	236.186.623.539,75
	ARUS KAS BERSIH	399.290.862,00	216.754.177,00

Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran sebagai berikut :

1. Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2020 senilai **Rp211.836.144.362,00** mengalami Penurunan senilai **Rp24.567.233.354,75** atau **10,39%** jika dibandingkan dengan per



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

31 Desember 2019 senilai **Rp236.403.377.716,75**. Arus Masuk Kas sebagai berikut:

Tabel 9.13
Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Non Anggaran

NO	URAIAN	2020	2019
1	Iuran Wajib Pegawai (IWP)	57.775.015.008,00	65.554.903.222,00
2	Tabungan Perumahan Pegawai	895.408.000,00	1.244.826.000,00
3	PPH Pasal 21 (Gaji+Tunjangan+Honorarium)	67.895.531.530,00	2.114.454.531,00
4	Askes	40.648.487.763,00	19.804.093.955,00
5	PPN Fihak Ketiga	28.263.475.518,00	63.140.864.745,91
6	PPH Fihak Ketiga	5.708.975.638,00	84.544.235.162,84
7	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.383.069.380,00	-
8	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	4.149.219.743,00	-
9	Iuran BPJS	4.490.392.324,00	-
10	Denda keterlambatan pekerjaan	10.485.565,00	-
11	pengeluaran Lain lain	38.854,00	-
12	Hutang pajak	616.045.039,00	-
	JUMLAH	211.836.144.362,00	236.403.377.716,75

2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2020 senilai **Rp211.436.853.500,00** mengalami penurunan senilai **Rp24.749.770.039,75** atau **10,48%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 senilai **Rp236.186.623.539,75**. Arus Keluar Kas sebagai berikut:

Tabel 9.14
Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Non Anggaran

NO	URAIAN	2020	2019
1	Iuran Wajib Pegawai (IWP)	57.775.015.008,00	65.554.903.222,00
2	Tabungan Perumahan Pegawai	895.408.000,00	1.244.826.000,00
3	PPH Pasal 21 (Gaji+Tunjangan+Honorarium)	67.988.096.160,00	2.114.454.531,00
4	Askes	40.648.487.763,00	19.804.093.955,00
5	PPN Fihak Ketiga	28.345.857.427,00	63.058.482.936,91
6	PPH Fihak Ketiga	5.750.783.276,00	84.409.862.894,84
7	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.383.069.380,00	-
8	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	4.149.219.743,00	-
9	Iuran BPJS	4.490.392.324,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Tabel 9.14
Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Non Anggaran

NO	URAIAN	2020	2019
10	Denda keterlambatan pekerjaan	10.485.565,00	-
11	pengeluaran Lain lain	38.854,00	-
	JUMLAH	211.436.853.500,00	236.186.623.539,75

15. Penjelasan Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas per 31 Desember 2020 sebesar **Rp 365.945.713.213,07** berasal dari saldo akhir :

- Kas di Kas Daerah	Rp	300.461.473.382,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	196.855.282,00
- Kas di BLUD	Rp	33.201.262.064,07
- Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Rp	30.681.432.863,00
- Kas di Bendahara BOS	Rp	1.404.689.622,00

Dengan rincian sebagai berikut :

- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	371.483.101.538,01
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp	(294.993.535.194,00)
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	-
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	Rp	399.290.862,00
- Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Selama TA 2020	Rp	76.888.857.206,01
- Saldo Awal Kas dan Setara Kas per 1 Januari 2020	Rp	289.056.856.007,06
- Saldo Akhir Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020	Rp	365.945.713.213,07

Terdapat selisih Saldo awal Kas ditahun 2020 dengan perhitungan Laporan Arus Kas 2019 senilai **Rp5.663.474,00** yang merupakan koreksi atas saldo awal kas di Bendahara dana BOS senilai **Rp2.871.471,00** dan koreksi atas saldo awal kas di Bendahara Kapitasi JKN senilai **Rp2.792.003,00**.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

BAB X

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

16. Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas Awal senilai **Rp4.517.366.152.410,54** merupakan nilai ekuitas akhir tahun 2019.

17. Surplus/Defisit-LO

Saldo Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2020 senilai **Rp170.052.420.264,54** merupakan surplus/defisit dari kegiatan operasional senilai **Rp210.097.397.735,70** ditambah surplus/defisit dari kegiatan non operasional senilai **Rp(902.445.580,15)** dikurangi pos luar biasa senilai **Rp39.142.531.891,01**. Surplus dari kegiatan operasional merupakan selisih lebih antara Pendapatan-LO senilai **Rp3.346.154.835.631,61** dan Beban-LO senilai **Rp3.136.057.437.895,91**.

18. RK PPKD

Saldo RK PPKD per 31 Desember 2020 senilai **Rp0,00**.

19. RA PPKD

Saldo RA PPKD per 31 Desember 2020 senilai **Rp0,00**.

20. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2020 senilai **Rp(87.572.190.876,26)**. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi atas nilai aset dan ekuitas pada laporan keuangan tahun 2020. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebagai berikut:

Tabel 10.1
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Koreksi Kas	5.663.474,00
2	Koreksi Aset Lancar	(8.392.688.761,81)
3	Pembiayaan dan Investasi	36.233.893.245,72
4	Koreksi Aset Tetap dan Penyusutan	(115.084.228.433,17)
5	Koreksi Kewajiban	(334.830.401,00)
	JUMLAH	(87.572.190.876,26)

Rincian dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada tiap SKPD terdapat dalam Lampiran 10.1.

21. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2020 senilai **Rp4.599.846.381.798,82**.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

BAB XI

PENUTUP

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam hal ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai penjelasan atas Laporan Keuangan Daerah. Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Sumber, Mei 2021

BUPATI CIREBON,

IMRON